

**PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL TBK.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
*CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***

**31 DESEMBER 2016 DAN 2015/
*31 DECEMBER 2016 AND 2015***

DAN/AND

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/
*INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT***

**Lampiran /
Attachment**

Surat Pernyataan Direksi		Board of Director's Statement
Laporan Auditor Independen		Independent Auditor's Report
Laporan Keuangan		Financial Statements
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	<i>Consolidated Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian	2	<i>Consolidated Statement of Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	3	<i>Consolidated Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	4	<i>Consolidated Statement of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	5	<i>Notes to Consolidated Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG/
DIRECTORS' STATEMENT REGARDING**

**TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA 31 DESEMBER 2016 DAN 2015**

**RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS AS AT
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2016 AND 2015**

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Atas nama Direksi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Kenneth Raymond Allan
Alamat kantor	:	Menara Merdeka lantai 30 Jl. Budi Kemuliaan I No. 2, Jakarta 10110, Indonesia
Telepon	:	(021) 2957-3737
Jabatan	:	Direktur

Nama	:	Vera Likin
Alamat kantor	:	Menara Merdeka lantai 30 Jl. Budi Kemuliaan I No. 2, Jakarta 10110, Indonesia
Telepon	:	(021) 2957-3737
Jabatan	:	Direktur

On behalf of the Board of Directors, the undersigned:

Name	:	Kenneth Raymond Allan
Office address	:	Menara Merdeka 30 th floor Jl. Budi Kemuliaan I No. 2, Jakarta 10110, Indonesia
Telephone	:	(021) 2957-3737
Position	:	Director

Name	:	Vera Likin
Office address	:	Menara Merdeka 30 th floor Jl. Budi Kemuliaan I No. 2, Jakarta 10110, Indonesia
Telephone	:	(021) 2957-3737
Position	:	Director

menyatakan bahwa:

declare that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk. dan entitas anak ("Grup");
2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Grup.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi.

For and on behalf of the Board of Directors.

Kenneth Raymond Allan
Direktur/Director



Vera Likin
Direktur/Director

JAKARTA
17 Mei 2018

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
Laporan No.: 67/BLEM/V/2018
**Pemegang Saham, Dewan Komisaris
dan Direksi**
PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk dan entitas anak terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2016 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
Report No.: 67/BLEM/V/2018
**The Shareholders, Boards of Commissioners
and Directors**
PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk and subsidiaries, which comprise the consolidated statements of financial position as of December 31, 2016 the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion

keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasiyan atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasiyan atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Basis untuk opini wajar dengan pengecualian

Pada tanggal 31 Desember 2016 liabilitas jangka pendek Grup melebihi aset lancarnya sebesar AS\$ 595 juta. Untuk mengatasi kesulitan likuiditas yang dialami oleh Grup, seperti diungkapkan dalam catatan 18 atas laporan keuangan konsolidasian, entitas anak, PT Asmin Koalindo Tuhup, mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perjanjian perdamaian (homologasi) ditandatangani tanggal 29 Maret 2016 yang kemudian disahkan oleh Hakim Pengadilan Niaga tanggal 4 April 2016. Berdasarkan perjanjian perdamaian ini, kewajiban perusahaan sebesar AS\$ 518,41 juta akan dibayarkan mulai bulan ketujuh hingga tahun kesembilan sejak perjanjian perdamaian menjadi berkekuatan hukum tetap. Kendati demikian, masih terdapat kewajiban jangka pendek Perusahaan yang tidak termasuk dalam skema PKPU tersebut sebesar AS\$ 361 juta Kondisi-kondisi tersebut mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

Sesuai dengan yang diungkapkan pada Catatan 19, AKT sedang mengajukan banding sehubungan dengan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan permohonan banding dan beberapa SKP (Surat Ketetapan Pajak) yang terbit sampai dengan tanggal laporan ini, AKT mencatat adanya kelebihan bayar pajak sebesar AS\$ 45 juta dan mengakui pendapatan lain-lain sebesar AS\$ 94 juta sehubungan dengan kelebihan bayar pajak yang dimaksud.

Sesuai yang diungkapkan pada Catatan 39 atas laporan keuangan konsolidasian, Grup telah menandatangani perjanjian penyelesaian hutang dengan bank kreditor utamanya. Perjanjian tersebut meliputi hal-hal antara lain mengenai kewajiban yang harus dibayar oleh Grup dan jangka waktu pembayaran kewajiban tersebut.

on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Basis for qualified opinion

On December 31, 2016, the Group's current liabilities exceed its current assets by US\$ 595 million. To address this potential liquidity issue, as disclosed in note 18 to the consolidated financial statements, its subsidiary, PT Asmin Koalindo Tuhup ("AKT"), voluntarily filed a Suspension of Debt Payments ("PKPU") with the Commercial Court at Central Jakarta District Court. A composition plan was entered into between AKT and its creditors on March 29, 2016 and was approved by the appointed Panel of Judges of the Commercial Court on April 4, 2016. In accordance with the terms of the composition plan, liabilities amounting to US\$ 518.41 million become payable as of the the seventh month of the date the composition plan becomes legally final and binding up to the ninth anniversary. These conditions indicate the existence of a material uncertainty which may cast significant doubt about the Group's ability to continue as a going concern.

As disclosed in Note 19, AKT is pursing appeals on some of its tax disputes with the tax office. Pursuant to the appeals and the underlying assessments issued until the date of this report, AKT records a tax overpayment of US\$ 45 million and other income in the amount of US\$ 94 million as a result thereof.

As disclosed in Note 39 to the consolidated financial statements, the Group signed a loan settlement agreement with its major bank creditor. The agreement covers areas such as settlement amount and the agreed payment dates.

Opini wajar dengan pengecualian

Menurut opini kami, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf basis untuk opini Wajar dengan pengecualian, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk dan Entitas anaknya tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan suatu hal

Kami membawa perhatian ke Catatan 2a atas laporan keuangan konsolidasian terlampir yang menjelaskan bahwa pada tanggal 31 Desember 2016, Kelompok Usaha mengalami defisiensi modal dan total liabilitas jangka pendek Kelompok Usaha telah melampaui total asetnya. Kondisi tersebut, bersama dengan hal-hal lain sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 2a atas laporan keuangan konsolidasian, mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Kelompok Usaha untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup penyesuaian yang mungkin harus dilakukan yang berasal dari kondisi tersebut.

Seperti diungkapkan dalam Catatan 33 atas laporan keuangan konsolidasian, Kelompok Usaha mempunyai liabilitas kontinjenji berupa berbagai tuntutan dari pihak ketiga yang timbul dari transaksi bisnis normal.

Hal lain

Sesuai yang diungkapkan pada pada Catatan 39 atas laporan keuangan konsolidasian, Kementerian ESDM Republik Indonesia mengeluarkan putusan untuk mencabut izin kontrak karya (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT). Atas putusan tersebut, AKT telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN). Dalam Putusannya, PTUN telahlah menganulir surat dari Kementerian ESDM.

Seperti dijelaskan pada Catatan 10, AKT menambah masa manfaat aset tetapnya sehingga penyusutan pada tahun berjalan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

Qualified opinion

In our opinion, except for the effects of the matters described in the basis for qualified opinion paragraph, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the Consolidated financial position of PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk and its Subsidiaries as of December 31, 2016, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Emphasis of matter

We draw attention to Note 2a to the accompanying consolidated financial statements which describes that, as of December 31, 2016, the Group has a negative capital and total current liabilities of the Group have exceeded its total assets. These conditions, along with other matters as set forth in Note 2a to the consolidated financial statements, indicate the existence of a material uncertainty that may cast significant doubt about the Group's ability to continue as a going concern. The consolidated financial statements do not include any adjustment that might result from the outcome of this uncertainty.

As disclosed in Note 33 to the consolidated financial statements, the Group is contingently liable for claims by various third parties arising from the ordinary conduct of business.

Other matters

As disclosed in Note 39 to the consolidated financial statements, the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia issued a decree to revoke PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT)'s contract of work (CCoW). AKT challenged the decree through the State Administrative Court of Jakarta and, to this end, the Court has annulled the said decree.

As disclosed in Note 10, during 2016 AKT revises up the estimated useful life of its property, plant and equipment resulting in the lower amount of depreciation charge for the relevant year.

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK / REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
GIDEON ADI & REKAN**

Bisner Sitanggang, CA., CPA

Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1111 / Public Accountant Registration No. AP. 1111

17 Mei 2018 / May 17, 2018

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 1/1 Schedule

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
kecuali nilai nominal dan data saham)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars,
except for par value and share data)

	Catatan /Notes	2016	2015	
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	5	4,654,168	4,158,049	<i>Cash and cash equivalents</i>
Kas di bank yang dibatasi Penggunaannya	6	23,152	88,113	<i>Restricted cash in bank</i>
Piutang usaha - Pihak ketiga	7	48,695,007	16,323,958	<i>Trade receivables - Third parties</i>
Uang muka dan pembayaran dimuka, bagian lancar - Pihak ketiga	8	41,951,211	16,313,898	<i>Advances and payments, current portion</i>
Persediaan	9	120,679,856	63,084,579	<i>Third party - Inventories</i>
Pajak dibayar di muka, bagian lancar	19a	<u>46,447,918</u>	<u>9,719,961</u>	<i>Prepaid tax, current portion</i>
Jumlah Aset Lancar		<u>262,451,312</u>	<u>109,688,558</u>	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Piutang dari pihak berelasi		-	1,383,261	<i>Amounts due from related parties</i>
Uang jaminan		-	3,616,452	<i>Refundable deposits</i>
Uang muka dan pembayaran dimuka, dikurangi bagian lancar	8	-	21,361,639	<i>Advances and prepayments, net of current portion</i>
Pajak dibayar dimuka, dikurangi bagian lancar	19a	-	60,531,143	<i>Prepaid tax, net of current portion</i>
Aset pajak tangguhan	19d	145,367,408	169,104,162	<i>Deferred tax assets</i>
Aset tetap	11	267,454,332	293,555,393	<i>Fixed assets</i>
Biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan	10	116,179,352	120,144,041	<i>Deferred exploration and development expenditure</i>
Investasi pada pengendalian bersama entitas	13	-	-	<i>Investment in jointly controlled entities</i>
Properti pertambangan	12	<u>139,745,109</u>	<u>143,177,363</u>	<i>Mining properties</i>
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>668,746,201</u>	<u>812,873,454</u>	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		<u>931,197,513</u>	<u>922,562,012</u>	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 1/2 Schedule

LAPORAN POSISI KEUANGAN

KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dinyatakan dalam Dolar AS,
kecuali nilai nominal dan data saham)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF

FINANCIAL POSITION

31 DECEMBER 2016 AND 2015

(Expressed in US Dollars,
except for par value and share data)

	Catatan /Notes	2016	2015	
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Pinjaman jangka pendek	16b	-	376,412,498	Short-term loans
Utang usaha - Pihak ketiga	14	4,643,779	410,419,443	Trade payables - Third parties
Beban yang masih harus dibayar	15	13,386,703	48,990,701	Accrued expenses
Utang pajak:				Tax payable:
- Pajak penghasilan badan	19b	-	4,374,936	Corporate income tax -
- Pajak lainnya	19b	7,826	95,978,563	Other taxes -
Saldo transaksi rekening koran pihak berelasi	30a	78,098,640	14,193,747	Related-party current account balance
Bagian lancar atas pinjaman jangka panjang:				Current maturity of long-term borrowings:
- Utang sewa pembiayaan	17	1,493,553	1,512,155	Finance lease payables -
- Pinjaman	16a	760,820,313	800,763,000	Borrowings -
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		<u>858,450,814</u>	<u>1,752,645,043</u>	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Utang yang telah direstrukturisasi	18	813,817,532	-	Restructured debt
Liabilitas pajak tangguhan	19d	1,390,993	1,609	Deferred tax liabilities
Kewajiban jangka panjang setelah dikurangi bagian lancar:				Long-term borrowings net of current maturity:
- Utang sewa pembiayaan	17	2,881,232	74,709,279	Finance lease payables -
Penyisihan reklamasi dan penutupan tambang				Provision for reclamation and mine closure
Penyisihan imbalan karyawan	20	2,058,749	2,070,607	Provision for employee benefits
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		<u>823,063,687</u>	<u>79,125,215</u>	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		<u>1,681,514,501</u>	<u>1,831,770,258</u>	TOTAL LIABILITIES
(DEFISIENSI EKUITAS)/ EKUITAS				(DEFICIENCY IN EQUITY)/ EQUITY
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk				Equity attributable to owners of the parent
Modal saham-modal dasar				
53.080.000.000 lembar saham, ditempatkan dan disetor penuh				Share capital-authorized
17.693.000.000 lembar saham dengan nilai nominal per saham Rp.100	21	196,714,032	196,714,032	53,080,000,000 shares, issued and fully paid 17,693,000,000 shares at par value of Rp.100
Premi saham	22	517,679,733	517,679,733	Share premium
Saham simpanan	21	(8,380,461)	(8,380,461)	Treasury shares
(Akumulasi rugi)/saldo laba				(Accumulated losses)/retained earnings
- Dicadangkan	23	138,079,672	138,079,672	Appropriated -
- Tidak dicadangkan		<u>(1,594,406,245)</u>	<u>(1,753,295,261)</u>	Unappropriated -
		<u>(750,313,269)</u>	<u>(909,202,285)</u>	
Kepentingan non pengendali		(3,719)	(5,961)	Non-controlling interest
JUMLAH DEFISIENSI EKUITAS		<u>(750,316,988)</u>	<u>(909,208,246)</u>	TOTAL DEFICIENCY IN EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN DEFISIENSI EKUITAS		<u>931,197,513</u>	<u>922,562,012</u>	TOTAL LIABILITIES AND DEFICIENCY IN EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara
keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements
form an integral part of these consolidated financial statements.

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 2 Schedule

**LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Dinyatakan dalam Dolar AS)**

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF
COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE PERIODS ENDED
31 DECEMBER 2016 AND 2015
(Expressed in US Dollars)**

	Catatan/ Notes	2016	2015	
Penjualan bersih (Beban) pokok penjualan	24 25	133,616,667 <u>(43,808,813)</u>	72,522,259 <u>(274,453,789)</u>	Net sales (Cost) of goods sold
Laba/(rugi) bruto		89,807,854	(201,931,530)	Gross profit/(loss)
(Beban) penjualan dan pemasaran	26	(6,495,698)	(17,810,610)	<i>Selling and marketing (expenses)</i>
(Beban) umum dan administrasi	27	(9,716,043)	(54,606,283)	<i>General and administration (expenses)</i>
Pendapatan/(bebannya) lain-lain, bersih	28,29	<u>110,465,200</u>	<u>(53,055,975)</u>	<i>Other income/(expenses), net</i>
		<u>94,253,459</u>	<u>(125,472,868)</u>	
Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan		184,061,313	(327,404,398)	Profit/(loss) before income tax
Manfaat/(bebannya) pajak penghasilan	19c	<u>(25,126,139)</u>	<u>74,379,610</u>	<i>Income tax benefit/(expense)</i>
Laba/(rugi) bersih tahun berjalan		158,935,174	(253,024,788)	Net income/(loss) for the year
Laba/(rugi) komprehensif lain	20	<u>(43,916)</u>	<u>366,357</u>	<i>Other comprehensive income/(loss)</i>
Laba/(rugi) komprehensif tahun berjalan		158,891,258	(252,658,431)	Comprehensive income/(loss) for the year
Laba/(rugi) bersih yang diatribusikan kepada:				Net income/(loss) attributable to:
- Pemilik entitas induk		158,932,932	(253,021,416)	<i>Owners of the parent - Non-controlling interest -</i>
- Kepentingan nonpengendali		<u>2,242</u>	<u>(3,372)</u>	
		158,935,174	(253,024,788)	
Laba/(rugi) komprehensif yang diatribusikan kepada:				Comprehensive income/(loss) attributable to:
- Pemilik entitas		158,889,016	(252,655,059)	<i>Owners of the parents - Non-controlling interest -</i>
- Kepentingan nonpengendali		<u>2,242</u>	<u>(3,372)</u>	
		158,891,258	(252,658,431)	
Laba/(rugi) bersih per saham dasar dan dilusian (nilai penuh)	31	0.01	(0.01)	Basic and diluted profit/(loss) per share (full amount)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 3 Schedule

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Dinyatakan dalam Dolar AS)**

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE PERIODS ENDED
31 DECEMBER 2016 AND 2015
(Expressed in US Dollars)**

Diatribusikan kepada pemilik entitas induk/
Attributable to owners of the parent

Catatan/ <i>Notes</i>	Modal saham/ <i>Share capital</i>	Premi saham/ <i>Share premium</i>	Saham simpanan/ <i>Treasury shares</i>	Cadangan lain-lain/ <i>Other reserves</i>	(akumulasi rugi)/ saldo laba/ <i>(Accumulated loss)/ retained earnings</i>		Jumlah/ <i>Total</i>	Kepenti- ngan non pengen- dali/ <i>Non- controll- ing interest</i>	Jumlah (defisiensi ekuitas)/ <i>Total (Deficiency In equity)/ Equity</i>	<i>Balance as at January 1, 2015</i>	
					Dicadangkan/ <i>Appropriated</i>	Tidak dicadangkan/ <i>Unappropriated</i>					
Saldo 1 Januari 2015 Rugi komprehensif tahun berjalan	21,22,23	196,714,032	517,679,733	(8,380,461)	-	138,079,672	(1,500,640,202)	(656,547,226)	(2,589)	(656,549,815)	<i>Balance as at January 1, 2015</i>
							(252,655,059)	(252,655,059)	(3,372)	(252,658,431)	<i>Comprehensive loss for the year</i>
Saldo 1 Januari 2016 / 31 Desember 2015 Rugi komprehensif tahun berjalan (Rugi)/laba saldo 31 Desember 2016		196,714,032	517,679,733	(8,380,461)	-	138,079,672	(1,753,295,261)	(909,202,285)	(5,961)	(909,208,246)	<i>Balance as at January 1, 2016 /December 31, 2015</i>
							158,889,016	158,889,016	2,242	158,891,258	<i>Comprehensive income for the year</i>
		196,714,032	517,679,733	(8,380,461)	-	138,079,672	(1,594,406,245)	(750,313,269)	(3,719)	(750,316,988)	<i>(Loss)/profit balance as at December 31, 2016</i>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 4 Schedule

**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Dinyatakan dalam Dolar AS)**

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE PERIODS ENDED
31 DECEMBER 2016 AND 2015
(Expressed in US Dollars)**

	2016	2015	
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flows from operating activities
Penerimaan dari pelanggan	101,245,618	85,409,029	Receipts from customers
Pembayaran kepada pemasok untuk kepentingan produksi	(93,001,452)	(64,096,885)	Payments to suppliers related to production
Pembayaran kepada pemasok untuk keperluan operasional non produksi	(15,753,761)	-	Payments to suppliers not related to production
Penerimaan lain-lain	-	34,754,146	Other receipts/(payments)
Pembayaran sehubungan dengan karyawan	(12,110,677)	(13,772,895)	Payments related to employees
Pembayaran kepada Pemerintah	(11,123,868)	(49,894,614)	Payments to Governments
Pembayaran bunga	-	(26,395,876)	Interest payments
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi	(30,744,140)	(33,997,095)	Net cash flows used in provided from operating activities
Arus kas dari aktivitas investasi			Cash flows from investing activities
Penempatan kas di bank yang dibatasi penggunaanya	(254)	(17,318)	Placement of restricted cash in banks
Penerimaan dari kas di bank yang dibatasi penggunaannya	65,215	-	Proceeds from restricted cash in banks
Pembayaran pembelian aset tetap	(44,195)	(1,343,936)	Payment for purchase of fixed assets
Penerimaan atas penjualan aset tetap	526,938	-	Proceeds from sale of fixed assets
Pemberian pinjaman kepada pihak berelasi	1,674,663	(16,891,505)	Loan provided to related parties
Penerimaan atas pinjaman kepada pihak berelasi	68,991,852	-	Payments received for loan for related parties
Pembayaran untuk biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan	(31,275)	(3,995,964)	Payments for deferred exploration and development expenditure
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	71,182,944	(22,248,723)	Net cash flows used in investing activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash flows from financing activities
Pembayaran pinjaman	(39,942,685)	-	Repayments of borrowings
Penambahan pinjaman jangka pendek	-	73,057,768	Addition for short-term loans
Pembayaran utang sewa pembiayaan	-	(13,066,774)	Payments for leases
Arus kas bersih yang (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas pendanaan	(39,942,685)	59,990,994	Net cash flows (used in)/provided from financing activities
Penurunan bersih kas dan setara kas	496,119	3,745,176	Net decrease in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal tahun	4,158,049	412,873	Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	4,654,168	4,158,049	Cash and cash equivalents at the end of the year

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/1 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian Perusahaan dan informasi lainnya

PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk. ("Perusahaan") didirikan pada tanggal 15 Maret 2006 berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, S.H. No. 109 tanggal 15 Maret 2006. Akta pendirian Perusahaan disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-09502 HT.01.01.TH.2006 tanggal 3 April 2006. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Diantaranya perubahan berikut ini yang dilakukan berdasarkan Akta Notaris No. 28 tanggal 25 Agustus 2010 dan No. 39 tanggal 16 Desember 2010, keduanya dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., yang memuat tentang perubahan status Perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, perubahan nama Perusahaan yang semula bernama PT Borneo Lumbung Energi menjadi PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk., pemecahan nilai nominal saham dari Rp10.000 menjadi Rp100 per lembar saham, menerbitkan saham baru sebanyak 4.423.000.000 lembar saham, meningkatkan modal dasar Perusahaan dari Rp500 miliar menjadi Rp5.308 miliar, mengubah susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan dan untuk penyesuaian dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") No. IX.J.1. Akta No. 28 tanggal 25 Agustus 2010 telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-43248.AH.01.02.TH.2010 tanggal 2 September 2010. Sedangkan Akta No. 39 tanggal 16 Desember 2010, telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan bukti penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar No. AHU-AH.01.10-33018 tanggal 23 Desember 2010.

Susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan terakhir ditetapkan berdasarkan Akta Notaris No. 30 tanggal 16 Oktober 2013, yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H. yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-63806.AH.01.02. Tahun 2013 tanggal 5 Desember 2013.

1. GENERAL INFORMATION

a. Establishment of the Company and other information

PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk. (the "Company") was established on 15 March 2006 based on Notarial Deed of Sutjipto, S.H. No. 109 dated 15 March 2006. The Company's Articles of Association were approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia via Decree No. C-09502 HT.01.01.TH.2006 dated 3 April 2006. The Company's Articles of Association have been amended several times. Among others the following amendments which were implemented based on Notarial Deed of Fathiah Helmi, S.H. No. 28 dated 25 August 2010 and No. 39 dated 16 December 2010, to change the status of the Company from a private company to a public company, to change the Company's name from PT Borneo Lumbung Energi to PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk., to conduct a stock split from Rp10,000 to Rp100 per share, to issue 4,423,000,000 new shares, to increase the Company's authorised capital from Rp500 billion to Rp5,308 billion, to approved the changes to the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners, and to conform with Capital Market and Financial Institution ("Bapepam-LK") regulation No. IX.J.1. Deed No. 28 dated 25 August 2010 has been notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as evidenced by Decree No. AHU-43248.AH.01.02.TH.2010 dated 2 September 2010. Moreover, deed No. 39 dated 16 December 2010 has been notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as evidenced by notification and acceptance Letter No. AHU-AH.01.10-33018 dated 23 December 2010.

The latest composition of the Board of Directors and Board of Commissioners was established based on the Notarial Deed of Notary Fathiah Helmi, S.H. No. 30 dated 16 October 2013 which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by Decree No. AHU-63806.AH.01.02.Tahun 2013 dated 5 December 2013.

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/2 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

Pada laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan dan entitas anaknya secara bersama-sama disebut sebagai "Grup".

Entitas pengendali utama adalah PT Republik Energi & Metal ("REM"), sebuah perusahaan yang didirikan di dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia.

Perusahaan mulai mengoperasikan penambangan batubara secara komersial melalui anak perusahaan pada tanggal 15 September 2009. Lokasi penambangan Perusahaan berada di Kecamatan Muara Laung dan Barito Tuhup Raya, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Perusahaan berkantor pusat di Menara Merdeka lantai 30, Jl. Budi Kemuliaan I No. 2, Jakarta Pusat 10110, Indonesia.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, Perusahaan bergerak dalam bidang usaha perdagangan, pembangunan, pertambangan, pengangkutan dan jasa. Jasa yang dimaksudkan termasuk jasa konsultasi bisnis, jasa konsultasi pertambangan, jasa konsultasi teknik *engineering* dan jasa lainnya yang mendukung kegiatan pertambangan dan perdagangan barang tambang. Entitas anak bergerak dalam bidang usaha pertambangan batubara dan aktivitas lainnya yang terkait.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	:	Silvanus Yulian Wenas	:	President Commissioner
Komisaris Independen	:	Soesanto Loekman	:	Independent Commissioner

Direktur Utama	:	Alexander Ramlie	:	President Director
Direktur	:	Maxwell Armand	:	Director
Direktur	:	Kenneth Raymond Allan	:	Director
Direktur	:	Nenie Afwani	:	Director
Direktur	:	Vera Likin	:	Director

Susunan komite audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Soesanto Loekman	:	Chairman
-------	---	------------------	---	----------

Pada tanggal 31 Desember 2016, Grup mempekerjakan 1.542 karyawan (2015: 1.599 karyawan).

1. GENERAL INFORMATION (continued)

In these consolidated financial statements, the Company and its subsidiaries are collectively referred to as the "Group".

The immediate parent entity is PT Republik Energi & Metal ("REM"), a company incorporated in and under the Laws of the Republic of Indonesia.

The Company commenced its commercial coal mining operations through a subsidiary on 15 September 2009. The Company's mine site is located in the Muara Laung and Barito Tuhup Raya Sub-districts, Murung Raya Regency, Central Kalimantan. The Company's head office is located at Menara Merdeka 30th floor, Jl. Budi Kemuliaan I No. 2, Central Jakarta 10110, Indonesia.

In accordance with Article 3 of its Articles of Association, the Company is established to conduct business in trading, construction, mining, transportation and services. The term service includes business consultation, mining consultation, technical engineering consultation and other services that support mining operations and trading. The Company's subsidiaries are engaged in coal mining and related activities.

As at 31 December 2016 and 2015, the Company's Board of Commissioners and Directors were as follows:

The composition of the Company's audit committee as at 31 December 2016 and 2015 was as follows:

Ketua	:	Soesanto Loekman	:	Chairman
-------	---	------------------	---	----------

As at 31 December 2016, the Group employed 1,542 employees (2015: 1,599 employees).

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/3 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Penawaran Umum Saham Perdana Perusahaan

Pada tanggal 16 November 2010, Perusahaan menerima Surat Pernyataan Efektif dari Ketua Bapepam-LK dengan suratnya No. S-10407/BL/2010 untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp1.170 per lembar saham atas 4.423.000.000 lembar saham, atau 25% dari keseluruhan 17.693.000.000 lembar saham Perusahaan yang ditempatkan dan disetor penuh. Pada tanggal 26 November 2010, saham yang ditawarkan kepada masyarakat dalam Penawaran Umum Saham Perdana dicatatkan di Bursa Efek Indonesia bersamaan dengan pencatatan 13.270.000.000 lembar saham pendiri, sehingga jumlah seluruh saham yang dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia menjadi 17.693.000.000 lembar.

c. Struktur Grup

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, struktur Grup adalah sebagai berikut:

1. GENERAL INFORMATION (continued)

b. Initial Public Offering of the Company's Shares

On 16 November 2010, the Company obtained a Notice of Effectiveness from the Chairman of Bapepam-LK via letter No. S-10407/BL/2010 for the Company to conduct its Initial Public Offering for offering to and subscription by the public at an offering price of Rp1,170 per share of 4,423,000,000 shares, or 25% of the total of 17,693,000,000 of the Company's issued and fully paid shares. The shares offered to the public in the Company's Initial Public Offering were listed with the Indonesia Stock Exchange on 26 November 2010. At the same time, the Company on behalf of its founding shareholders also listed the entire 13,270,000,000 founder shares, which resulted in the entire 17,693,000,000 of the Company's shares being listed on the Indonesia Stock Exchange.

c. Group structure

As at 31 December 2016 and 2015, the structure of the Group was as follows:

Entitas anak/ Subsidiaries	Aktivitas bisnis/ Business Activity	Lokasi usaha/ Location	Tahun operasi komersial/ year of commercial operation	Percentase kepemilikan (%)/ Percentage of ownership (%)		Total asset sebelum eliminasi (dalam ribuan AS\$)/ Total assets before elimination (in thousands of US\$)	
				31 Desember/ December 2016	31 Desember/ December 2015	31 Desember/ December 2016	31 Desember/ December 2015
<u>Entitas anak melalui kepemilikan langsung/Directly owned subsidiaries</u>							
PT Asmin Koalindo Tuhup ("AKT")	Pertambangan batu bara/ Coal mining	Kalimantan Tengah/ Central Kalimantan	2009	99,99	99,99	943,393	943,393
PT Borneo Mining Services ("BMS")	Penyewaan Alat berat/ Heavy Equipment Rental	Kalimantan Tengah/ Central Kalimantan	2009	99,99	99,99	156,941	156,941
Borneo Bumi Energy & Metal Pte Ltd ("Borneo Bumi")	Investasi/ investment	Singapura/ Singapore	2011	100,00	100,00	-	-

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/4 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

AKT

AKT, sebelumnya PT Swabara Guna, didirikan pada tanggal 11 September 1992 berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 Tahun 1968, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 dan berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, S.H., notaris di Jakarta, No. 52 tanggal 11 September 1992. Akta pendirian AKT disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-4105.HT.01.01.TH.93 tanggal 3 Juni 1993, dan telah diterbitkan dalam Tambahan No. 4418 Berita Acara Negara Republik Indonesia No. 76 pada tanggal 21 September 1993. Perubahan nama menjadi AKT terjadi pada tanggal 25 Februari 1998.

Anggaran Dasar AKT telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir kali berdasarkan Akta Notaris No.1 tanggal 4 Januari 2013, yang dibuat di hadapan Notaris Dini Lastari Siburian, S.H., notaris di Jakarta, untuk merubah pasal 14 mengenai kewenangan Direksi. Akta ini telah dilaporkan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan No. AHU-AH.01.10-01437 tanggal 22 Januari 2013.

AKT berusaha di bidang pertambangan batubara, dan mulai periode operasinya pada tanggal 15 September 2009 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ("Menteri ESDM") No. 375/K.30/DJB tertanggal 15 September 2009. Lokasi operasi dimulai dan difokuskan pada blok Kohong.

Kantor pusat AKT berlokasi di Menara Merdeka lantai 29, Jl. Budi Kemuliaan I No. 2, Jakarta 10110, Indonesia.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

AKT

AKT, formerly PT Swabara Guna, was established on 11 September 1992 under the framework of Domestic Capital Investment Law No. 6 of 1968, as amended by Law No. 12 of 1970 and by Notarial Deed No. 52 of Sutjipto, S.H., notary in Jakarta, dated 11 September 1992. AKT's Articles of Association were approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia via Decree No. C2-4105.HT.01.01.TH.93, dated 3 June 1993, and published in Supplement No. 4418 of State Gazette of the Republic of Indonesia No. 76 on 21 September 1993. AKT changed to its current name on 25 February 1998.

The Articles of Association of AKT have been amended several times with the most recent change based on Notarial Deed No. 1 dated 4 January 2013, drawn up before Dini Lastari Siburian, S.H., notary in Jakarta, for the purpose of amending Article 14 regarding Director's authority. This amendment has been reported to the Minister of Law and Human Rights via Decree No. AHU-AH.01.10-01437 dated 22 January 2013.

AKT is engaged in the coal mining sector, and commenced its operating period on 15 September 2009 by virtue of Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources ("MoEMR") No. 375/K.30/DJB dated 15 September 2009. Initial production comes from, and is focused on the Kohong block.

AKT registered office is located at Menara Merdeka 29th floor, Jl. Budi Kemuliaan I No. 2, Jakarta 10110, Indonesia.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

BMS

BMS didirikan pada tanggal 4 Agustus 2006 berdasarkan Akta Notaris Poerbaningsih Adi Warsito, S.H. No. 03. Anggaran Dasar BMS disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-24799.HT.01.01.TH.2006 tanggal 24 Agustus 2006 dan diterbitkan dalam Tambahan No. 45 dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7735 tanggal 3 Juni 2008. Akta pendirian BMS telah mengalami beberapa kali perubahan untuk disesuaikan dengan Undang-undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, perubahan susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham. Perubahan terakhir Anggaran Dasar dilakukan berdasarkan Akta No. 19 tanggal 14 Mei 2008 dibuat di hadapan Muchlis Pathanha, S.H., notaris di Jakarta. Akta ini mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU 33475.AH.01.02.TH. 2008 tanggal 16 Juni 2008.

BMS bergerak dalam bidang jasa pertambangan batubara termasuk sewa alat berat, jasa manajemen pertambangan dan jasa-jasa pertambangan lainnya. BMS memulai operasi komersialnya di bulan Januari 2009.

Kantor BMS berlokasi di Menara Merdeka lantai 29, Jl. Budi Kemuliaan I No. 2, Jakarta 10110, Indonesia.

d. Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara ("PKP2B")

Pada tanggal 31 Mei 1999, AKT dan Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah") menandatangani PKP2B generasi ketiga. Berdasarkan ketentuan PKP2B tersebut, AKT bertindak sebagai kontraktor Pemerintah, dan bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan pertambangan di area yang berlokasi di Kecamatan Murung Raya, Kabupaten Muara Teweh, Kalimantan Tengah, Indonesia. Area yang dicakup PKP2B tersebut pada awalnya seluas 40.610 hektar namun telah dikurangi menjadi 21.630 hektar akibat dari pelepasan area sebagaimana diatur dalam ketentuan PKP2B yang dimaksud.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri ESDM No. 375/K.30/DJB, AKT memulai periode operasi 30 tahunnya sejak 15 September 2009 dengan dimulainya produksi pada blok Kohong.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

BMS

BMS was incorporated on 4 August 2006 based on Notarial Deed No. 03 of Poerbaningsih Adi Warsito, S.H. The Articles of Association of BMS were approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia via Decree No. C-24799.HT.01.01.TH.2006 dated 24 August 2006, and published in Supplement No. 45 of State Gazette of the Republic of Indonesia No. 7735 dated 3 June 2008. The Articles of Association of BMS have been amended several times to conform with Law No. 40/2007 regarding Limited Liability Companies, changes in the composition of the Board of Directors, Board of Commissioners and Shareholders. The last amendment to the Articles of Association was effected by Notarial Deed No. 19 dated 14 May 2008, drawn up before Muchlis Pathanha, S.H., notary in Jakarta. This deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia via Decree No. AHU-33475.AH.01.02.TH.2008 dated 16 June 2008.

BMS is engaged in providing coal mining services, including heavy equipment rental, mine management services and other related mining services. BMS commenced its commercial operations in January 2009.

BMS registered office is located at Menara Merdeka 29th floor, Jl. Budi Kemuliaan I No. 2, Jakarta 10110, Indonesia.

d. Coal Contract of Work ("CCoW")

On 31 May 1999, AKT entered into a third generation CCoW with the Government of the Republic of Indonesia (the "Government"). Under the terms of the CCoW, AKT is appointed as the contractor of the Government, in respect of coal exploration and mining in an area located in Murung Raya, Muara Teweh Regency, Central Kalimantan, Indonesia. The area covered by AKT's CCoW initially comprised 40,610 hectares, but this has been reduced to 21,630 hectares pursuant to the relinquishment requirements under the CCoW.

By virtue of Decree of the MoEMR No. 375/K.30/DJB, AKT commenced its 30-year operating period on 15 September 2009 with initial coal production in the Kohong block.

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/6 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

Sebagaimana diatur dalam PKP2B yang bersangkutan, Pemerintah berhak atas 13,5% dari batubara yang diproduksi. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 75/1996 tanggal 25 September 1996, AKT diharuskan untuk menyerahkan bagian 13,5% atas hak Pemerintah (biasanya disebut sebagai "royalti kepada Pemerintah") dalam bentuk tunai.

AKT membukukan 100% pendapatan yang diperoleh dari penjualan batubara, dan mencatat royalti yang dibayarkan kepada Pemerintah sebagai bagian dari beban pokok penjualan.

Pemerintah tetap berkeras agar AKT CCoW/ PKP2B harus diubah agar sesuai dengan UU Pertambangan tahun 2009 dan prosesnya terus berlanjut. AKT telah menandatangani beberapa klausul revisi dan menunggu kata-kata definitif sebelum membahas amandemen lain yang disarankan (perpajakan/ pendapatan pemerintah, dan divestasi).

Reklamasi

AKT telah menempatkan bank garansi sejak tahun 2012 untuk menjamin jumlah dana Reklamasi yang dibutuhkan (sesuai perhitungan ESDM). Berdasarkan reklamasi tahunan AKT, berbagai jumlah telah dihitung kembali sehingga jumlah total jaminan bank saat ini setara dengan jumlah saldo reklamasi saat ini yang harus ditutup sekitar Rp23.381.431.985 (setara dengan AS\$1.725.822).

Kewajiban Pasar Dalam Negeri

Kewajiban Pasar Domestik ("DMO") tercantum di dalam CCoW/PKP2B dan perhitungannya didasarkan pada persyaratan penggunaan batubara yang dibutuhkan oleh entitas Indonesia, yang dibagi dengan perkiraan jumlah produksi batubara oleh Indonesia, untuk mencapai persentase berdasarkan target produksi yang disetujui oleh ESDM untuk setiap produsen batubara, terlepas dari kualitas atau jenis batubaranya. Hal ini mengakibatkan anomali karena berbagai jenis batubara (termasuk batubara kokas keras AKT) hanya memiliki sedikit atau tidak ada pengguna/pembeli lokal.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

As stipulated in the CCoW, the Government is entitled to receive 13.5% of the total coal produced from the final point of production processes established by AKT. In accordance with Presidential Decree No. 75/1996 dated 25 September 1996, AKT is required to deliver the 13.5% Government share of production (commonly referred to as "royalty to Government") in advanced.

AKT records 100% of its revenue generated from coal sales, and records the royalty to Government as a component of its cost of goods sold.

The Government still insists that the AKT CCoW/PKP2B must be amended to accord with the Mining Law of 2009 and that process is ongoing. AKT has signed off on several of the revision clauses and awaits definitive wording before discussing the other suggested amendments (taxation/Government revenue, and divestment).

Reclamation

AKT has had in place since 2012 bank guarantees for the required amounts of Reclamation funds (as calculated by ESDM). Based on AKT's annual reclamation works, various amounts have been clawed back such that the current total of the bank guarantees equates to the currently outstanding reclamation amounts due to be covered some Rp23,381,431,985 (equivalent to US\$1,725,822).

The Domestic Market Obligation

The Domestic Market Obligation ("DMO") is enshrined in the CCoW/PKP2B and the calculation is based on the expected usage requirements of coal by Indonesian entities, divided by the anticipated total production of coal by Indonesia, to arrive at a percentage which is then ascribed to each coal producer based on the ESDM approved production target, regardless of quality or type of coal. This results in anomalies as various types of coal (including AKT's hard coking coal) have few or no local users/buyers.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup, yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian ini juga disusun berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. VIII.G.7 mengenai Pedoman Penyajian Laporan Keuangan. Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap semua tahun yang disajikan, kecuali dinyatakan lain.

a. Kelangsungan usaha

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun atas dasar kelangsungan usaha yang mengasumsikan bahwa Grup dapat merealisasikan aset dan memenuhi liabilitasnya ketika jatuh tempo melalui kegiatan usaha normal di masa mendatang.

Pada tanggal 31 Desember 2016, Grup mengalami defisiensi ekuitas sebesar AS\$589 juta. Pada tanggal 31 Desember 2016, Grup memiliki kas dan setara kas yang tidak dibatasi penggunaannya sebesar AS\$4.654.168.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Perusahaan melanggar semua ketentuan finansial perjanjian pinjamannya dengan Standard Chartered Bank antara lain ketentuan untuk menjaga nilai kekayaan bersih berwujud minimumnya sebesar AS\$800 juta (Catatan 17a). Nilai kekayaan bersih berwujud Grup pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 berada dibawah batas minimum tersebut terutama sebagai akibat dari rugi operasi AKT pada periode sebelumnya dan persyaratan tertentu dan restrukturisasi pinjaman 31 Desember 2016, Grup mencatat seluruh pinjaman kepada SCB sebagai liabilitas jangka pendek dan karenanya liabilitas jangka pendek melebihi aset lancar sebesar AS\$595 juta.

Grup berkeyakinan akan mampu mendanai kebutuhan modal kerja sepanjang tahun 2016 dan beroperasi dalam jangka panjang melalui rencana-rencana berikut:

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Presented below are the significant accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements of the Group, which are in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards. The consolidated financial statements have also been prepared in conformity with regulations of the Financial Services Authority ("OJK") No. VIII.G.7 for the Guidance on Financial Statement Presentation. These policies have been consistently applied to all of the years presented, unless otherwise stated.

a. Going concern

The consolidated financial statements have been prepared on a going concern basis, which assumes that the Group will be able to realise its assets and discharge its liabilities in the normal course of business as they come due into the foreseeable future.

As of December 31, 2016, the Group had a deficiency in equity of US\$589 million. As at 31 December 2016, the Group had unrestricted cash and cash equivalents of US\$4,654,168.

As at 31 December 2016 and 2015, the Company had breached its financial covenants with Standard Chartered Bank, among others the requirement to maintain its minimum tangible net worth at not less than US\$800 million (Note 17a). The Group's tangible net worth position as at 31 December 2016 and 2015 stood below the covenant minimum level primarily as a result of the operational loss of AKT, and recording prior losses from its former investment in jointly controlled entities. As the breach of the borrowing covenants was not rectified nor the restructuring of the loan agreement completed as at 31 December 2016, the Group recorded all of its borrowings from SCB as current liabilities, hence current liabilities exceeded current assets by US\$595 million.

The Group is confident that it will be able to fund its working capital requirements throughout 2016 and operate in the long-term through the following plans:

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/8 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2016 AND 2015
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

- memperoleh kembali marjin profitabilitas Grup dengan terus fokus pada pengiriman *coking coal* berkualitas tinggi, mengurangi biaya produksi AKT, diantaranya melalui pengelolaan yang cermat atas rasio pengupasan lapisan tanah, jarak hauling, serta meningkatkan efisiensi dan tingkat pemanfaatan alat;
- restukturisasi atas hutang kreditur berdasarkan proses PKPU AKT;
- penangguhan secara hati-hati untuk beberapa belanja modal yang telah direncanakan sebelumnya dan pemanfaatan sewa guna usaha dan/atau pembiayaan pemasok untuk mempertahankan cadangan kas;
- melakukan penjualan aset tetap yang tidak produktif untuk penambahan modal kerja.

Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak termasuk penyesuaian yang akan terjadi jika Grup tidak dapat melanjutkan kelangsungan usahanya (Catatan 2a).

b. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun berdasarkan konsep harga perolehan, kecuali instrumen keuangan tertentu, yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, serta menggunakan dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan penyusunan laporan arus kas konsolidasian, kas dan setara kas mencakup kas, kas di bank, dan deposito dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang, setelah dikurangi cerukan.

Kas merupakan alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan usaha Grup.

Setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang telah diketahui tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

- regaining the Group profitability margins by continuing to focus on the delivery of a high quality coking coal product, reducing AKT's production costs, among others through careful management of the strip ratio, haul distances and improving efficiencies and utilisation rates;
- restructuring creditors pursuant to AKT's PKPU process;
- prudent deferral of much of the capital expenditure previously planned and utilisation of leasing and/or vendor financing to preserve cash reserves;
- sale of non-productive fixed assets to generate additional working capital funding.

The Group's consolidated financial statements do not include any adjustments that may result if the Group was unable to continue as a going concern (Note 2a).

b. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements have been prepared under the historical cost convention, except for certain financial instruments, at fair value through profit or loss, and using the accrual basis except for the consolidated statements of cash flows.

The consolidated statements of cash flows is prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing, and financing activities. For the purpose of the consolidated statements of cash flows, cash and cash equivalents includes cash on hand, cash in banks and deposits with a maturity of three months or less, net of overdrafts.

Cash represents available and eligible payment instruments to finance the Group's business.

Cash equivalents represent very liquid investments, short-term and quickly convertible to cash at a predetermined amount without any risk of significant value change.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

Kas dan setara kas yang telah ditentukan penggunaannya atau yang tidak dapat digunakan secara bebas tidak tergolong dalam kas dan setara kas.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini disajikan dalam Dolar Amerika Serikat ("Dolar AS" atau "AS\$"), kecuali dinyatakan lain.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik atas kinerja keuangan Grup, karena sifat dan jumlahnya yang signifikan, beberapa unsur pendapatan dan beban telah disajikan secara terpisah.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi penting tertentu. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau kompleks atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 3.

Perubahan pada PSAK dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")

Standar baru, revisi dan interpretasi yang telah diterbitkan, dan yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017 namun tidak berdampak material terhadap laporan keuangan Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 1 (Revisi 2015) "Penyajian Laporan Keuangan"
- ISAK 31 "Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13 "Properti Investasi"
- ISAK 32 "Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan"
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 3 "Laporan Keuangan Interim"
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 24 "Imbalan Kerja"
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 58 "Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan"
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 60 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak terhadap jumlah yang dilaporkan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Cash and cash equivalents which have been restricted for a certain purpose or which cannot be used freely are not defined as cash and cash equivalents.

Figures in the consolidated financial statements are stated in United States Dollars ("US Dollars" or "US\$"), unless otherwise stated.

In order to provide further understanding of the financial performance of the Group, due to the significance of their nature or amount, several items of income or expense have been shown separately.

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 3.

Changes to SFAS and Interpretations of Financial Accounting Standards ("ISFAS")

New standards, amendments and interpretations issued and effective for the financial year beginning 1 January 2017, which do not have a material impact on the financial statements of the Company, are as follows:

- The amendments to SFAS 1 (Revised 2015) "Presentation of Financial Statements"
- ISFAS 31 "Interpretation of SFAS 13 investment Property"
- SFAS 32 "Definition and Hierarchy of Financial Accounting Standards"
- Annual improvement on SFAS 3 interim Financial Statements"
- Annual improvement on SFAS 24 "Employee Benefits"
- Annual improvement on SFAS 58 "Non-Current Assets which Held for Sale and Discontinued Operation"
- Annual improvement on SFAS 60 "Financial Instruments: Disclosure"

The implementation of the above standards do not result in any changes to the Company's accounting policies and had no effect on the amounts reported for current year or prior financial years.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

Standar baru dan revisi yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif pada tahun berjalan adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 2 "Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan"
- Amandemen PSAK 13 "Properti Investasi - Pengalihan Properti Investasi"
- Amandemen PSAK 15 "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- Amandemen PSAK 16 (Revisi 2015) "Aset Tetap"
- Amandemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi"
- Amandemen PSAK 53 "Pembayaran Berbasis Saham Klasifikasi dan Pengukuran Transaksi Pembayaran Berbasis Saham"
- Amandemen PSAK 62 "Penerapan PSAK 71 ke PSAK 62"
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 67 (Revisi 2017) "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain"
- ISAK 33 "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan Dimuka"
- PSAK 69 "Agrikultur"
- PSAK 71 "Instrumen Keuangan"
- PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"
- PSAK 73 "Sewa"

ISAK 33 baru berlaku efektif pada tahun buku dimulai atau setelah 1 Januari 2019 dan PSAK 71 "Instrumen Keuangan", PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" dan Amandemen PSAK 62 "Penerapan PSAK 71 ke PSAK 62" baru berlaku efektif pada 1 Januari 2020, sedangkan standar lain berlaku efektif pada 1 Januari 2018.

Pada saat tanggal penerbitan laporan keuangan ini, manajemen sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Perusahaan.

ISAK 29, "Biaya Pengupasan Lapisan Tanah Tahap Produksi pada Pertambangan Terbuka".

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

New standards and amendments issued but not yet effective for the years are as follows:

- The amendments to SFAS 2 "Statements of Cash Flows about Disclosure Initiative"
- The amendments to SFAS 13 "investment Property - Transfer of Investment Property"
- The amendments to SFAS 15 "investments in Associates and Joint Ventures"
- The amendments to SFAS 16 (Revised 2015) "Property, Plant and Equipment"
- The amendments to SFAS 46 "income Tax about Deferred Tax Assets Recognition for Unrealized Loss"
- The amendments to SFAS 53 "Shared-based Payment-Classification and Measurement of Share-based Payment Transactions"
- The amendments to SFAS 62 "Applying SFAS 71 to SFAS 62"
- Annual improvement on SFAS 67 (Revised 2017) "Disclosures of Interests in Other Entities"
- SFAS 33 "Foreign Currency Transactions and Advance Consideration"
- SFAS 69 "Agriculture"
- SFAS 71 "Financial Instruments"
- SFAS 72 "Revenue from Contracts with Customers"
- SFAS 73 "Leases"

SFAS 33 is effective for the financial year beginning on or after 1 January 2019 and SFAS 71 "Financial Instruments", SFAS 72 "Revenue from Contracts with Customers" and SFAS 62 "Applying SFAS 71 to SFAS 62" are effective on 1 January 2020, while other standards are effective from 1 January 2018.

As at the authorization date of these financial statements, the management is evaluating the potential impact of these new and revised standards to the financial statements of the Company.

SFAS 29, "Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine"

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

Interpretasi ini mengharuskan perusahaan untuk mengakui aset aktivitas pengupasan lapisan tanah, jika dan hanya jika, seluruh kriteria berikut terpenuhi:

1. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa depan (peningkatan akses menuju badan bijih (*ore body*)) yang terkait dengan aktivitas pengupasan lapisan tanah akan mengalir kepada entitas;
2. entitas dapat mengidentifikasi komponen badan bijih yang aksesnya telah ditingkatkan; dan
3. biaya yang terkait dengan aktivitas pengupasan lapisan tanah dengan komponen tersebut dapat diukur secara andal.

Karena itu, interpretasi ini mengharuskan entitas pertambangan untuk menghapus aset aktivitas pengupasan lapisan tanah yang ada ke saldo laba awal jika aset tersebut tidak dapat dikaitkan dengan komponen badan bijih yang teridentifikasi. Interpretasi tersebut juga mungkin mangharuskan entitas yang saat ini mengalokasikan biaya pengupasan lapisan tanah mereka sebagai biaya produksi untuk meninjau kembali pendekatan mereka dan mengkapitalisasi sebagian dari biaya mereka.

Group telah mengadopsi interpretasi ini dan manajemen berpendapat bahwa interpretasi ini tidak berdampak material terhadap posisi dan kinerja keuangan.

c. Konsolidasi

(i) Entitas anak

Entitas anak adalah seluruh entitas (termasuk entitas bertujuan khusus) dimana Grup memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional atasnya, biasanya melalui kepemilikan lebih dari setengah hak suara. Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial yang saat ini dapat dilaksanakan atau dikonversi, dipertimbangkan ketika menilai apakah Grup mengendalikan entitas lain. Grup juga menilai keberadaan pengendalian ketika Grup tidak memiliki lebih dari 50% hak suara namun dapat mengatur kebijakan keuangan dan operasional secara de-facto. Pengendalian de-facto dapat timbul ketika jumlah hak suara yang dimiliki Grup, secara relatif terhadap jumlah dan penyebaran kepemilikan hak suara pemegang saham lain memberikan Grup kemampuan untuk mengendalikan kebijakan keuangan dan operasional, serta kebijakan lainnya.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

The interpretation requires entities to recognise a stripping activity asset if, and only if, all of the following are met:

1. *it is probable that the future economic benefit (improved access to the ore body) associated with the stripping activity will flow to the entity;*
2. *the entity can identify the component of the ore body for which access has been improved; and*
3. *the costs relating to the stripping activity associated with that component can be measured reliably.*

As such, the interpretation requires mining entities to write off existing stripping assets to opening retained earnings if the assets cannot be attributed to an identifiable component of the ore body. The interpretation may also require entities that presently allocate their stripping costs as a production cost to revisit their approach and capitalise a portion of their costs.

The Group has adopted this interpretation and management believes it will not have a material impact on the Group's financial position and performance.

c. Consolidation

(i) Subsidiaries

Subsidiaries are all entities (including special purpose entities) over which the Group has the power to govern the financial and operating policies, generally accompanying a shareholding of more than one half of the voting rights. The existence and effect of potential voting rights that are currently exercisable or convertible are considered when assessing whether the Group controls another entity. The Group also assesses existence of control where it does not have more than 50% of the voting power but is able to govern the financial and operating policies by virtue of de-facto control. De-facto control may arise in circumstances where the size of the Group's voting rights relative to the size and dispersion of holdings of other shareholders give the Group the power to govern the financial and operating policies, etc.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

Entitas anak dikonsolidasikan secara penuh sejak tanggal di mana pengendalian dialihkan kepada Grup. Entitas anak tidak dikonsolidasikan lagi sejak tanggal Grup kehilangan pengendalian.

Grup menerapkan metode akuisisi untuk mencatat kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk akuisisi suatu entitas anak adalah sebesar nilai wajar asset yang dialihkan, liabilitas yang diakui terhadap pemilik pihak yang diakusisi sebelumnya dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup. Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar asset atau liabilitas yang timbul dari kesepakatan imbalan kontinjenji. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas serta liabilitas kontinjenji yang diambil alih dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Grup mengakui kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi baik sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan nonpengendali atas aset bersih pihak yang diakuisisi. Kepentingan nonpengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Biaya yang terkait dengan akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

Jika kombinasi bisnis diperoleh secara bertahap, nilai wajar pada tanggal akuisisi dari kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi diukur kembali ke nilai wajar tanggal akuisisi melalui laporan laba rugi.

Imbalan kontinjenji yang masih harus dialihkan oleh Grup diakui sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan selanjutnya atas nilai wajar imbalan kontinjenji yang diakui sebagai asset atau liabilitas dan dicatat sesuai dengan PSAK 55 (revisi 2011), dalam laporan laba rugi. Imbalan kontinjenji yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

Subsidiaries are fully consolidated from the date on which control is transferred to the Group. They are de-consolidated from the date on which that control ceases.

The Group applies the acquisition method to account for business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities incurred to the former owners of the acquiree and the equity interests issued by the Group. The consideration transferred includes the fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration arrangement. Identifiable assets acquired and liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair values at the acquisition date.

The Group recognises any non-controlling interest in the acquiree on an acquisition-by-acquisition basis, either at fair value or at the non-controlling interest's proportionate share of the acquiree's net assets. Non-controlling interest is reported as equity in the consolidated statement of financial position, separate from the owner of the parent's equity.

Acquisition-related costs are expensed as incurred.

If the business combination is achieved in stages, the acquisition date fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree is re-measured to fair value at the acquisition date through profit or loss.

Any contingent consideration to be transferred by the Group is recognised at fair value at the acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration that is deemed to be an asset or liability is recognised in accordance with SFAS 55 (revised 2011) in profit or loss. Contingent consideration that is classified as equity is not re-measured, and its subsequent settlement is accounted for within equity.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

Selisih lebih dari jumlah imbalan yang dialihkan dengan nilai wajar jumlah kepentingan nonpengendali atas jumlah aset bersih dan liabilitas teridentifikasi yang diakuisisi dicatat sebagai *goodwill*.

Jika jumlah ini lebih rendah dari nilai wajar aset bersih entitas yang diakuisisi dalam kasus pembelian dengan diskon, selisihnya diakui langsung dalam laporan laba rugi.

Transaksi, saldo dan keuntungan antar entitas Grup yang belum direalisasi telah dieliminasi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi. Kebijakan akuntansi entitas anak diubah jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan akuntansi yang diadopsi Grup.

(ii) Transaksi dengan kepentingan nonpengendali

Grup memperlakukan transaksi dengan kepentingan nonpengendali sebagai transaksi dengan pemilik ekuitas Grup. Untuk pembelian dari kepentingan nonpengendali, selisih antara imbalan yang dibayar dan bagian yang diakuisisi atas nilai tercatat aset bersih entitas anak dicatat pada ekuitas. Keuntungan atau kerugian pelepasan kepentingan nonpengendali juga dicatat pada ekuitas.

(iii) Pelepasan entitas anak

Ketika Grup tidak lagi memiliki pengendalian atau pengaruh signifikan, kepentingan yang masih tersisa atas entitas diukur kembali berdasarkan nilai wajarnya, dan perubahan nilai tercatat diakui dalam laporan laba rugi. Nilai wajar adalah nilai tercatat awal untuk kepentingan pengukuran kembali kepentingan yang tersisa sebagai entitas asosiasi, ventura bersama atau aset keuangan. Di samping itu, jumlah yang sebelumnya diakui pada laba komprehensif lainnya sehubungan dengan entitas tersebut dicatat seolah-olah Grup telah melepas aset atau liabilitas terkait. Hal ini dapat berarti bahwa jumlah yang sebelumnya diakui pada laba komprehensif lainnya direklasifikasi ke laporan laba rugi.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Goodwill is initially measured as the excess of the aggregate of the consideration transferred, and the fair value of non-controlling interest over the net identifiable assets acquired and liabilities assumed.

If this consideration is lower than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognised directly in the profit or loss.

Inter-company transactions, balances and unrealised gains on transactions between Group companies are eliminated. Unrealised losses are also eliminated. Accounting policies of subsidiaries have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

(ii) Transactions with non-controlling interests

The Group treats transactions with non-controlling interests as transactions with equity owners of the Group. For purchases from non-controlling interests, the difference between any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying value of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to non-controlling interests are also recorded in equity.

(iii) Disposal of subsidiaries

When the Group ceases to have control or significant influence, any retained interest in the entity is re-measured to its fair value, with the change in carrying amount recognised in the profit or loss. The fair value is the initial carrying amount for the purposes of subsequently accounting for the retained interest as an associate, joint venture or financial asset. In addition, any amounts previously recognised in other comprehensive income in respect of that entity are accounted for as if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities. This may mean that amounts previously recognised in other comprehensive income are reclassified to profit or loss.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

(iv) Pengendalian bersama entitas

Pengendalian bersama adalah perjanjian kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu aktivitas ekonomi, dan ada hanya ketika keputusan keuangan dan operasional strategis terkait dengan aktivitas tersebut mensyaratkan konsensus dari seluruh pihak-pihak yang berbagi pengendalian.

Karakteristik umum seluruh ventura bersama adalah sebagai berikut:

- (a) dua atau lebih *venturer* terikat oleh suatu perjanjian kontraktual; dan
- (b) perjanjian kontraktual tersebut membentuk pengendalian bersama.

Perjanjian kontraktual dapat dibuktikan dalam beberapa cara, misalnya melalui suatu kontrak antara para *venturer* atau notulen rapat antara para *venturer*. Dalam beberapa kasus, perjanjian tersebut dimasukkan dalam akta atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari ventura bersama. Apapun bentuknya, perjanjian kontraktual biasanya tertulis dan berkaitan dengan masalah-masalah seperti:

- (a) aktivitas, jangka waktu dan kewajiban pelaporan dari ventura bersama;
- (b) penetapan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris atau organisasi setara dari ventura bersama dan hak suara *venturer*;
- (c) kontribusi modal oleh *venturer*, dan
- (d) pembagian oleh *venturer* atas *output*, penghasilan, beban atau hasil dari ventura bersama.

Pengendalian bersama entitas memiliki karakteristik berikut:

- (a) Pengendalian bersama entitas adalah ventura bersama yang melibatkan pendirian suatu perseroan terbatas, persekutuan atau entitas lainnya yang mana setiap *venturer* mempunyai bagian partisipasi. Entitas tersebut beroperasi dalam cara yang sama seperti entitas lainnya, kecuali adanya perjanjian kontraktual antar *venturer* yang menciptakan pengendalian bersama atas aktivitas ekonomi entitas;

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

(iv) Jointly controlled entities

Joint control is the contractually agreed sharing of control over an economic activity by an arrangement, which exists only when strategic financial and operational decisions related with those activities require the unanimous consent of the parties sharing control.

The following characteristics are common to all joint ventures:

- (a) *two or more venturers are bound by a contractual arrangement; and*
- (b) *the contractual arrangement establishes joint control.*

The contractual arrangement may be evidenced in a number of ways, for example by a contract between the venturers or minutes of discussions between the venturers. In some cases, the arrangement is incorporated in the articles or other by-laws of the joint venture. Whatever its form, the contractual arrangement is usually in writing and deals with such matters as:

- (a) *the activity, duration and reporting obligations of the joint venture;*
- (b) *the appointment of the Board of Directors and Board of Commissioners or equivalent governing body of the joint venture and the voting rights of the venturers;*
- (c) *capital contributions by the venturers; and*
- (d) *the sharing by the venturers of the output, income, expenses or results of the joint venture.*

Jointly controlled entities have the following characteristics:

- (a) *A jointly controlled entity is a joint venture that involves the establishment of a corporation, partnership or other entity in which each venturer has an interest. The entity operates in the same way as other entities, except that a contractual arrangement between the venturers establishes joint control over the economic activity of the entity;*

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

- (b) Pengendalian bersama entitas mengendalikan aset ventura bersama, menanggung liabilitas dan beban, dan memperoleh penghasilan. Entitas tersebut dapat mengadakan kontrak atas nama sendiri dan memperoleh pembiayaan untuk tujuan aktivitas ventura bersama. Setiap *venturer* berhak atas bagian laba dari pengendalian bersama entitas, meskipun beberapa pengendalian bersama entitas juga meliputi pembagian *output* ventura bersama; dan
- (c) Pengendalian bersama entitas melakukan catatan akuntansi sendiri serta menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan cara yang sama seperti entitas lainnya.

Grup mencatat partisipasinya dalam pengendalian bersama entitas menggunakan metode ekuitas. Dalam metode akuntansi ekuitas, investasi pada ventura bersama pada awalnya diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk mengakui bagian Grup atas laba atau rugi setelah akuisisi dan mutasi pada laba komprehensif lainnya masing-masing pada laporan laba rugi dan laba komprehensif lainnya.

Keuntungan yang belum terealisasi dari transaksi antara Grup dan ventura bersama dieliminasi sebesar bagian Grup pada ventura bersama. Kerugian yang belum terealisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut membuktikan adanya penurunan nilai dari aset yang ditransfer.

Goodwill yang timbul dari akuisisi partisipasi Grup dalam suatu pengendalian bersama entitas dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup untuk *goodwill* yang timbul dari akuisisi entitas anak.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

- (b) A jointly controlled entity controls the assets of the joint venture, incurs liabilities and expenses and earns income. It may enter into contracts in its own name and raise finance for the purposes of the joint venture activity. Each venturer is entitled to a share of the profits of the jointly controlled entity, although some jointly controlled entities also involve a sharing of the output of the joint venture; and
- (c) A jointly controlled entity maintains its own accounting records and prepares and presents financial statements in the same way as other entities.

The Group reports its interest in jointly controlled entities using equity method. Under the equity method of accounting, interests in joint ventures are initially recognised in the consolidated statement of financial position at cost and adjusted thereafter to recognise the Group's share of the post-acquisition profits or losses and movements in other comprehensive income in the profit or loss and in other comprehensive income, respectively.

Unrealised gains on transactions between the Group and its joint ventures are eliminated to the extent of the Group's interest in the joint ventures. Unrealised losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the asset transferred.

Any goodwill arising on the acquisition of the Group's interest in a jointly controlled entity is accounted for in accordance with the Group's accounting policy for goodwill arising on the acquisition of a subsidiary.

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/16 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

d. Penjabaran mata uang asing

(i) Mata uang fungsional dan penyajian

Akun-akun yang disertakan dalam laporan keuangan setiap entitas anggota Grup diukur menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi ("mata uang fungsional"). Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Dolar AS yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Grup.

(ii) Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang selain Dolar AS dijabarkan menjadi mata uang Dolar AS menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain Dolar AS dijabarkan menjadi Dolar AS dengan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut.

Kurs yang digunakan pada tanggal pelaporan, berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia adalah sebagai berikut (nilai penuh):

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Foreign currency translation

(i) Functional and presentation currency

Items included in the financial statements of each of the entities within the Group are measured using the currency of the primary economic environment in which the entity operates (the "functional currency"). The consolidated financial statements are presented in US Dollars, which is the functional and presentation currency of the Group.

(ii) Transactions and balances

Transactions denominated in currencies other than US Dollars are translated into US Dollars at the exchange rate prevailing at the date of the transaction. At each reporting date, monetary assets and liabilities in currencies other than US Dollars are translated into US Dollars at the exchange rate prevailing at that date.

As at the reporting date, the exchange rates used, based on middle rates published by Bank of Indonesia were as follows (full amount):

	2016	2015
Rupiah Indonesia setara 1 Dolar AS	13,436	13,795
Euro setara dengan 1 Dolar AS	1.054	0,915
Dolar Australia setara dengan 1 Dolar AS	0.724	1,371
Dolar Singapura setara dengan 1 Dolar AS	0.692	1,415
Pound Sterling Inggris setara dengan 1 Dolar AS	1.229	0,675

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang berhubungan dengan pinjaman, serta kas dan setara kas disajikan pada laporan laba rugi sebagai "penghasilan atau biaya keuangan". Keuntungan atau kerugian neto selisih kurs lainnya disajikan pada laporan laba rugi sebagai "beban lain-lain, bersih".

*Indonesian Rupiah equivalent to
1 US Dollar
Euro equivalent to
1 US Dollar
Australian Dollar equivalent to
1 US Dollar
Singapore Dollar equivalent to
1 US Dollar
Great Britain Pound
Sterling equivalent to
1 US Dollar*

Foreign exchange gains and losses that relate to borrowings and cash and cash equivalents are presented in the profit or loss within "finance income or costs". All other net foreign exchange gains and losses are presented in the profit or loss within "other expenses, net".

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

e. Aset keuangan

I. Klasifikasi

Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam kategori berikut ini: (i) pinjaman dan piutang dan (ii) tersedia untuk dijual.

Klasifikasi ini tergantung tujuan perolehan aset keuangan. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan pada saat awal pengakuan.

(i) Pinjaman dan piutang

Pinjaman dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran yang tetap atau dapat ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Pinjaman dan piutang dimasukkan sebagai aset lancar, kecuali jika jatuh temponya melebihi 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Aset ini dikategorikan sebagai aset tidak lancar.

Pinjaman dan piutang Grup terdiri dari "kas dan setara kas, kas di bank yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, uang jaminan, piutang dari pihak berelasi dan pinjaman kepada pihak berelasi" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

(ii) Aset keuangan tersedia untuk dijual

Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah instrumen non-derivatif yang ditentukan pada kategori ini atau tidak diklasifikasikan pada kategori yang lain. Aset keuangan tersedia untuk dijual dimasukkan sebagai aset tidak lancar kecuali investasinya jatuh tempo atau manajemen bermaksud melepasnya dalam kurun waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

e. Financial assets

I. Classification

The Group classifies its financial assets in the following categories: (i) loans and receivables and (ii) available-for-sale.

The classification depends on the purpose for which the financial assets were acquired. Management determines the classification of its financial assets at initial recognition.

(i) Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active markets. Loans and receivables are included in current assets, except for maturities of more than 12 months after the end of reporting period. These are classified as non-current assets.

The Group's loans and receivables comprise "cash and cash equivalents, restricted cash in banks, trade receivables, refundable deposits, Amounts due from related party and loans to related parties" in the consolidated statements of financial position.

(ii) Available-for-sale financial assets

Available-for-sale financial assets are non-derivative instruments that are either designated in this category or not classified in any of the other categories. They are included in non-current assets unless the investment matures or management intends to dispose of it within 12 months of the end of the reporting period.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

II. Pengakuan dan pengukuran

Pembelian dan penjualan aset keuangan yang lazim (reguler) diakui pada tanggal transaksi-tanggal dimana Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset. Investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah biaya transaksi untuk seluruh aset keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari investasi tersebut telah jatuh tempo atau telah ditransfer dan Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset. Pinjaman dan piutang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Perubahan nilai wajar efek moneter dan nonmoneter yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual diakui pada laba komprehensif lainnya.

Ketika efek diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual telah dijual, akumulasi penyesuaian nilai wajar yang diakui pada ekuitas dimasukkan ke dalam laporan laba rugi sebagai "pendapatan keuangan" atau "beban keuangan".

III. Saling hapus antar instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan terdapat maksud untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

II. Recognition and measurement

Regular purchases and sales of financial assets are recognised on the trade-date – the date on which the Group commits to purchase or sell the asset. Investments are initially recognised at fair value plus the transaction costs for all financial assets not carried at fair value through profit or loss.

Financial assets are derecognised when the rights to receive cash flows from the investments have expired or have been transferred and the Group has transferred substantially all risks and rewards of ownership. Loans and receivables are carried at amortised cost using the effective interest method.

Changes in the fair value of monetary and non-monetary securities classified as available-for-sale are recognised in other comprehensive income.

When securities classified as available-for-sale are sold, the accumulated fair value adjustments recognised in equity are included in the profit or loss as "finance income" or "finance costs".

III. Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and their net amounts are reported in the consolidated statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

f. Piutang usaha dan piutang lain-lain

Piutang usaha merupakan jumlah terutang dari pelanggan atas penjualan batubara dalam kegiatan usaha normal. Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal jika lebih panjang), piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar. Sesuai peraturan OJK, piutang lain-lain dari pihak berelasi disajikan sebagai aset tidak lancar tanpa mempertimbangkan perkiraan periode tertagihnya.

Piutang dari pihak berelasi merupakan saldo piutang yang terkait dengan pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi Grup.

g. Persediaan

Persediaan batubara, termasuk persediaan batubara *run-of-mine* dinilai berdasarkan nilai terendah antara harga perolehan atau nilai realisasi bersih. Harga perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang (*weighted average*) atas biaya yang terjadi selama periode pelaporan dan mencakup bagian biaya *overhead* tetap dan variabel. Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga penjualan yang dapat diperoleh sesuai dengan kegiatan normal usaha dikurangi beban penjualan dan biaya-biaya untuk menyelesaikan penjualan.

Suku cadang dan bahan-bahan pendukung lainnya dinilai berdasarkan harga perolehan yang ditentukan dengan metode rata-rata bergerak setelah dikurangi dengan penyisihan atas persediaan yang sudah usang. Suku cadang dan bahan-bahan pendukung lainnya dicatat sebagai beban pokok penjualan pada saat digunakan.

Penyisihan atas persediaan suku cadang dan bahan-bahan pendukung yang sudah usang dan bergerak lambat ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan atau penjualan masing-masing jenis persediaan pada masa mendatang.

h. Aset tetap

Pada awalnya, semua aset tetap diakui sebesar harga perolehan dan setelahnya dicatat pada harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Trade and other receivables

Trade receivables are amounts due from customers for coal sold in the ordinary course of business. If collection is expected in one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer), they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets. In accordance with OJK regulations, other receivables from related parties are classified as non-current assets without considering the expected collection period.

Amounts due from related parties are receivables balances reflecting loans given to related parties of the Group.

g. Inventories

Coal inventories, including run-of-mine stocks is valued at the lower of cost and net realisable value. Cost is determined based on the weighted average cost incurred during the period and includes an appropriate portion of fixed and variable overheads. Net realisable value is the estimated sales amount in the ordinary course of business less the costs of completion and selling expenses.

Spare parts and consumable supplies are valued at cost, determined on a moving average basis, less provision for obsolete items. Stores and consumable supplies are charged to cost of goods sold in the period they are used.

A provision for obsolete and slow moving spare parts and consumable supplies is determined on the basis of estimated future usage or sale of individual inventory items.

h. Fixed assets

Initially, fixed assets are recognised at cost and subsequently carried at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment loss.

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/20 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

Aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus hingga mencapai nilai sisa, selama periode yang lebih rendah antara estimasi umur aset atau umur tambang atau sisa umur PKP2B sebagai berikut:

<u>Tahun/ Years</u>	
Bangunan	5 – 20
Infrastruktur	10 – 30
Peralatan dan perlengkapan kantor	4
Kendaraan	6 – 12
Alat berat	6 – 12

Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, hanya jika kemungkinan besar Grup mendapat manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Nilai tercatat dari komponen yang diganti dihapuskan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi dalam periode keuangan ketika biaya-biaya tersebut terjadi.

Apabila aset tetap dihentikan penggunaanya atau dijual, nilai tercatat dikeluarkan dari laporan keuangan konsolidasian, dan keuntungan dan kerugian yang timbul akibat penarikan atau penjualan aset tetap tersebut diakui dalam laporan laba rugi.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari pelepasan ditentukan dengan membandingkan perolehan kas dengan nilai tercatat dan diakui pada "beban lain-lain, bersih" dalam laporan laba rugi.

Masa manfaat, nilai sisa, dan metode depresiasi aset dikaji dan disesuaikan, jika diperlukan, pada setiap tanggal akhir tahun buku. Efek dari setiap penyesuaian ini diakui dalam laporan laba rugi secara prospektif.

Nilai tercatat aset diturunkan segera ke jumlah terpulihkan jika nilai tercatat aset tersebut lebih tinggi dari pada jumlah terpulihkan yang diestimasikan (Catatan 2I).

Akumulasi biaya konstruksi bangunan, infrastruktur, dan pemasangan alat berat dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat konstruksi atau pemasangan selesai. Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan manajemen.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Fixed assets are depreciated to their estimated residual value using the straight-line method over the lesser of the estimated useful lives of the assets or the life of mine or the term of the CCoW as follows:

Bangunan	Buildings
Infrastruktur	Infrastructure
Peralatan dan perlengkapan kantor	Office furniture and equipment
Kendaraan	Vehicles
Alat berat	Heavy equipment

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of replaced parts is derecognised. All other repairs and maintenance are charged to the profit or loss during the financial period in which they are incurred.

When fixed assets are retired or otherwise disposed of, their carrying amounts are eliminated from the consolidated financial statements, and the resulting gains and losses on the disposal of fixed assets are recognised in the profit or loss.

Gains and losses on disposals are determined by comparing the proceeds with the carrying amount and are recognised within "other expenses, net" in profit or loss.

The assets' useful lives, residual values, and depreciation method are reviewed, and adjusted if appropriate, at each financial year end. The effects of any revisions are recognised in the profit or loss, prospectively.

The carrying amount of an asset is written down immediately to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than its estimated recoverable amount (Note 2I).

The accumulated costs of the construction of buildings, infrastructure, and the installation of heavy equipment are capitalised as construction-in-progress. These costs are reclassified to fixed assets when the construction or installation is complete. Depreciation is charged from the date the assets are ready for use in the manner intended by management.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

i. Biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan

Biaya eksplorasi dikapitalisasi dan ditangguhkan untuk setiap *area of interest* apabila memenuhi salah satu dari ketentuan berikut:

- (i) biaya tersebut diharapkan dapat diperoleh kembali melalui keberhasilan pengembangan dan eksploitasi *area of interest* tersebut atau melalui penjualan *area of interest* tersebut; atau
- (ii) kegiatan eksplorasi dalam *area of interest* belum mencapai tahap yang memungkinkan penentuan adanya cadangan terbukti yang ekonomis dapat diperoleh, dan kegiatan yang aktif dan signifikan dalam atau berhubungan dengan *area of interest* tersebut masih berlanjut.

Pemulihan biaya eksplorasi yang ditangguhkan bergantung pada keberhasilan pengembangan dan eksploitasi secara komersial, atau penjualan dari *area of interest* yang terkait. Setiap *area of interest* dievaluasi kembali pada setiap akhir periode akuntansi. Biaya eksplorasi yang terkait pada suatu *area of interest* yang telah ditinggalkan atau yang telah diputuskan Direksi Grup bahwa *area of interest* tersebut tidak layak secara ekonomis, dihapuskan pada periode keputusan tersebut dibuat.

Biaya pengembangan yang ditangguhkan mencakup akumulasi biaya administrasi, biaya pembersihan lahan, dan biaya pembukaan tambang, yang dilakukan dalam rangka mempersiapkan cadangan terbukti sampai siap diproduksi secara komersial.

Biaya pengembangan tersebut meliputi biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan konstruksi tambang dan infrastruktur terkait lainnya. Amortisasi diakui terhadap properti yang dikembangkan ketika tambang tersebut sudah sampai dengan tahap yang direncanakan oleh manajemen.

Biaya pengembangan tambang dan pengeluaran-pengeluaran lain yang terkait dengan pengembangan suatu *area of interest* dikapitalisasi sebelum dimulainya produksi dari area tersebut sepanjang memenuhi persyaratan untuk penangguhan.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Deferred exploration and development expenditure

Exploration expenditure incurred is capitalised and carried forward for each area of interest, provided that one of the following conditions is met:

- (i) *such costs are expected to be recouped through successful development and exploitation of the area of interest or, alternatively, by its sale; or*
- (ii) *exploration activities in the area of interest have not yet reached a stage which permits a reasonable assessment of the existence, or otherwise of economically recoverable reserves, and active and significant operations in, or in relation to the area of interest are continuing.*

Ultimate recoupment of exploration expenditure carried forward is dependent upon the successful development and commercial exploitation, or alternatively, the sale of the respective area of interest. Each area of interest is reviewed at the end of each accounting period. Exploration expenditure in respect of an area of interest which has been abandoned or for which a decision has been made by the Board of Directors of the Group against the commercial viability of the area is written-off in the period in which the decision is made.

Deferred development expenditure represents the accumulated costs relating to administrative, land clearing and cost of opening the mine, which is conducted in the preparation of proven reserves until commercial production.

Such expenditure comprises costs directly attributable to the construction of a mine and the related infrastructure. Amortisation is recognised in respect of development properties when the mine is capable of operating in the manner intended by management.

Mine development expenditure and related costs in developing an area of interest prior to commencement of operations in the respective area, as long as they meet the criteria for deferral, are capitalised.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

Biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan diamortisasi berdasarkan unit produksi sejak dimulainya produksi secara komersial dengan memperhatikan masa PKP2B.

j. Properti pertambangan

Properti pertambangan merupakan penyesuaian nilai wajar atas aset bersih yang diperoleh pada tanggal akuisisi terhadap harga perolehan aset tersebut yang merupakan aset teridentifikasi berupa cadangan atau sumber daya batubara dan dinyatakan pada harga perolehan.

Saldo properti pertambangan diamortisasi selama umur properti menggunakan metode unit produksi sejak tanggal dimulainya operasi komersial. Amortisasi tersebut menggunakan basis estimasi cadangan. Perubahan dalam estimasi cadangan dilakukan secara prospektif, dimulai sejak awal periode terjadinya perubahan.

k. Goodwill

Goodwill merupakan selisih lebih antara harga perolehan investasi dan nilai wajar bagian Grup atas aset bersih entitas anak yang diakuisisi pada tanggal akuisisi.

Untuk pengujian penurunan nilai, goodwill yang diperoleh dalam kombinasi bisnis dialokasikan pada setiap unit penghasil kas, atau kelompok unit penghasil kas, yang diharapkan dapat memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut. Setiap unit atau kelompok unit yang memperoleh alokasi goodwill merupakan tingkat terendah dalam entitas yang goodwillnya dipantau untuk tujuan manajemen internal.

Peninjauan atas penurunan nilai pada goodwill dilakukan setahun sekali atau dapat lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya potensi penurunan nilai. Nilai tercatat dari goodwill dibandingkan dengan jumlah yang terpulihkan, yaitu jumlah yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi dan selanjutnya tidak dibalik kembali.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Deferred exploration and development expenditure is amortised based on the units of production method, from the commencement of commercial production and giving regard to the term of the CCoW.

j. Mining properties

Mining properties represent the fair value adjustments of net assets acquired at the date of acquisition of a mining company over the acquisition costs of the assets which are identifiable in the form of coal reserves or resources and are stated at cost.

The mining properties balances are amortised over the life of the property using the units of production method from the date of the commencement of commercial operations. The amortisation is based on estimated reserves. Changes in estimated reserves are accounted for on a prospective basis, from the beginning of the period in which the change occurs.

k. Goodwill

Goodwill represents the excess of the acquisition cost over the fair value of the Group's share of the net assets of the acquired subsidiaries at the date of acquisition.

For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is allocated to each of the cash-generating units ("CGU"), or groups of CGUs, that is expected to benefit from the synergies of the combination. Each unit or group of units to which the goodwill is allocated represents the lowest level within the entity at which the goodwill is monitored for internal management purposes.

Goodwill impairment reviews are undertaken annually or more frequently if events or changes in circumstances indicate a potential impairment. The carrying value of goodwill is compared to the recoverable amount, which is the higher of value-in-use ("VIU") and the fair value less costs to sell. Any impairment loss is recognised immediately as an expense within profit or loss and is not subsequently reversed.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2016 AND 2015
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

I. Penurunan nilai aset non keuangan

Aset yang memiliki masa manfaat yang tidak terbatas—misalnya *goodwill* atau aset tak berwujud yang belum siap untuk digunakan—tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya setiap tahun, atau lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan pada kondisi yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai.

Aset yang diamortisasi diuji ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Kerugian penurunan diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai. Dalam menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah dimana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi. Aset nonkeuangan selain *goodwill* yang mengalami penurunan nilai diuji setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai.

Pemulihan rugi penurunan nilai, untuk aset selain *goodwill*, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang disajikan pada jumlah revaluasian sesuai dengan PSAK lain. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dibalik lagi.

m. Pinjaman

Pinjaman diakui pada awalnya sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laporan laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

I. Impairment of non-financial assets

Assets that have an indefinite useful life—for example, goodwill or intangible assets not ready for use—are not subject to amortisation but tested annually for impairment, or more frequently if events or changes in circumstances indicate that they might be impaired.

Assets that are subject to amortisation are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognised for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs to sell and VIU. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows (CGU). Non-financial assets other than goodwill that suffer impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

Reversal of impairment loss for assets other than goodwill would be recognised if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal of impairment losses will be immediately recognised in profit or loss, except for assets measured using the revaluation model as required by other SFAS. Impairment losses relating to goodwill would not be reversed.

m. Borrowings

Borrowings are recognised initially at fair value, net of transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortised cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognised in profit or loss over the period of the borrowings using the effective interest method.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman apabila besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya tersebut ditangguhkan sampai penarikan pinjaman dilakukan. Apabila tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya tersebut dikapitalisasi sebagai pembayaran dimuka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas terkait.

Biaya pinjaman yang terjadi untuk konstruksi aset kualifikasi, dikapitalisasi selama periode waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan konstruksi aset dan mempersiapkannya sampai dapat digunakan sesuai tujuan yang dimaksudkan atau untuk dijual. Biaya pinjaman lainnya dibebankan pada laporan laba rugi.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Grup memiliki hak tanpa syarat untuk menunda pembayaran liabilitas selama paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

n. Biaya pengupasan lapisan tanah

Biaya pengupasan lapisan tanah biasanya dibebankan sebagai biaya produksi berdasarkan rasio pengupasan lapisan tanah rata-rata selama umur tambang. Menurut ISFAS 29 biaya pengupasan lapisan tanah dibebankan kecuali terdapat kondisi tertentu yang dipenuhi.

o. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan terdiri dari nilai wajar imbalan yang diterima atau akan diterima dari penjualan batubara dalam kegiatan usaha normal Grup. Pendapatan disajikan neto setelah dikurangi pajak pertambahan nilai, retur, potongan harga dan diskon dan setelah mengeliminasi pendapatan mitra kelompok usaha dalam Grup.

Pendapatan dari penjualan batubara diakui pada saat terpenuhinya seluruh kondisi berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Fees paid on the establishment of loan facilities are recognised as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawn down. In this case, the fee is deferred until the draw-down occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawn down, the fee is capitalised as a pre-payment for liquidity services and amortised over the period of the facility to which it relates.

Borrowing costs incurred for the construction of any qualifying asset are capitalised during the period of time that is required to complete and prepare the asset for its intended use or sale. Other borrowing costs are expensed in profit or loss.

Borrowings are classified as current liabilities unless the Group has an unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting date.

n. Stripping costs

Stripping costs are recognised as production costs based on the average stripping ratio during the life of mine. Pursuant to ISFAS 29 stripping costs are expensed unless certain strict conditions are met.

o. Revenue and expense recognition

Revenue comprises the fair value of the consideration received or receivable for the sale of coal in the ordinary course of the Group's activities. Revenue is shown net of Value Added Tax, returns, rebates and discounts and after eliminating sales within the Group.

Revenue from sales of coal is recognised when all the following conditions are met:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

- Grup telah memindahkan risiko secara signifikan dan manfaat kepemilikan batubara kepada pembeli;
- Grup tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas batubara yang dijual;
- jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal;
- besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada Grup; dan
- biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal.

Penjualan tagih dan tahan (*bill and hold*) batubara adalah kontrak penjualan batubara yang mana pengiriman ditunda atas permintaan pembeli tetapi pembeli memperoleh hak atas batubara dan menerima tagihan.

Penjualan tagih dan tahan batubara akan diakui sebagai pendapatan ketika:

- kemungkinan besar pengiriman akan dilakukan;
- barang yang berada di tangan penjual, dapat diidentifikasi dan siap untuk dikirim ke pembeli pada saat penjualan diakui;
- pembeli secara khusus mengakui adanya instruksi penangguhan pengiriman; dan
- syarat-syarat pembayaran lazim tetap berlaku.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

p. Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung, sewa dibuat berdasarkan substansi perjanjian itu sendiri dan penilaian apakah pemenuhan atas perjanjian bergantung dari penggunaan aset tertentu atau aset, dan apakah perjanjian memberikan hak untuk menggunakan aset.

Sewa dimana sebagian besar risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan dipertahankan oleh *lessor* diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pembayaran sewa operasi (dikurangi insentif yang diterima dari *lessor*) dibebankan pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode garis lurus selama periode sewa.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

- *the Group has transferred to the buyer the significant risks and rewards of ownership of the coal;*
- *the Group retains neither continuing managerial involvement nor effective control over the coal sold;*
- *the amount of revenue can be measured reliably;*
- *it is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the Group; and*
- *the costs incurred or to be incurred with respect to the sales transaction can be measured reliably.*

Bill and hold coal sales are coal sales contracts in which delivery is delayed at the request of the buyer but the buyer has assumed title to the coal and accepted billing.

Bill and hold coal sales are recognised as revenue when:

- *it must be probable that delivery will take place;*
- *the goods must be on hand, identified and be ready for delivery to the buyer at the time the sale is recognised;*
- *the buyer must specifically acknowledge the deferred delivery instructions; and*
- *the usual payment terms must apply.*

Expenses are recognised as incurred on an accrual basis.

p. Leases

Determination whether an arrangement is, or contains, a lease is made based on the substance of the arrangement and assessment of whether fulfilment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets, and the arrangement conveys a right to use the asset.

Leases in which a significant portion of the risks and rewards of ownership are retained by the lessor are classified as operating leases. Payments made under operating leases (net of any incentives received from the lessor) are charged to profit or loss on a straight-line basis over the term of the lease.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

Grup menyewa aset tetap tertentu. Sewa aset tetap dimana Grup, sebagai lessee, memiliki sebagian besar risiko dan manfaat kepemilikan diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Sewa pembiayaan dikapitalisasi pada awal masa sewa sebesar yang lebih rendah antara nilai wajar aset sewaan dan nilai kini pembayaran sewa minimum.

Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara liabilitas dan beban keuangan sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa. Kewajiban sewa yang terkait, dikurangi dengan beban keuangan, dimasukkan ke dalam "utang sewa pembiayaan".

Elemen bunga dari beban keuangan dibebankan pada laporan laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat bunga periodik yang konstan untuk saldo liabilitas yang tersisa pada setiap periode. Aset tetap yang diperoleh melalui sewa pembiayaan disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa manfaat aset dan masa sewa apabila tidak terdapat kepastian yang memadai bahwa Grup akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa.

Transaksi jual dan sewa-balik (*sales and lease back*) meliputi penjualan suatu aset dan penyewaan kembali aset yang sama. Pembayaran sewa dan harga jual biasanya saling terkait karena keduanya dinegosiasikan sebagai suatu paket. Perlakuan akuntansi untuk transaksi jual dan sewa-balik bergantung pada jenis sewanya.

Untuk suatu transaksi jual dan sewa-balik merupakan sewa pembiayaan, selisih lebih hasil penjualan dari nilai tercatat tidak dapat diakui segera sebagai pendapatan oleh penjual-lessee, tetapi ditangguhkan dan diamortisasi selama masa sewa.

Untuk transaksi jual dan sewa-balik merupakan sewa operasi dan jelas bahwa transaksi tersebut terjadi pada nilai wajar, maka laba atau rugi harus diakui segera. Jika harga jual di bawah nilai wajar, maka laba atau rugi harus diakui segera, kecuali rugi tersebut dikompensasikan dengan pembayaran sewa di masa depan yang lebih rendah dari harga pasar, maka rugi tersebut harus ditangguhkan dan diamortisasi secara proposisional dengan pembayaran sewa selama periode penggunaan aset. Jika harga jual di atas nilai wajar, selisih lebih dari nilai wajar tersebut ditangguhkan dan diamortisasi selama periode penggunaan aset.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

The Group leases certain fixed assets. Leases of fixed assets where the Group as lessee has substantially all the risks and rewards of ownership are classified as finance leases. Finance leases are capitalised at the lease's commencement at the lower of the fair value of the leased asset and the present value of the minimum lease payments.

Each lease payment is allocated between the liability and finance charges so as to achieve a constant rate on the finance balance outstanding. The corresponding rental obligations, net of finance charges, are included in "finance lease payables".

The interest element of the finance cost is charged to the profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period. Fixed assets acquired under finance leases is depreciated over the shorter of the useful life of the asset and the lease term if there is no reasonable certainty that the Group will obtain ownership at the end of the lease term.

A sale and leaseback transaction involves the sale of an asset and the leasing back of the same asset. The lease payment and the sale price are usually interdependent because they are negotiated as a package. The accounting treatment of a sale and leaseback transaction depends upon the type of lease involved.

For a sale and leaseback transaction results in a finance lease, any excess of sales proceeds over the carrying amount shall not be immediately recognised as income by a seller-lessee. Instead, it shall be deferred and amortised over the lease term.

For a sale and leaseback transaction results in an operating lease, and it is clear that the transaction is established at fair value, any profit or loss shall be recognised immediately. If the sale price is below fair value, any profit or loss shall be recognised immediately except that, if the loss is compensated for by future lease payments at below market price, it shall be deferred and amortised in proportion to the lease payments over the period for which the asset is expected to be used. If the sale price is above fair value, the excess over fair value shall be deferred and amortised over the period for which the asset is expected to be used.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

q. Provisi

(i) Provisi kewajiban lingkungan

Pengeluaran yang terkait dengan pemulihan, rehabilitasi, dan lingkungan yang berkaitan dengan pemulihan area yang terganggu selama tahap produksi dibebankan sebagai beban pokok penjualan pada saat kewajiban itu timbul dari gangguan yang terjadi.

Provisi untuk hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan yang tidak berkaitan dengan penarikan aset, dimana Grup merupakan pihak yang bertanggung jawab, diakui ketika:

- Grup memiliki kewajiban kini baik yang bersifat hukum maupun konstruktif, sebagai akibat peristiwa masa lalu;
- besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya; dan
- estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi untuk pembongkaran, pemindahan dan restorasi dicatat untuk mengakui kewajiban hukum dan konstruktif berkaitan dengan penarikan aset tetap dan aset jangka panjang lainnya yang berasal dari akuisisi, konstruksi atau pengembangan dan/atau operasi normal aset tersebut.

Penarikan aset tersebut ini, termasuk penjualan, peninggalan (*abandonment*), pendaurulangan atau penghapusan dengan cara lain.

Kewajiban ini pada awalnya diakui sebagai liabilitas pada saat timbulnya kewajiban hukum dan konstruktif yang berkaitan dengan penarikan sebuah aset, dan kemudian diakui sebesar nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban tersebut. Biaya penarikan aset dalam jumlah yang setara dengan jumlah liabilitas dikapitalisasi

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Provision

(i) Provision for environmental related obligations

Restoration, rehabilitation and environmental expenditures to be incurred in relation to the remediation of disturbed areas during the production phase are charged to cost of goods sold when the obligation arising from the disturbance occurs.

Provision for environmental issues that may not involve the retirement of an asset, where the Group is a responsible party are recognised when:

- the Group has a present legal or constructive obligation as a result of past events;
- it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation; and
- the amount has been reliably estimated.

Provision for decommissioning, demobilisation and restoration provides for the legal and constructive obligations associated with the retirement of fixed assets and other long-lived assets that result from the acquisition, construction or development and/or the normal operation of such assets.

The retirement of such assets is its other than temporary removal from service including its sale, abandonment, recycling or disposal in some other manner.

These obligations are recognised as liabilities when a legal and constructive obligation with respect to the retirement of an asset is incurred, with the initial and subsequent measurement of the obligation at the present value of the expenditures expected to be required to settle the obligation using a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the obligation. An asset retirement cost equivalent to these liabilities is capitalised as part of the related asset's carrying value

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

sebagai bagian dari suatu aset terkait dan kemudian disusutkan atau dideplesi selama masa manfaat aset tersebut. Peningkatan kewajiban ini sehubungan dengan berlalunya waktu diakui sebagai beban keuangan.

Perubahan dalam pengukuran kewajiban tersebut yang timbul dari perubahan estimasi waktu atau jumlah pengeluaran sumber daya ekonomis (contohnya: arus kas) yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, atau perubahan dalam tingkat diskonto, akan ditambahkan pada atau dikurangkan dari harga perolehan aset yang bersangkutan pada periode berjalan. Jumlah yang dikurangkan dari harga perolehan aset tidak boleh melebihi jumlah tercatatnya. Jika penurunan dalam liabilitas melebihi nilai tercatat aset, kelebihan tersebut segera diakui dalam laporan laba rugi. Jika penyesuaian tersebut menghasilkan penambahan pada harga perolehan aset, Grup akan mempertimbangkan apakah hal ini mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset yang baru mungkin tidak bisa dipulihkan secara penuh.

Jika terdapat indikasi tersebut, Grup akan melakukan pengujian penurunan nilai terhadap aset tersebut dengan melakukan estimasi atas nilai yang dapat dipulihkan dan akan mencatat kerugian dari penurunan nilai, jika ada.

Provisi diukur pada nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban, menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban tersebut. Peningkatan provisi ini sehubungan dengan berlalunya waktu diakui sebagai beban keuangan.

(ii) Provisi lain-lain

Provisi biaya restrukturisasi dan tuntutan hukum diakui ketika: Grup memiliki kewajiban hukum atau konstruktif masa kini sebagai akibat peristiwa masa lalu; terdapat kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya; dan jumlah kewajiban tersebut dapat diukur secara andal. Provisi tidak diakui untuk kerugian operasi masa depan.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

and is subsequently depreciated or depleted over the asset's useful life. The increase in these obligations due to the passage of time is recognised as finance costs.

The changes in the measurement of these obligations that result from changes in the estimated timing or amount of the outflow of resources embodying economic benefits (e.g; cash flows) required to settle the obligation, or a change in the discount rate will be added to or deducted from the cost of the related asset in the current period. The amount deducted from the cost of the asset should not exceed its carrying amount. If a decrease in the liability exceeds the carrying amount of the asset, the excess is recognised immediately in the profit or loss. If the adjustment results in an addition to the cost of an asset, the Group will consider whether this is an indication that the new carrying amount of the asset may not be fully recoverable.

If there is such an indication, the Group will test the asset for impairment by estimating its recoverable amount and will account for any impairment loss incurred, if any.

Provision is measured at the present value of the expenditures expected to be required to settle the obligation using a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the obligation. The increase in the provision due to the passage of time is recognised as finance costs.

(ii) Other provisions

Provision for restructuring costs and legal claims is recognised when: the Group has a present legal or constructive obligation as a result of past events; it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation; and the amount has been reliably estimated. Provisions are not recognised for future operating losses.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

Ketika terdapat beberapa kewajiban yang serupa, kemungkinan penyelesaian mengakibatkan arus keluar ditentukan dengan mempertimbangkan kelas kewajiban secara keseluruhan. Provisi diakui walaupun kemungkinan adanya arus keluar sehubungan dengan unsur manapun yang termasuk dalam kelas kewajiban yang sama mungkin kecil.

Provisi diukur sebesar nilai kini dari estimasi terbaik manajemen atas pengeluaran yang diharapkan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai kini adalah tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban. Peningkatan provisi karena berjalannya waktu diakui sebagai beban keuangan.

r. Pajak penghasilan kini dan tangguhan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di laba komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam laba komprehensif lain atau ekuitas.

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode *balance sheet liability* untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan konsolidasian. Namun, liabilitas pajak penghasilan tangguhan tidak diakui jika berasal dari pengakuan awal *goodwill* dan pajak penghasilan tangguhan pada saat pengakuan awal aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi dan laba rugi kena pajak. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantial telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Where there are a number of similar obligations, the likelihood that an outflow will be required in settlement is determined by considering the class of obligations as a whole. A provision is recognised even if the likelihood of an outflow with respect to any one item included in the same class of obligations may be small.

Provisions are measured at the present value of management's best estimate of the expenditure required to settle the present obligation at the end of the reporting period. The discount rate used to determine the present value is a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the liability. The increase in the provision due to the passage of time is recognised as finance costs.

r. Current and deferred income tax

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in the profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

Deferred income tax is recognised, using the balance sheet liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. However, deferred tax liabilities are not recognised if they arise from the initial recognition of goodwill and deferred income tax is not accounted for if it arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantially enacted as at reporting period and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Atas perbedaan temporer dalam investasi pada entitas anak dan asosiasi dibentuk pajak penghasilan tangguhan, kecuali untuk liabilitas pajak penghasilan tangguhan dimana saat pembalikan perbedaan sementara dikendalikan oleh Grup dan sangat mungkin perbedaan temporer tersebut tidak akan dibalik di masa mendatang.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto.

Selain pajak penghasilan, Grup juga mengakui bentuk pajak yang lain yang dihitung menggunakan produksi (royalti). Royalti dianggap sebagai pajak penghasilan apabila mereka memiliki karakteristik sebagai pajak penghasilan. Kewajiban Grup yang timbul dari ketentuan royalti tidak memenuhi kriteria sebagai pajak penghasilan, sehingga diakui sebagai beban pokok penjualan.

s. Imbalan karyawan

(i) Kewajiban pensiun

Program imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang dibayarkan, biasanya berdasarkan pada satu atau lebih faktor seperti usia, masa kerja atau jumlah kompensasi.

Grup harus menyediakan imbalan pensiun dengan jumlah minimal berdasarkan Peraturan Grup ("Peraturan") atau berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 ("UU Ketenagakerjaan"), mana yang lebih tinggi. Karena UU Ketenagakerjaan atau Peraturan menentukan rumus tertentu

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.

Deferred income tax is provided on temporary differences arising on investments in subsidiaries and associates, except for deferred income tax liability where the timing of the reversal of the temporary difference is controlled by the Group and it is probable that the temporary difference will not be reversed in the foreseeable future.

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis.

In addition to income tax, the Group also recognises other types of taxes that are calculated based on production (royalty). Royalty fees are accounted for as income taxes when they have the characteristics of an income tax. The Group's obligations arising from royalty fee arrangements are not based on taxable income and are therefore included in cost of goods sold.

s. Employee benefits

(i) Pension obligations

A defined benefit plan is a pension plan that defines the amount of pension benefits to be provided, usually as a function of one or more factors such as age, years of service and compensation.

The Group is required to provide a minimum amount of pension benefit in accordance with the Group's regulation ("Regulation") or Labour Law No. 13, 2003 (the "Labour Law"), whichever is higher. Since the Labour Law and the Regulation set the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya, program pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan atau Peraturan adalah program imbalan pasti.

Kewajiban program pensiun imbalan pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai penyesuaian atas keuntungan/kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui.

Besarnya kewajiban imbalan pasti ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang dilakukan setiap tahun menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskonto estimasi arus kas keluar masa depan menggunakan tingkat suku bunga obligasi pemerintah (mengingat saat ini belum ada pasar yang aktif untuk obligasi perusahaan yang berkualitas tinggi) yang didenominasikan dalam mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun.

Beban yang dibebankan dalam laba rugi meliputi biaya jasa kini, bunga atas kewajiban, amortisasi biaya jasa lalu, dan keuntungan/kerugian aktuarial. Liabilitas jasa lalu diamortisasi dengan garis lurus selama rata-rata periode jasa yang diestimasikan sampai imbalan menjadi vested.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman, perubahan asumsi-asumsi aktuarial, dan perubahan pada program pensiun. Jumlah keuntungan dan kerugian aktuarial yang melebihi 10% dari kewajiban imbalan pasti dibebankan atau dikreditkan pada laba rugi selama rata-rata sisa masa kerja yang diharapkan dari para pekerja.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

plans under the Labour Law or the Regulation represent defined benefit plans.

The liability recognised in the consolidated statements of financial position in respect of the defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of reporting period date less adjustments for unrecognised actuarial gains or losses and past service costs.

The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of government bonds (considering that there is currently no deep market for high quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefit will be paid, and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension liability.

Expenses charged to profit or loss include current service costs, interest on the obligation, amortisation of past service costs and actuarial gains and losses. The past service liability is amortised on a straight-line basis over the estimated average service period until the benefits become vested.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments, changes in actuarial assumptions and amendments to the pension plan, in excess of 10% of the present value of the defined benefit obligation are charged or credited to profit or loss over the employees expected average remaining working lives.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

Biaya jasa lalu diakui segera di laporan laba rugi, kecuali perubahan pada program pensiun bergantung kepada sisa masa kerja karyawan untuk jangka waktu tertentu (periode hak atau *vesting*). Dalam kasus ini, biaya jasa lalu diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama periode *vesting*.

(ii) Pesangon pemutusan kontrak kerja

Pesangon pemutusan kontrak kerja terutang ketika Grup memberhentikan hubungan kerja sebelum usia pensiun normal, atau ketika seorang pekerja menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela dengan kompensasi imbalan pesangon. Grup mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja ketika dapat ditunjukkan bahwa Grup berkomitmen untuk melakukan pemberhentian yang ditunjukkan dengan adanya perencanaan yang rinci dan formal untuk memutuskan hubungan kerja dengan karyawan. Dalam hal menyediakan pesangon sebagai penawaran untuk mengundurkan diri secara sukarela, pesangon pemutusan kontrak kerja diukur berdasarkan jumlah karyawan yang diharapkan menerima penawaran tersebut. Imbalan yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan didiskontokan menjadi nilai kininya.

t. Pembagian hasil produksi

Sebagaimana diatur dalam PKP2B, Pemerintah berhak atas 13,5% dari batubara yang dihasilkan dari proses produksi akhir AKT.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 75/1996 tertanggal 25 September 1996, AKT membayar royalti kepada Pemerintah secara tunai.

Grup mengakui penjualan atas bagian produksi milik Pemerintah sebagai bagian dari pendapatan penjualan, dan kewajiban pembayaran ke Pemerintah sebagai beban royalti di bagian beban pokok penjualan.

u. Laba per saham

Laba per saham dihitung dengan membagi laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham Perusahaan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun berjalan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Past service costs are recognised immediately in the profit or loss, unless the changes to the pension plan are conditional on the employees remaining in service for a specified period of time (the vesting period). In this case, the past service costs are amortised on a straight-line basis over the vesting period.

(ii) Termination benefits

Termination benefits are payable when employment is terminated by the Group before the normal retirement date, or whenever an employee accepts voluntary redundancy in exchange for these benefits. The Group recognises termination benefits when it is demonstrably committed to a termination when the entity has a detailed formal plan to terminate the employment of current employees without possibility of withdrawal. In the case of an offer made to encourage voluntary redundancy, the termination benefits are measured based on the number of employees expected to accept the offer. Benefits falling due more than 12 months after the reporting date are discounted to their present value.

t. Sharing of production

As stipulated in the CCoW, the Government is entitled to receive 13.5% of total coal produced from the final production processes established by AKT.

In accordance with Presidential Decree No. 75/1996 dated 25 September 1996, AKT pays the royalty to the Government in cash.

The Group recognises the Government's share as part of sales revenue, and the obligation to make payment to the Government as royalty expense as part of cost of goods sold.

u. Earnings per share

Earnings per share are calculated by dividing the profit attributable to the equity holders of the Company by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

v. Pelaporan segmen

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- a. yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- b. hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- c. tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Grup melakukan segmentasi pelaporan berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam mengevaluasi kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Segmentasi berdasarkan aktivitas dari setiap kegiatan operasi entitas legal di dalam Grup. Seluruh transaksi antar segmen telah dieliminasi.

w. Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan telah mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai terjadi hanya jika terdapat bukti objektif bahwa penurunan nilai merupakan akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset ("peristiwa kerugian") dan peristiwa kerugian (atau beberapa peristiwa) tersebut memiliki dampak pada estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Untuk kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, jumlah kerugian diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset dan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang diestimasi (tidak termasuk kerugian kredit masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Segment reporting

An operating segment is a component of an entity:

- a. *that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenue and expenses related to transactions between different components within the same entity);*
- b. *whose operating results are regularly reviewed by the entity's chief operating decision-maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and to assess its performance; and*
- c. *for which discrete financial information is available.*

The Group segments its financial reporting based on the financial information used by the chief operating decision-maker in evaluating the performance of segments and in the allocation of resources. The segments are based on the activities of each of the operating legal entities within the Group. All transactions between segments have been eliminated.

w. Impairment of financial assets

At the end of each reporting period, the Group assesses whether there is objective evidence that a financial asset or Group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is impaired and impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a "loss event") and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

For the loans and receivables category, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred) discounted at the financial asset's original effective interest rate.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

Nilai tercatat aset dikurangi dan jumlah kerugian diakui pada laporan laba rugi. Jika pinjaman yang diberikan memiliki tingkat bunga mengambang, tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah tingkat bunga efektif saat ini yang ditentukan dalam kontrak. Untuk alasan praktis, Grup dapat mengukur penurunan nilai berdasarkan nilai wajar instrumen dengan menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi.

Jika, pada periode selanjutnya, jumlah penurunan nilai berkurang dan penurunan tersebut dapat dihubungkan secara objektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (misalnya meningkatnya peringkat kredit debitör), pemulihan atas jumlah penurunan nilai yang telah diakui sebelumnya diakui pada laporan laba rugi.

x. Utang usaha dan utang lain-lain

Utang usaha adalah kewajiban membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok. Utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal, jika lebih lama). Jika tidak, utang tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

y. Modal saham

Saham biasa diklasifikasikan sebagai ekuitas. Biaya langsung yang berkaitan dengan penerbitan saham baru disajikan sebagai pengurang ekuitas setelah dikurangi pajak, dari jumlah yang diterima.

Ketika kelompok usaha dalam Grup membeli modal saham ekuitas Perusahaan (saham simpanan), imbalan yang dibayar, termasuk biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan (dikurangi pajak penghasilan) dikurangkan dari ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik ekuitas entitas sampai saham tersebut dibatalkan atau diterbitkan kembali. Ketika saham biasa tersebut selanjutnya diterbitkan kembali, imbalan yang diterima, dikurangi biaya tambahan transaksi yang terkait dan dampak pajak penghasilan yang terkait dimasukkan pada ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik ekuitas entitas.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

The carrying amount of the asset is reduced and the amount of the loss is recognised in the profit or loss. If a loan has a floating interest rate, the discount rate for measuring any impairment loss is the current effective interest rate determined under the contract. As a practical expedient, the Group may measure impairment on the basis of an instrument's fair value using an observable market price.

If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognised (such as an improvement in the debtor's credit rating), the reversal of the previously recognised impairment loss is recognised in the profit or loss.

x. Trade and others payables

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Trade payables are classified as current liabilities if payment is due within one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer). If not, they are presented as non-current liabilities.

Trade payables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

y. Share capital

Ordinary shares are classified as equity. Incremental costs directly attributable to the issuance of new shares are shown in equity as deductions, net of tax, from the proceeds.

Where any entity within the Group purchases the Company's equity share capital (treasury shares), the consideration paid, including any directly attributable incremental costs (net of income taxes) is deducted from equity attributable to the company's equity holders until the shares are cancelled or reissued. Where such ordinary shares are subsequently reissued, any consideration received, net of any directly attributable incremental transaction costs and the related income tax effects, is included in equity attributable to the Company's equity holders.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2016 AND 2015
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Estimasi, asumsi, dan pertimbangan akan dievaluasi secara berkelanjutan dan didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lainnya, termasuk harapan peristiwa di masa mendatang yang memungkinkan berdasarkan kondisi yang ada.

Grup telah mengidentifikasi kebijakan akuntansi penting berikut ini dimana dibutuhkan pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan yang dibuat dan dimana hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut berdasarkan asumsi dan kondisi yang berbeda dan secara material dapat mempengaruhi hasil keuangan atau posisi keuangan yang dilaporkan di periode mendatang.

Rincian lebih lanjut mengenai sifat dari asumsi-asumsi dan kondisi-kondisi tersebut dapat ditemukan dalam catatan yang relevan atas laporan keuangan konsolidasian.

(i) Estimasi cadangan

Cadangan adalah estimasi jumlah produk yang dapat secara ekonomis dan sah diekstrak dari properti Grup. Grup menentukan dan melaporkan cadangan batubara berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Kode Joint Ore Reserves Committees ("JORC") untuk Pelaporan Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih ("Kode JORC").

Dalam rangka untuk memperkirakan cadangan batubara, dibutuhkan asumsi tentang faktor geologi, teknis dan ekonomi, termasuk jumlah produksi, teknik produksi, rasio pengupasan, biaya produksi, biaya transportasi, permintaan komoditas, harga komoditas dan nilai tukar. Memperkirakan jumlah dan/atau spesifikasi kandungan kimia dalam cadangan batubara membutuhkan ukuran, bentuk dan kedalaman tubuh batubara atau lapangan yang akan ditentukan dengan menganalisis data geologi seperti "uji petik" (sampel) pengeboran. Proses ini mungkin memerlukan penilaian geologi yang kompleks dan sulit untuk menginterpretasikan data.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS

Estimates, assumptions, and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.

The Group has identified the following critical accounting policies under which significant judgments, estimates and assumptions are made and where actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions and may materially affect financial results or the financial position reported in future periods.

Further details of the nature of these assumptions and conditions may be found in the relevant notes to the consolidated financial statements.

(i) Reserve estimates

Reserves are estimates of the amount of product that can be economically and legally extracted from the Group's properties. The Group determines and reports its coal reserves under the principles incorporated in the Code for Reporting of Mineral Resources and Ore Reserves (the "JORC Code") of the Joint Ore Reserves Committees ("JORC").

In order to estimate coal reserves, assumptions are required about a range of geological, technical and economic factors, including quantities, production techniques, stripping ratio, production costs, transport costs, commodity demand, commodity prices and exchange rates. Estimating the quantity and/or chemical content specification of coal reserves requires the size, shape and depth of coal bodies or fields to be determined by analysing geological data such as drilling samples. This process may require complex and difficult geological judgements to interpret the data.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Karena asumsi ekonomi yang digunakan untuk memperkirakan cadangan berubah dari waktu ke waktu, dan karena data geologi tambahan yang dihasilkan selama operasi, perkiraan cadangan dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan cadangan yang dilaporkan dapat mempengaruhi hasil dan posisi keuangan Grup dalam berbagai cara, diantaranya:

- nilai tercatat aset dapat terpengaruh akibat perubahan estimasi arus kas masa depan.
- penyusutan dan amortisasi yang dibebankan ke dalam laporan laba rugi konsolidasian dapat berubah apabila beban-beban tersebut ditentukan berdasarkan unit produksi, atau jika masa manfaat ekonomi umur aset berubah.
- beban pembuangan lapisan tanah yang dicatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian atau dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian dapat berubah karena adanya perubahan rasio pengupasan.
- provisi untuk pembongkaran, restorasi lokasi aset, dan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan dapat berubah apabila terjadi perubahan dalam perkiraan cadangan yang mempengaruhi ekspektasi tentang waktu atau biaya kegiatan ini.
- nilai tercatat aset/liabilitas pajak tangguhan dapat berubah karena perubahan estimasi pemulihan manfaat pajak.

(ii) Biaya eksplorasi

Kebijakan akuntansi Grup untuk biaya eksplorasi menimbulkan adanya beberapa biaya yang dikapitalisasi untuk sebuah *area of interest* yang dianggap dapat dipulihkan oleh kegiatan eksplorasi di masa depan atau dijual atau di mana kegiatan belum mencapai tahap yang memperbolehkan penilaian yang wajar atas adanya cadangan. Kebijakan ini mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi tertentu untuk peristiwa dan keadaan di masa depan, khususnya tentang apakah operasi ekstraksi yang ekonomis dapat dilaksanakan.

Setiap perkiraan dan asumsi tersebut dapat berubah seiring tersedianya informasi baru. Jika setelah biaya dikapitalisasi berdasarkan kebijakan tidak menunjukkan adanya kemungkinan pemulihan biaya, biaya relevan yang dikapitalisasi tersebut akan dihapus dalam laporan laba rugi.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS (continued)

Because the economic assumptions used to estimate reserves change from period to period and because additional geological data is generated during the course of operations, estimates of reserves may change from period to period. Changes in reported reserves may affect the Group's financial results and financial position in a number of ways, including the following:

- asset carrying values may be affected due to changes in estimated future cash flows.
- depreciation and amortisation charged in the consolidated profit or loss may change where such charges are determined on an unit of production basis, or where the useful economic lives of assets change.
- overburden removal costs recorded in the consolidated statements of financial position or charged to the consolidated profit or loss may change due to changes in stripping ratios.
- decommissioning, site restoration and environmental provision may change where changes in estimated reserves affect expectations about the timing or cost of these activities.
- the carrying value of deferred tax assets/liabilities may change due to changes in estimates of the likely recovery of the tax benefits.

(ii) Exploration expenditure

The Group's accounting policy for exploration expenditure results in certain items of expenditure being capitalised for an area of interest where it is considered likely to be recoverable by future exploitation or sale or where the activities have not yet reached a stage which permits a reasonable assessment of the existence of reserves. This policy requires management to make certain estimates and assumptions as to future events and circumstances, in particular whether an economically viable extraction operation can be established.

Any such estimates and assumptions may change as new information becomes available. If, after having capitalised the expenditure under the policy, a judgement is made that recovery of the expenditure is unlikely, the relevant capitalised amount will be written-off to profit or loss.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

(iii) Biaya pengembangan

Kegiatan pengembangan dimulai setelah dilakukan pengesahan proyek oleh tingkat manajemen yang berwenang. Manajemen melakukan pertimbangan untuk menentukan kapan suatu proyek layak dikembangkan secara ekonomis.

Dalam melaksanakan pertimbangan tersebut, manajemen perlu membuat estimasi dan asumsi tertentu seperti yang dijelaskan di atas untuk biaya eksplorasi dan evaluasi yang dikapitalisasi. Setiap estimasi dan asumsi tersebut dapat berubah seiring tersedianya informasi baru. Jika setelah memulai kegiatan pengembangan terdapat penilaian bahwa terdapat penurunan nilai biaya pengembangan, jumlah yang sesuai akan dihapus di dalam laporan laba rugi.

(iv) Penurunan nilai *goodwill*, aset nonkeuangan dan investasi pada pengendalian bersama entitas

Grup melakukan pengujian setiap tahun atas *goodwill* yang telah mengalami penurunan nilai, sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dinyatakan dalam (Catatan 2k). Grup juga melakukan pengujian atas aset nonkeuangan yang diamortisasi ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya melebihi jumlah yang terpulihkan (Catatan 2l). Jumlah terpulihkan unit penghasil kas telah ditentukan dengan perhitungan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Perhitungan ini memerlukan penggunaan estimasi.

Investasi pada pengendalian bersama entitas diuji untuk penurunan nilai setiap ada indikasi selain penurunan sementara dari nilai investasi.

Penentuan nilai terpulihkan mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi tentang ekspektasi produksi dan volume penjualan, harga komoditas (mempertimbangkan harga saat ini dan masa lalu, tren harga dan faktor-faktor terkait), cadangan (lihat Estimasi cadangan di atas), biaya operasi, biaya penutupan dan rehabilitasi serta belanja modal di masa depan.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS (continued)

(iii) Development expenditure

Development activities commence after project sanctioning by the appropriate level of management. Judgement is applied by management in determining when a project is economically viable.

In exercising this judgement, management is required to make certain estimates and assumptions similar to those described above for capitalised exploration and evaluation expenditure. Any such estimates and assumptions may change as new information becomes available. If, after having commenced the development activity, a judgement is made that a development asset is impaired, the appropriate amount will be written off to profit or loss.

(iv) Impairment of goodwill, non-financial assets and investment in jointly controlled entities

The Group tests annually whether goodwill has suffered any impairment, in accordance with the accounting policy stated in (Note 2k). Group also review the impairment testing for its non-financial assets that are subjected to amortisation whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable (Note 2l). The recoverable amounts of CGUs have been determined based on fair value less cost to sell calculations. These calculations require the use of estimates.

Investment in jointly controlled entities is tested for impairment whenever there is an indication of other than temporary decline in the investment's value.

The determination of recoverable amount requires management to make estimates and assumptions about expected production and sales volumes, commodity prices (considering current and historical prices, price trends and related factors), reserves (see Reserve estimates above), operating costs, closure and rehabilitation costs and future capital expenditure.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Estimasi dan asumsi ini memiliki risiko dan ketidakpastian; sehingga ada kemungkinan bahwa perubahan situasi akan mengubah proyeksi ini, yang selanjutnya dapat mempengaruhi jumlah aset yang dapat dipulihkan. Dalam keadaan seperti itu, beberapa atau semua aset mungkin akan mengalami penurunan nilai dengan dampak yang dicatat dalam laporan laba rugi.

(v) Pajak penghasilan

Pertimbangan dan asumsi diperlukan dalam menentukan penyisihan modal dan pengurangan beban tertentu selama estimasi penyisihan pajak penghasilan untuk setiap perusahaan dalam Grup. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan dimana penentuan pajak akhir menjadi tidak pasti selama kegiatan usaha normal. Dimana perhitungan pajak akhir dari hal-hal tersebut berbeda dengan jumlah yang sebelumnya dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada penetapan pajak penghasilan dan pajak penghasilan yang ditangguhkan dalam periode penentuan pajak tersebut.

Perhitungan beban pajak penghasilan Grup melibatkan penafsiran terhadap peraturan perpajakan dan peraturan yang berlaku termasuk PKP2B AKT. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang dapat menyebabkan ketidakpastian di dalam penentuan kewajiban pajak. Resolusi dari posisi pajak yang diambil oleh Grup, melalui negosiasi dengan otoritas pajak yang relevan atau auditor Pemerintah dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya.

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari kerugian pajak yang dapat dikompensasikan kembali, penyisihan modal, dan perbedaan temporer diakui hanya ketika hal-hal tersebut diperhitungkan untuk dapat dipulihkan, yang tergantung pada pembentukan laba kena pajak yang mencukupi dimasa depan. Asumsi pembentukan laba kena pajak dimasa depan tergantung pada estimasi manajemen untuk arus kas di masa depan. Hal ini tergantung pada estimasi produksi, jumlah penjualan barang atau jasa, harga komoditas, cadangan, biaya operasi, biaya penutupan tambang dan rehabilitasi, belanja modal, dividen dan transaksi manajemen modal lainnya dimasa depan.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS (continued)

These estimates and assumptions are subject to risk and uncertainty; hence there is a possibility that changes in circumstances will alter these projections, which may have an impact on the recoverable amount of the assets. In such circumstances, some or all of the carrying value of the assets may be further impaired with the impact recorded in profit or loss.

(v) Income taxes

Judgement and assumptions are required in determining the capital allowances and deductibility of certain expenses during the estimation of the provision for income taxes for each company within the Group. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will have an impact on the income tax and deferred income tax provisions in the period in which such determination is made.

The calculation of the Group's income tax expense involves the interpretation of applicable tax laws and regulations including AKT's CCoW. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The resolution of tax positions taken by the Group through negotiations with relevant tax authorities or the Government's auditor can take several years to complete and in some cases it is difficult to predict the ultimate outcome.

Deferred tax assets, including those arising from unrecouped tax losses, capital allowances and temporary differences, are recognised only where it is considered more likely than not that they will be recovered, which is dependent on the generation of sufficient future taxable profits. Assumptions about the generation of future taxable profits depend on management's estimates of future cash flows. These depend on estimates of future production, sales volumes or sales of services, commodity prices, reserves, operating costs, closure and rehabilitation costs, capital expenditure, dividends and other capital management transactions.

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/39 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

4. AKUISISI PENGENDALIAN BERSAMA ENTITAS

Pada tanggal 31 Oktober 2011, Perusahaan, Long Haul Holding Limited ("LHHL") dan PT Bakrie & Brothers Tbk. ("BNBR") melakukan perjanjian jual-beli saham dimana Perusahaan setuju untuk membeli dan LHHL bersama-sama dengan BNBR setuju untuk menjual 51% dari saham yang ditempatkan pada Borneo Bumi (sebelumnya Sunrise Energy Holdings Pte. Ltd.) dan 49% dari saham yang ditempatkan pada Bumi Borneo (sebelumnya Ultimate Synergy Pte. Ltd.) pada tanggal penutupan perjanjian dengan nilai transaksi sebesar AS\$1 miliar.

Borneo Bumi memiliki 54.154.285 saham dengan hak suara (voting shares) ARM plc, yang mewakili 22,5% saham ARM plc. Bumi Borneo memiliki 60.442.782 saham tanpa hak suara (non voting shares) ARM plc yang mewakili 25,1% saham ARM plc. Melalui akuisisi atas 51% saham Borneo Bumi dan 49% saham Bumi Borneo, Perusahaan secara tidak langsung melakukan akuisisi atas 23,8% saham ARM plc dan entitas anak^{a)}.

Proses akuisisi Borneo Bumi dan Bumi Borneo diselesaikan pada tanggal 16 Januari 2012, sehingga Perusahaan bersama dengan LHHL dan BNBR secara efektif menjadi pemegang saham Borneo Bumi dan Bumi Borneo sejak tanggal tersebut.

Perusahaan telah menandatangani *Shareholders Agreements* dengan LHHL dan BNBR untuk tujuan mengatur pengelolaan Borneo Bumi dan Bumi Borneo yang mengatur penunjukan Direksi dan pelaksanaan aktivitas yang mengharuskan konsensus dari seluruh pihak-pihak yang berbagi pengendalian.

Lihat (Catatan 14) untuk perubahan dari investasi pada pengendalian bersama entitas.

4. ACQUISITION OF JOINTLY CONTROLLED ENTITIES

On 31 October 2011, the Company, Long Haul Holding Limited ("LHHL") and PT Bakrie & Brothers Tbk. ("BNBR") entered into a share sale and purchase agreement where the Company agreed to purchase and LHHL and BNBR agreed to sell 51% of the issued share capital of Borneo Bumi (formerly Sunrise Energy Holdings Pte. Ltd.) and 49% of the issued share capital of Bumi Borneo (formerly Ultimate Synergy Pte. Ltd.) at the completion date of the agreement, for a purchase price of US\$1 billion.

Borneo Bumi owned 54,154,285 of ARM plc's voting shares, which represented 22.5% of ARM plc's shares. Bumi Borneo owned 60,442,782 of ARM plc's non-voting shares, which represented 25.1% of total ARM plc's shares. With the acquisition of 51% of Borneo Bumi's shares and 49% of Bumi Borneo's shares, the Company had indirectly acquired 23.8% of the equity shares of ARM plc and subsidiaries^{a)}.

The process of acquiring Borneo Bumi and Bumi Borneo was completed on 16 January 2012, and the Company together with LHHL and BNBR effectively became shareholders of Borneo Bumi and Bumi Borneo from that date.

The Company entered into a Shareholders Agreement with LHHL and BNBR for the purpose of regulating the management of Borneo Bumi and Bumi Borneo, which governed the sharing of control through Board of Directors' appointments and execution of activities requiring the unanimous consent of the parties sharing control.

Refer to (Note 14) for changes in investment in jointly controlled entities.

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/40 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2016 AND 2015
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

**4. AKUISISI PENGENDALIAN BERSAMA ENTITAS
(lanjutan)**

Selama 2014, Bumi Borneo mengalihkan 3.081.371 saham pada ARM plc ke Borneo Bumi tanpa biaya. Kemudian, Perusahaan menukar kepemilikan 49% saham pada Bumi Borneo untuk kepemilikan 49% saham oleh LHHL dan BNBR pada Borneo Bumi. Akibatnya, Borneo Bumi dimiliki 100% oleh Perusahaan (Lihat catatan 14).

Pada tanggal 15 Juli 2015, Perusahaan (bersama dengan pemegang saham lainnya) menerima penawaran tunai terbuka dari Asia Coal Energy Ventures Limited (perusahaan yang terkait dengan Grup Sinarmas) dan menjual seluruh saham yang dimilikinya di ARM plc (57.235.656 saham biasa) untuk 56 sen per saham. Saham ARM plc sebenarnya telah diagunkan ke SCB berdasarkan perjanjian pinjaman Perusahaan dengan SCB, dan hasil penjualan (sekitar £32.051.967) disimpan ke rekening BBEM SCB di Singapura dengan persetujuan SCB. Kemudian dana tersebut ditarik oleh SCB sebagai pembayaran wajib pinjaman SCB Perusahaan pada bulan Januari 2016.

**4. ACQUISITION OF JOINTLY CONTROLLED
ENTITIES (continued)**

During 2014, Bumi Borneo transferred 3,081,371 shares in ARM plc to Borneo Bumi at no cost. Then the Company exchanged its 49% stake in Bumi Borneo for LHHL and BNBR's 49% stake in Borneo Bumi. As a consequence, Borneo Bumi is a 100% owned subsidiary of the Company (See note 14).

On 15 July 2015, the Company (along with all other shareholders) accepted the open cash offer of Asia Coal Energy Ventures Limited (a company associated with the Sinarmas Group) and sold all of the shares it held in ARM plc (57,235,656 ordinary shares) for 56 pence per share. The ARM plc shares were in fact pledged to SCB under the Company's loan agreement with SCB, and the proceeds from the sale (some £32,051,967) were deposited into a BBEM SCB account in Singapore by agreement with SCB. They were subsequently swept away by SCB as a mandatory prepayment of the Company's SCB loan in January 2016.

5. KAS DAN SETARA KAS

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	2016	2015	
Kas:			Cash:
Rupiah	340,516	150,389	Rupiah
Jumlah kas	<u>340,516</u>	<u>150,389</u>	Total cash
Kas di bank:			Cash in bank
Rupiah			Rupiah
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	141,582	42	PT Bank CIMB Niaga Tbk.
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	25,586	-	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
PT Bank Danamon Indonesia Tbk.	13,685	1,993	PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
Lainnya, masing-masing dibawah AS\$5.000	<u>220,988</u>	<u>162,681</u>	Other, each below US\$5,000
Jumlah rekening rupiah	<u>401,841</u>	<u>164,716</u>	Total Rupiah accounts

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/41 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

5. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

	2016	2015	
Dolar AS			US Dollar
First Gulf Bank cabang Singapura ("FGB")	998,498	2,094	First Gulf Bank Singapore branch ("FGB")
PT Bank Danamon Indonesia Tbk.	329,101	50,483	PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
PT Bank Citibank Indonesia Tbk	583,155	-	PT Bank Citibank Indonesia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	77,724	672,171	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	9,854	-	PT Bank CIMB Niaga Tbk.
Standard Chartered Bank	7,435	1,120,922	Standard Chartered Bank
Lainnya	9,856	48,558	Other
Jumlah rekening Dolar AS	<u>2,015,623</u>	<u>1,894,228</u>	Total US Dollar account
Euro			Euro
PT Bank ANZ Indonesia	60	6,305	PT Bank ANZ Indonesia
Standard Chartered Bank	794	920	Standard Chartered Bank
Lainnya	-	65	Other
Jumlah rekening Euro	<u>854</u>	<u>7,290</u>	Total Euro account
Dolar Australia			Australian Dollar
PT Bank ANZ Indonesia	26	8,341	PT Bank ANZ Indonesia
Jumlah rekening Dolar Australia	<u>26</u>	<u>8,341</u>	Total Australian dollar account
Dolar Singapura			Singapore Dollar
PT Bank ANZ Indonesia	50	1,757	PT Bank ANZ Indonesia
Lainnya	-	19,953	Other
Jumlah rekening Dolar Singapura	<u>50</u>	<u>21,710</u>	Total Singapore Dollar account
Jumlah kas di bank	<u>2,418,394</u>	<u>2,096,285</u>	Total cash in bank
Deposito berjangka :			Time deposit:
Rupiah	1,895,258	1,911,375	Rupiah
Jumlah deposito berjangka	<u>1,895,258</u>	<u>1,911,375</u>	Total time deposit
Jumlah kas dan setara kas	<u>4,654,168</u>	<u>4,158,049</u>	Total cash and cash equivalents

Tidak ada kas dan setara kas dengan pihak berelasi.

There are no cash and cash equivalents with related parties.

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/42 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

6. KAS DI BANK YANG DIBATASI PENGUNAANNYA (lanjutan)

6. RESTRICTED CASH IN BANK (continued)

	2016	2015	
Rupiah			Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	-	13,324	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
PT Bank Danamon Indonesia Tbk.	-	11,341	PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
PT Bank CIMB Niaga Tbk.		74	PT Bank CIMB Niaga Tbk.
Jumlah Rekening Rupiah	<hr/>	<hr/> <hr/> 24,739	Total Rupiah Accounts
Dolar AS			US Dollar
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	-	51,695	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
PT Bank Danamon Indonesia Tbk.	-	8,540	PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	-	2,623	PT Bank CIMB Niaga Tbk.
Standard Chartered Bank	23,152	516	Standard Chartered Bank
Jumlah Rekening Dolar AS	<hr/>	<hr/> <hr/> 63,374	Total US Dollar Account
Jumlah kas di bank yang dibatasi penggunaannya	23,152	88,113	Total restricted cash in bank

Kas di bank yang dibatasi penggunaannya adalah kas yang dibekukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia.

Restricted cash is cash frozen by the Directorate General of Taxes of the Republic of Indonesia.

7. PIUTANG USAHA

7. TRADE RECEIVABLES

	2016	2015	
Pihak ketiga:			Third Party:
Noble Resources International Pte.Ltd	50,771,691	18,400,642	Noble Resources International Pte.Ltd
Dikurangi: Penyisihan atas penurunan nilai	<hr/> (2,076,684) <hr/> 48,695,007	<hr/> (2,076,684) <hr/> 16,323,958	Less: Provision for impairment

Analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

The aging analysis of trade receivables was as follows:

	2016	2015	
Lancar	<hr/> 50,771,691 <hr/> 50,771,691	<hr/> 18,400,642 <hr/> 18,400,642	Current

Mutasi penyisihan penurunan nilai selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movement of provision for impairment in the year is as follows:

	2016	2015	
Saldo awal	<hr/> 2,076,684 <hr/> 2,076,684	<hr/> 2,076,684 <hr/> 2,076,684	Beginning balance

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/43 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

7. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Manajemen berpendapat bahwa nilai penyisihan dapat menutupi segala kemungkinan atas nilai piutang usaha yang belum tertagih.

Pada tanggal 31 December 2016, piutang usaha sejumlah AS\$50,771,691 (2015: AS\$18,400,642) dijaminkan untuk fasilitas pinjaman jangka pendek (Catatan 16b).

8. UANG MUKA DAN PEMBAYARAN DIMUKA

Pembayaran dimuka merupakan sewa ruang kantor dan premi asuransi. Lihat (Catatan 29d) untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

7. TRADE RECEIVABLES (continued)

Management is of the opinion that the provision is sufficient to cover any possible loss from the outstanding trade receivables.

As at 31 December 2016, trade receivables amounting to US\$50,771,691 (2015: US\$18,400,642) were pledged against a short-term loan (Note 16b).

8. ADVANCES AND PREPAYMENTS

Prepayments represent prepaid office rental and insurance. Refer to (Note 29d) for details of related party balances and transactions.

	2016	2015	
Bagian lancar:			Current portion:
Uang muka kepada pemasok	55,415,541	15,960,407	Advances to suppliers
Pembayaran dimuka	(9,583,707)	303,137	Prepayments
Lain-lain	105,651	50,354	Others
	45,937,485	16,313,898	
Bagian tidak lancar:			Non-current portion:
Pihak ketiga:			Third parties:
Uang muka kepada pemasok	-	25,347,913	Advances to suppliers
Dikurangi : penyisihan	(3,986,274)	(3,986,274)	Less: provision
	41,951,211	21,361,639	
Uang muka kepada pemasok:			Advances to suppliers:
Bagian lancar:			Current portion:
Pengangkutan dan logistik	54,164,382	14,272,917	Barging and logistics
Bahan bakar dan mobilisasi	659,399	659,399	Fuel and mobilisation
Lain - lain	591,760	1,028,091	Others
	55,415,541	15,960,407	
Bagian tidak lancar:			Non-current portion:
Pembelian peralatan tambang	-	16,815,225	Purchase of mining equipment
Pembangunan infrastruktur	-	8,532,688	Infrastructure construction
Dikurangi : penyisihan	(3,986,274)	(3,986,274)	Less : provision
	(3,986,274)	21,361,639	

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/44 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

9. PERSEDIAAN

9. INVENTORIES

	2016	2015	
Persediaan batubara	109,490,820	50,623,122	Coal inventory
Suku cadangan dan material	7,903,190	9,370,643	Spare parts and materials
Bahan bakar	2,305,260	2,581,785	Fuels
Bahan peledak	980,586	509,029	Explosives
	<u>120,679,856</u>	<u>63,084,579</u>	

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, Grup telah mencatat persediaan batubara pada biaya perolehan (2015: Nilai Realisasi Bersih).

Manajemen berpendapat bahwa semua persediaan pada tanggal pelaporan keuangan dapat digunakan atau dijual dan dalam kondisi baik, sehingga tidak diperlukan penyisihan untuk persediaan usang. Persediaan batubara dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, persediaan tidak diasuransikan karena manajemen Grup berpendapat bahwa biaya dan premi asuransi yang berlaku tidak sepadan dengan manfaat yang dapat diperoleh. Manajemen Grup menyadari risiko yang dapat timbul akibat tidak adanya asuransi yang bersangkutan.

**10. BIAYA EKSPLORASI DAN PENGEMBANGAN
YANG DITANGGUHKAN**

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, beban amortisasi sejumlah AS\$3.995.964 (2015: AS\$3.995.964) dibebankan ke laporan laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 manajemen berpendapat tidak terdapat penurunan nilai pada biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan.

**10. DEFERRED EXPLORATION AND DEVELOPMENT
EXPENDITURE**

During the year ended 31 December 2016, amortisation amounting to US\$3,995,964 (2015: US\$3,995,964) was charged to profit or loss.

As at 31 December 2016 and 2015, management believes that there is no impairment of deferred exploration and development expenditure.

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/45 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

**10. BIAYA EKSPLORASI DAN PENGEMBANGAN
YANG DITANGGUHKAN (lanjutan)**

**10. DEFERRED EXPLORATION AND DEVELOPMENT
EXPENDITURE (continued)**

	2016	2015	
Biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan sehubungan dengan area yang telah mencapai tahap produksi komersial-Blok Kohong:			<i>Deferred exploration and development expenditure related to commercially producing area Kohong Block:</i>
Nilai tercatat	124,512,269	124,480,994	<i>Carrying amount</i>
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Akumulasi amortisasi	<u>(28,949,278)</u>	<u>(24,953,314)</u>	<i>Accumulated amortisation</i>
Nilai tercatat	95,562,991	99,527,680	<i>Carrying amount</i>
Biaya eksplorasi yang ditangguhkan sehubungan dengan area yang belum mencapai tahap produksi secara komersial:			<i>Deferred exploration expenditure incurred for areas which have not reached the stage of commercial production:</i>
Nilai tercatat - saldo awal:			<i>Carrying amount – beginning balance:</i>
Blok New Kohong	15,312,836	15,312,836	<i>New Kohong block</i>
Blok Telakon	5,303,525	5,303,525	<i>Telakon block</i>
Penambahan:			<i>Additions:</i>
Blok New Kohong	-	-	<i>New Kohong block</i>
Blok Telakon	-	-	<i>Telakon block</i>
Nilai tercatat - saldo akhir:			<i>Carrying amount - ending balance:</i>
Blok New Kohong	15,312,836	15,312,836	<i>New Kohong block</i>
Blok Telakon	<u>5,303,525</u>	<u>5,303,525</u>	<i>Telakon block</i>
	<u>20,616,361</u>	<u>20,616,361</u>	
	<u>116,179,352</u>	<u>120,144,041</u>	

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/46 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

11. ASET TETAP

11. FIXED ASSETS

2016					
	Saldo awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Transfer/ Transfer	Saldo akhir/ Ending Balance
Harga perolehan					
<i>Kepemilikan langsung:</i>					
Bangunan	5,111,663	-	-	-	5,111,663
Infrastruktur	222,922,430	-	-	-	222,922,430
Peralatan dan perlengkapan kantor	5,110,500	4,768	-	-	5,115,268
Kendaraan	657,813	39,428	-	-	697,241
Alat berat	255,748,523	-	(10,507,583)	-	245,240,940
	489,550,929	44,196	(10,507,583)	-	479,087,542
<i>Aset sewa pembiayaan:</i>					
Alat berat	155,178,803	-	-	-	155,178,803
Kendaraan	-	-	-	-	-
Aset dalam penyelesaian	46,404,059	-	-	-	46,404,059
	691,133,791	44,196	(10,507,583)	-	680,670,404
<i>Akumulasi penyusutan</i>					
<i>Kepemilikan langsung:</i>					
Bangunan	(5,099,423)	-	-	-	(5,099,423)
Infrastruktur	(60,123,916)	(5,574,367)	-	-	(65,698,283)
Peralatan dan perlengkapan kantor	(4,899,572)	(5,465,771)	-	-	(10,365,343)
Kendaraan	(644,853)	(8,369)	-	-	(653,221)
Alat berat	(201,941,231)	(8,618,026)	10,886,138	-	(199,673,120)
	(272,708,995)	(19,666,533)	10,886,138	-	(281,489,390)
<i>Aset sewa pembiayaan:</i>					
Alat berat	(124,869,405)	(6,857,277)	-	-	(131,726,682)
Kendaraan	-	-	-	-	-
	(397,578,400)	(26,523,809)	10,886,138	-	(413,216,072)
Nilai buku bersih	293,555,391				267,454,332
					Net book value

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/47 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

11. ASET TETAP (lanjutan)

11. FIXED ASSETS (continued)

	2015				
	Saldo awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Disposals</i>	Transfer/ <i>Transfer</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>
Harga perolehan					
<i>Kepemilikan langsung:</i>					
Bangunan	5,111,663	-	-	-	5,111,663
Infrastruktur	222,922,430	-	-	-	222,922,430
Peralatan dan perlengkapan kantor	3,778,804	1,331,696	-	-	5,110,500
Kendaraan	2,729,768	-	(2,071,955)	-	657,813
Alat berat	258,634,361	-	(2,885,838)	-	255,748,523
	493,177,026	1,331,696	(4,957,793)	-	489,550,929
<i>Aset sewa pembiayaan:</i>					
Alat berat	177,949,276	-	(22,770,473)	-	155,178,803
Kendaraan	1,068,815	-	(1,068,815)	-	-
Aset dalam penyelesaian	46,432,899	-	(28,840)	-	46,404,059
	718,628,016	1,331,696	(28,825,921)	-	691,133,791
Akumulasi penyusutan					
<i>Kepemilikan langsung:</i>					
Bangunan	(5,099,423)	-	-	-	(5,099,423)
Infrastruktur	(47,622,993)	(26,793,745)	14,292,822	-	(60,123,916)
Peralatan dan perlengkapan kantor	(3,280,025)	(1,619,547)	-	-	(4,899,572)
Kendaraan	(2,414,217)	-	1,769,364	-	(644,853)
Alat berat	(179,125,094)	(37,108,960)	14,292,823	-	(201,941,231)
	(237,541,752)	(65,522,252)	30,355,009	-	(272,708,995)
<i>Aset sewa pembiayaan:</i>					
Alat berat	(95,468,134)	(29,401,271)	-	-	(124,869,405)
Kendaraan	(76,907)	-	76,907	-	-
	(333,086,793)	(94,923,523)	30,431,916	-	(397,578,400)
Nilai buku bersih	<u>385,541,223</u>				<u>293,555,393</u>
					<i>Net book value</i>

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expenses were allocated as follows:

	2016	2015
Beban pokok penjualan	26,497,646	65,522,252
Beban umum dan administrasi	26,163	128,274
	<u>26,523,809</u>	<u>65,650,526</u>

*Cost of goods sold
General and administrative
expenses*

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/48 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

11. ASET TETAP (lanjutan)

Manajemen telah melakukan pengkajian kembali atas estimasi umur ekonomis dan nilai sisa di akhir periode. Tidak ada perubahan yang signifikan diperlukan dari pengkajian ini.

Perhitungan kerugian atas pelepasan aset tetap adalah sebagai berikut:

	2016	2015	
Harga perolehan	10,507,583	4,957,792	Acquisition costs
Akumulasi penyusutan	<u>(10,507,583)</u>	<u>(2,280,065)</u>	Accumulated depreciation
Nilai buku aset tetap	-	2,677,727	Carrying value of fixed assets
Penerimaan dari pelepasan aset Tetap	<u>526,938</u>	<u>(1,672,564)</u>	Proceeds from disposal of fixed assets
Kerugian atas pelepasan aset Tetap	<u>526,938</u>	<u>1,005,163</u>	Loss on disposal of fixed assets

Aset dalam penyelesaian merupakan proyek-proyek yang masih dalam tahap konstruksi pada akhir periode pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

	2016	Persentase penyelesaian/ % of completion	Estimasi Penyelesaian/ Estimated completion date
Tempat tinggal, kantor dan prasarana/ <i>Mine camp, offices and facilities</i>	18,932,857	95%	Desember/December 2016
Pelabuhan dan lapangan terbang/ <i>Port and airstrip</i>	5,290,062	75%	Desember/December 2016
Alat berat/Heavy equipment	<u>22,181,141</u>	95%	Desember/December 2016
	<u>46,404,060</u>		

	2015	Persentase penyelesaian/ % of completion	Estimasi Penyelesaian/ Estimated completion date
Tempat tinggal, kantor dan prasarana/ <i>Mine camp, offices and facilities</i>	18,932,857	95%	Desember/December 2016
Pelabuhan dan lapangan terbang/ <i>Port and airstrip</i>	5,290,062	75%	Desember/December 2016
Alat berat/Heavy equipment	<u>22,181,141</u>	95%	Desember/December 2016
	<u>46,404,060</u>		

Proyek-proyek tersebut dimulai di tahun sebelumnya sebagai fasilitas pendukung terkait peningkatan kapasitas produksi. Sebagian besar alat berat dalam konstruksi terdiri dari peralatan impor yang belum dikonstruksi atau alat berat yang masih dalam instalasi di lokasi tambang.

11. FIXED ASSETS (continued)

Management has reassessed the estimated economic lives and residual values at period-end. There is no significant change necessary from this review.

The calculation of losses on disposals of fixed assets was as follows:

	2016	2015	
Harga perolehan	10,507,583	4,957,792	Acquisition costs
Akumulasi penyusutan	<u>(10,507,583)</u>	<u>(2,280,065)</u>	Accumulated depreciation
Nilai buku aset tetap	-	2,677,727	Carrying value of fixed assets
Penerimaan dari pelepasan aset Tetap	<u>526,938</u>	<u>(1,672,564)</u>	Proceeds from disposal of fixed assets
Kerugian atas pelepasan aset Tetap	<u>526,938</u>	<u>1,005,163</u>	Loss on disposal of fixed assets

Construction-in-progress represents projects which were still under construction at the end of the reporting period as follows:

	2016	Persentase penyelesaian/ % of completion	Estimasi Penyelesaian/ Estimated completion date
Tempat tinggal, kantor dan prasarana/ <i>Mine camp, offices and facilities</i>	18,932,857	95%	Desember/December 2016
Pelabuhan dan lapangan terbang/ <i>Port and airstrip</i>	5,290,062	75%	Desember/December 2016
Alat berat/Heavy equipment	<u>22,181,141</u>	95%	Desember/December 2016
	<u>46,404,060</u>		

These projects were initiated during past years as supporting facilities in order to increase the production capacity. Heavy equipment under construction mostly comprises imported equipment yet to be constructed, en route or heavy equipment under commissioning at the site.

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/49 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

11. ASET TETAP (lanjutan)

Manajemen tidak melihat adanya peristiwa yang akan menghambat penyelesaian aset dalam penyelesaian.

Harga perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan pada tanggal dan 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

	2016	2015	
Alat berat	121,444,956	179,018,093	<i>Heavy equipment</i>
Bangunan	19,081,054	4,053,275	<i>Buildings</i>
Kendaraan	703,925	657,813	<i>Vehicles</i>
Peralatan dan perlengkapan			
Kantor	3,177,775	5,102,849	<i>Office furniture and equipment</i>
	<u>144,407,710</u>	<u>188,832,030</u>	

Pada tanggal 31 Desember 2016 and 2015, seluruh aset tetap Grup telah diasuransikan atas *property all risks*, kerusakan mesin, gangguan usaha, kerusakan yang material, liabilitas umum komprehensif, liabilitas operasi terminal, dan kerusakan atas peralatan dan kendaraan sampai dengan AS\$334 juta (2015: AS\$334 juta).

Semua aset tetap di atas dimiliki Grup secara sah dan didukung bukti kepemilikan yang memadai. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, aset tetap yang merupakan kepemilikan langsung dijaminkan untuk fasilitas pinjaman jangka panjang (Catatan 16a).

11. FIXED ASSETS (continued)

Management has no reason to believe that any event may occur that would prevent completion of the construction in progress.

Fixed assets acquisition costs which have been fully depreciated and still in use as at 31 December 2016 and 2015 are as follows:

	2016	2015	
Alat berat	121,444,956	179,018,093	<i>Heavy equipment</i>
Bangunan	19,081,054	4,053,275	<i>Buildings</i>
Kendaraan	703,925	657,813	<i>Vehicles</i>
Peralatan dan perlengkapan			
Kantor	3,177,775	5,102,849	<i>Office furniture and equipment</i>
	<u>144,407,710</u>	<u>188,832,030</u>	

As at 31 December 2016 and 2015, the Group's fixed assets were insured for property all risks, machinery breakdown, business interruption, material damage, comprehensive general liabilities, terminal operations liability and equipment and vehicle breakdown for an amount up to US\$334 million million (2015: US\$334 million).

All assets are owned by the Group legally and supported by sufficient evidence of ownership. As at 31 December 2016 and 2015, direct acquired fixed assets were pledged to a long-term borrowing facility (Note 16a).

12. PROPERTI PERTAMBANGAN

	2016	2015	
Harga perolehan	172,925,459	172,925,459	Acquisition costs
Akumulasi amortisasi			Accumulated amortisation
Saldo awal	(29,748,096)	(26,315,842)	<i>Beginning balance</i>
Amortisasi	(3,432,254)	(3,432,254)	<i>Amortisation</i>
Nilai tercatat	<u>139,745,109</u>	<u>143,177,363</u>	Carrying Value

Properti pertambangan merupakan penyesuaian nilai wajar yang diperoleh dari akuisisi AKT.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai inti properti pertambangan.

12. MINING PROPERTIES

Mining properties represent the fair value adjustments derived from AKT's acquisition.

As at 31 December 2016 and 2015 value of management believes that there is no impairment of the intrinsic value of mining properties.

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/50 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

**13. INVESTASI PADA PENGENDALIAN BERSAMA
ENTITAS**

**13. INVESTMENTS IN JOINTLY CONTROLLED
ENTITIES**

	2016	2015	
Pada awal tahun	-	21,834,437	<i>At beginning of the year</i>
Penerimaan dividen	-	(45,942,685)	<i>Dividend receive</i>
Bagian kerugian bersih tahun berjalan	-	(19,207,446)	<i>Share of net loss for the year</i>
Bagian kerugian komprehensif lain	-	-	<i>Share of other comprehensive loss</i>
Rugi penurunan nilai	-	43,315,694	<i>Impairment loss</i>
Pada akhir tahun	-	-	<i>At the end of the year</i>

Pada akhir tahun 2015 Grup telah menjual seluruh saham sebelumnya dimiliki di ARM plc. ARM plc dikeluarkan dari Bursa Efek London pada Agustus 2015.

By the end of 2015 the Group had sold all shares previously held in ARM plc. ARM plc delisted from the London Stock Exchange in August 2015.

14. UTANG USAHA

14. TRADE PAYABLES

	2016	2015	
Pihak ketiga:			<i>Third parties:</i>
Dolar AS	4,643,779	392,109,230	<i>US Dollars</i>
Rupiah	-	16,647,826	<i>Rupiah</i>
Lain-lain	-	1,662,387	<i>Others</i>
	4,643,779	410,419,443	

Utang usaha berasal dari pembelian barang dan jasa.

Trade payables are from purchases of supplies and services.

Seluruh saldo utang usaha pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 timbul dari transaksi dengan pihak ketiga.

All trade payables balances as at 31 December 2016 and 2015 arise from transactions with third parties.

15. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

15. ACCRUED EXPENSES

	2016	2015	
Bunga dan beban keuangan lainnya	34,977	12,167,635	<i>Interest and other finance costs</i>
Royalti	7,530,052	7,530,052	<i>Royalty</i>
Lain-lain	5,821,674	29,293,014	<i>Others</i>
	13,386,703	48,990,701	

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/51 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

16. PINJAMAN

a. Pinjaman jangka panjang

	2016	2015	
Dolar AS			US Dollars
Standard Chartered Bank	770,990,543	810,933,228	Standard Chartered Bank
	<u>770,990,543</u>	<u>810,933,228</u>	
Dikurangi:			Less:
Biaya keuangan yang belum diamortisasi	(10,170,230)	(10,170,228)	<i>Unamortised financing cost</i>
	<u>760,820,313</u>	<u>800,763,000</u>	
Dikurangi:			Less:
Bagian lancar	760,820,313	800,763,000	<i>Current portion</i>
Bagian jangka panjang	<u>-</u>	<u>-</u>	<i>Non-current portion</i>

SCB

Pada tanggal 11 Januari 2012, Perusahaan menandatangani fasilitas pinjaman berjangka dengan SCB senilai AS\$1 miliar untuk pendanaan akuisisi tidak langsung atas ARM plc melalui akuisisi 51% kepemilikan saham Borneo Bumi dan 49% kepemilikan saham Bumi Borneo dari LHHL dan BNBR.

Fasilitas ini bertenor 60 bulan, dengan jadwal pembayaran kembali secara triwulan dimulai sejak 30 September 2012. Tingkat bunga atas fasilitas ini adalah 5,65% di atas LIBOR untuk kreditur luar negeri dan 6,15% di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri.

Fasilitas pinjaman ini dijamin, antara lain, dengan saham-saham entitas anak yang dimiliki Perusahaan dan aset-aset AKT dan BMS ("Penjamin").

Berpegang pada ketentuan pada perjanjian pinjaman berjangka, Grup membuka beberapa akun bank di dalam dan luar negeri pada bank-bank yang telah ditentukan. Dengan beberapa pengecualian terbatas tertentu, seluruh penerimaan kas Perusahaan dan Penjamin, termasuk seluruh pendapatan atas penjualan batubara AKT, disimpan pada akun-akun yang telah ditentukan dan digunakan untuk mendanai pembayaran beban operasi, pajak, dan pengeluaran modal Perusahaan dan Penjamin yang dianggarkan, digunakan sebagai *debt service* dan *debt service reserves* seperti diwajibkan dalam perjanjian fasilitas pinjaman.

16. BORROWINGS

a. Long-term borrowings

	2016	2015	
US Dollars			
Standard Chartered Bank	810,933,228	770,990,543	Standard Chartered Bank
	<u>810,933,228</u>	<u>770,990,543</u>	
Dikurangi:			Less:
Biaya keuangan yang belum diamortisasi	(10,170,228)	(10,170,230)	<i>Unamortised financing cost</i>
	<u>800,763,000</u>	<u>760,820,313</u>	
Dikurangi:			Less:
Bagian lancar	800,763,000	760,820,313	<i>Current portion</i>
Bagian jangka panjang	<u>-</u>	<u>-</u>	<i>Non-current portion</i>

SCB

On 11 January 2012, the Company signed a term facility agreement with SCB amounting to US\$1 billion for the purpose of funding the indirect acquisition of ARM plc through the acquisition of 51% of the equity shares of Borneo Bumi and 49% of the equity shares of Bumi Borneo from LHHL and BNBR.

This facility has a tenor of 60 months, and is repayable on a quarterly basis commencing from 30 September 2012. The loan bears interest at 5.65% above LIBOR for offshore lenders and 6.15% above LIBOR for onshore lenders.

This loan facility was collateralised by, among others, the Company's shares in subsidiaries and AKT's and BMS' assets (the "Guarantors").

Under the provisions of the term facility agreement, the Group established a series of domestic and offshore bank accounts with designated banks. With certain limited exceptions, all of the cash receipts of the Company and the Guarantors, including all the coal sales revenues of AKT, were deposited into designated accounts and applied to fund payment of budgeted operating expenses, taxes and capital expenditures of the Company and the Guarantors, to debt service and required debt service reserves under the loan facility agreement.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

16. PINJAMAN (lanjutan)

Perjanjian ini juga mengatur ketentuan mengenai alokasi penggunaan kelebihan kas setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember, dimana 50% dari kelebihan kas ini akan digunakan untuk pembayaran lebih awal dari fasilitas sedangkan sisa 50% lainnya dikembalikan ke Grup untuk pembayaran kegiatan operasional dan pembayaran lainnya, sesuai persyaratan yang berlaku.

Pinjaman ini memiliki persyaratan antara lain:

- Rasio utang terhadap EBITDA tidak lebih dari 3,5 kali di 2012, 3,0 kali di 2013, dan tidak lebih dari 2,5 kali mulai 1 Januari 2014;
- Rasio arus kas terhadap pembayaran bunga dan pokok tiap tahunnya tidak kurang dari 1,3 kali;
- Nilai kekayaan bersih berwujud tidak kurang dari AS\$800 juta; dan
- Total pengeluaran untuk belanja modal Grup, yang dananya diperoleh dari arus kas, tiap tahunnya tidak boleh melebihi AS\$35 juta, kecuali ketika menggunakan kas yang diperoleh dari 50% sisa kas yang menjadi bagian Grup.

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perusahaan tidak memenuhi beberapa persyaratan keuangan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian pinjaman, khususnya nilai kekayaan bersih berwujud Grup dibawah saldo minimum dan rasio utang terhadap EBITDA.

Karena pelanggaran klausul perjanjian ini, Standard Chartered Bank memiliki hak secara hukum untuk meminta pembayaran dari jumlah pinjaman yang masih belum dibayar.

Karena Perusahaan belum menerima pernyataan pembebasan dari kreditur pada tanggal atau sebelum 31 Desember 2016, saldo yang masih belum dibayar disajikan sebagai liabilitas jangka pendek.

Pada tahun 2015 penjualan saham ARM plc mengakibatkan SCB mengambil hasil (sebagai jaminan) dan menerapkan untuk pembayaran pinjaman (efektif melalui dividen Borneo Bumi).

ARM plc delisting pada bulan Agustus 2015 dan Perusahaan sudah tidak memiliki kepentingan lagi (Lihat juga catatan 13).

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

16. BORROWINGS (continued)

This agreement also governs the requirement to allocate any excess cash every 30 June and 31 December, pursuant to which 50% of the excess cash will be allocated as a prepayment of the facility and the remaining 50% will be returned to the Group to finance operational activities and other payments, subject to applicable covenants.

This borrowing imposes covenants such as:

- *Debt to EBITDA ratio not to exceed 3.5 times in 2012, 3.0 times in 2013, and shall not exceed 2.5 times from 1 January 2014;*
- *The ratio of cash flows to the payment of interest and principal each year not to be less than 1.3;*
- *Tangible net worth of at least US\$800 million; and*
- *The aggregate capital expenditure of the Group that is funded from cash flows, in each year shall not exceed US\$35 million, except when utilising cash from the Group's 50% share of any excess cash.*

As at 31 December 2016, the Company didn't comply with certain of the financial covenants as set out in the loan agreement, in particular the Group's tangible net worth position was below the minimum required balance and debt to EBITDA ratio.

Due to this covenant breach, Standard Chartered Bank was contractually entitled to request repayment of the outstanding loan amount.

As the Company had not receive any statement from the lenders regarding a waiver of the covenants at or before 31 December 2016, the outstanding balance was presented as a current liability.

In 2015 the sale of ARM plc shares resulted in SCB taking the proceeds (previously pledged) and applying them to prepayment of the loan (effectively via dividend from Borneo Bumi).

ARM plc delisted in August 2015 and the Company has no further interest therein (See also note 13).

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/53 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

16. PINJAMAN (lanjutan)

b. Pinjaman jangka pendek

Dolar AS	<u>2016</u>	<u>2015</u>	US Dollars
First Gulf Bank	-	<u>376,412,498</u>	First Gulf Bank

Pada tanggal 14 Desember 2011, AKT dan FGB menandatangani perjanjian fasilitas pre-ekspor yang kemudian diubah dengan perjanjian tertanggal 19 Desember 2011 dimana FGB menyediakan pinjaman pra-ekspor dengan nilai maksimum mencapai AS\$350 juta atau 85% dari nilai kontrak penjualan batubara ke Noble, mana yang lebih rendah. Fasilitas ini tersedia untuk ditarik selama tiga bulan sejak tanggal perjanjian. Tingkat bunga untuk fasilitas ini adalah sebesar LIBOR ditambah 2,75%.

Fasilitas ini dijaminkan dengan piutang usaha, persediaan batubara dan kontrak penjualan dengan Noble.

Perjanjian ini telah diubah beberapa kali untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian. Selanjutnya, periode perjanjian ini diperpanjang kembali (Lihat catatan 39a).

16. BORROWINGS (continued)

b. Short-term loan

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	US Dollars
	-	<u>376,412,498</u>	First Gulf Bank

On 14 December 2011, AKT and FGB entered into a pre-export facility agreement which was amended on 19 December 2011 where FGB provided pre-export financing with a maximum value of US\$350 million or 85% of the sales contract with Noble, whichever is lower. This facility is available for drawdown within three months starting from the date of the agreement. The interest rate for this facility is LIBOR plus 2.75%.

The facility is collateralised by trade receivables, coal inventory and the sales contract with Noble.

The agreement has been amended several times to extend the contract period. Subsequently, the period of the agreement was further extended (See note 39a).

17. UTANG SEWA PEMBIAYAAN

17. FINANCE LEASE PAYABLES

Pihak ketiga:	<u>2016</u>	<u>2015</u>	Third parties:
PT Komatsu Astra Finance	-	36,180,297	PT Komatsu Astra Finance
PT Caterpillar Finance Indonesia	-	5,399,458	PT Caterpillar Finance Indonesia
Marubeni Corporation	-	13,206,153	Marubeni Corporation
PT Mitra Pinasthika Mustika Finance	1,493,553	9,085,625	PT Mitra Pinasthika Mustika Finance
PT Marubeni Indonesia	-	7,734,834	PT Marubeni Indonesia
Lain-lain	<u>2,881,232</u>	<u>4,615,067</u>	Other
Jumlah utang sewa pembiayaan	4,374,785	76,221,434	Total finance lease payables
Dikurangi: Bagian lancar	<u>(1,493,553)</u>	<u>(1,512,155)</u>	Less: Current portion
Bagian tidak lancar	<u>2,881,232</u>	<u>74,709,279</u>	Non-current portion

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

17. UTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan)

Utang sewa pembiayaan tersebut di atas semuanya timbul akibat kontrak sewa pembiayaan untuk pengadaan alat-alat berat pertambangan baru dan transaksi jual dan sewa kembali.

Syarat-syarat dan ketentuan utama sewa pembiayaan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- Grup tidak dibenarkan untuk menjual, meminjamkan, menyewakan, menghapus, atau menghentikan pengendalian langsung atas aset sewa pembiayaan;
- Grup diwajibkan untuk mengasuransikan aset sewa pembiayaan selama jangka waktu sewa pembiayaan; dan
- Semua aset sewa pembiayaan dijadikan sebagai jaminan atas pembiayaan sewa pembiayaan yang bersangkutan.

Pada tanggal 31 Desember 2016, AKT tidak memenuhi persyaratan keuangan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian sewa. Selain itu terjadi beberapa peristiwa cidera janji yang salah satunya berupa keterlambatan pembayaran yang tidak sesuai dengan perjanjian sewa.

Kewajiban pembayaran minimum dimasa akan datang atas sewa pembiayaan berdasarkan perjanjian yang berlaku pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

	2016	2015	
Telah jatuh tempo	1,578,213	1,578,213	<i>Payable due</i>
Jatuh tempo kurang dari satu tahun	970,660	970,661	<i>Payable within one year</i>
Jatuh tempo lebih dari satu tahun namun kurang dari dua tahun	2,145,325	2,145,325	<i>Payable later than one year but less than two years</i>
Jatuh tempo lebih dari dua tahun	-	<u>71,828,048</u>	<i>Payable later than two years</i>
 Dikurangi:			
Beban bunga yang telah jatuh tempo	(203,446)	(194,146)	<i>Less: Interest due</i>
Beban bunga yang belum jatuh tempo	<u>(115,967)</u>	<u>(106,667)</u>	<i>Future financing charges</i>
Nilai kini pembayaran minimum utang sewa pembiayaan	<u>4,374,785</u>	<u>76,221,434</u>	<i>Present value of minimum finance lease payments</i>

17. FINANCE LEASE PAYABLES (continued)

The lease payables as listed above arose from the financial leases of new mining heavy equipment and sale-and-lease back transactions.

The significant general terms and conditions of the finance leases are as follows:

- the Group is restricted from selling, lending, leasing, or otherwise disposing of or ceasing to exercise direct control over the leased assets;
- the Group is required to insure the finance lease assets during the leasing period; and
- all leased assets are pledged as collateral for the underlying finance leases.

As at December 31, 2016 AKT was not in compliance with the financial covenants as set out in the lease agreements. In addition, there are several events of default, in particular late payment, that do not comply with the lease agreements.

The future minimum lease payments under the finance lease agreements outstanding at the reporting dates were as follows:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2016 AND 2015
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

**18. PENJADWALAN KEMBALI PEMBAYARAN
UTANG PT ASMIN KOALINDO TUHUP**

Pada bulan Januari 2016 AKT secara sukarela mengadakan suatu kegiatan restrukturisasi hutang secara formal (PKPU). Proses hukum tersebut menghasilkan Kesepakatan Penyelesaian Persetujuan Pengadilan yang menyetujui AKT untuk merestrukturisasi hutangnya:

- Masa tenggang dari pembayaran kembali diberikan antara 6 bulan dan 3 tahun sesuai dengan kelas kreditur yang berbeda (kecil sampai besar).
- Pelunasan hutang dan pembayaran kepada kreditur perdagangan ditangguhkan selama 1 sampai 9 tahun sesuai dengan kelas kreditur yang berbeda.
- Dikenakan bunga dengan tenggang waktu 2-4 tahun.
- Sejumlah AS\$60 juta dari hutang PT Artha Contractors disetujui untuk dikonversi menjadi 80% kepemilikan saham PT Asmin Koalindo Tuhup.

Kesepakatan Penyelesaian ini telah disetujui oleh Pengadilan Niaga Jakarta pada tanggal 4 April 2016 namun gugatan selanjutnya atas keputusan Pengadilan diluncurkan oleh Noble Resource International Pte. Ltd dan Standard Chartered Bank. Gugatan Noble Resource International Pte. Ltd ditarik pada bulan Juni 2016, dan gugatan Standard Chartered Bank diputuskan secara formal

Keputusan tertulis yang formal masih dalam proses pelepasan oleh Pengadilan, Administrator akan menyelesaikan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan legalisasi (hukum tetap). Kesepakatan Penyelesaian (periklanan di 2 surat kabar nasional dan pengumuman dalam Lembaran Negara).

Pada bulan Mei 2018 AKT mulai melakukan pembayaran kepada kreditur kecil, sesuai dengan percepatan penyelesaian PKPU.

**18. RESCHEDULING OF PT ASMIN KOALINDO
TUHUP'S DEBT PAYMENT**

In January 2016, AKT voluntarily entered into a formal debt restructuring (PKPU) activity. The legal process resulted in a Court Approved Settlement Agreement which allowed the AKT to restructure its debt:

- A grace period from any repayments was granted of between 6 months and 3 years according to the different classes of creditors (small to large).
- Repayments of debt and payments to trade creditors were deferred over 1 to 9 years according to the different classes of creditors.
- Interest grace periods of 2-4 years were granted.
- Some US\$60 million of PT Artha Contractors debt was approved to be converted into 80% ownership of the share capital of PT Asmin Koalindo Tuhup.

The Settlement Agreement was approved by the Commercial Court of Jakarta on 4 April 2016 however subsequent challenges to the Court's decision were launched by Noble Resources International Pte. Ltd and Standard Chartered Bank. Noble's challenge was withdrawn in June 2016, and the SCB challenge was formally rejected in October 2017.

The formal written decision by the Court has been received and the Administrator has completed the steps required to finalise the legalisation (hukum tetap) of the Settlement Agreement (advertising in 2 national newspapers and announcement in the State Gazette).

In May 2018 AKT commenced making payments to small creditors, pursuant to the PKPU settlement agreement.

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/56 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

18. PENJADWALAN KEMBALI PEMBAYARAN UTANG PT ASMIN KOALINDO TUHUP (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2016 saldo kewajiban PKPU sebagai berikut :

18. RESCHEDULING OF PT ASMIN KOALINDO TUHUP'S DEBT PAYMENT (continued)

In December 31, 2016 the balance of PKPU liabilities was as follows:

	2016	2015	
First gulf bank Cabang singapura SPM	376,412,498	-	First Gulf Bank- Singapore Branch SPM
Artha Contractor	98,542,650	-	PT Artha Contractor
PT Komatsu Astra Finance	87,352,370	-	PT Komatsu Astra Finance
Marubeni Corporation	36,180,297	-	Marubeni Corporation
PT Marubeni Indonesia	13,206,153	-	PT Marubeni Indonesia
Mitra Pinastika Mustika Finance/ANZ	7,734,834	-	Mitra Pinastika Mustika Finance/ANZ
Graha Lintas Property	7,573,470	-	Graha Lintas Property
PT Caterpillar Finance Indonesia	6,172,807	-	PT Caterpillar Finance Indonesia
PT Indomobil Finance Indonesia	5,399,458	-	PT Indomobil Finance Indonesia
Pihak ketiga	1,733,835	-	Third party
Jumlah	173,509,160	-	Total
	813,817,532	-	

19. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar dimuka

19. TAXATION

a. Prepaid taxes

	2016	2015	
Perusahaan			The Company
Pajak penghasilan badan	-	1,286,162	Corporate income tax
Pajak Pertambahan Nilai	90,404	-	Value Added Tax
	90,404	1,286,162	
Entitas anak			Subsidiaries
Pajak Pertambahan Nilai	10,925	60,531,143	Value Added Tax
Pajak penghasilan badan	-	8,433,799	Corporate income tax
Pajak dibayar dimuka untuk naik banding atas surat ketetapan pajak (Catatan 19e)	46,346,589	-	Prepaid tax from tax Assessment appeal (Note 19e)
	46,346,589	-	
	46,357,514	68,964,942	
Jumlah	46,447,918	70,251,104	Total
Dikurangi:			Less:
Bagian lancar			Current portion
Pajak Penghasilan Badan	-	9,719,961	Corporate income tax
Pajak dibayar dimuka untuk naik banding atas surat ketetapan pajak (Catatan 18e)	46,447,918	-	Prepaid tax from tax assessment appeal (Note 18e)
	46,447,918	9,719,961	
Bagian tidak lancar	-	60,531,143	Non-current portion

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/57 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Utang pajak

	2016	2015	
Utang pajak penghasilan			
Badan			
Perusahaan			
Entitas anak			
- 2011	-	4,374,936	2011 -
Entitas anak			
Pajak Pertambahan Nilai			
Pasal 4(2)	7,592	3,694	<i>Corporate income taxes payable</i>
Pasal 21	7	240,679	<i>The Company</i>
Pasal 23/26	227	12,075,416	<i>Subsidiaries</i>
	7,826	12,319,789	<i>Article 4(2)</i>
Utang pajak lainnya			
Perusahaan			
Pasal 4(2)	7,592	3,694	<i>Article 21</i>
Pasal 21	7	240,679	<i>Article 23/26</i>
Pasal 23/26	227	12,075,416	<i>Article 25</i>
	7,826	12,319,789	
Entitas anak			
Pajak Pertambahan Nilai			
Pasal 4(2)	-	68,315,826	<i>Subsidiaries</i>
Pasal 21	-	1,468,999	<i>Value Added Tax</i>
Pasal 23/26	-	3,255,274	<i>Article 4(2)</i>
Pasal 25	-	9,015,510	<i>Article 21</i>
	-	83,658,774	<i>Article 23/26</i>
	7,826	95,978,563	<i>Article 25</i>

c. (Manfaat)/beban pajak penghasilan

c. Income tax (benefit)/expense

	2016	2015	
Perusahaan			
Kini	-	-	<i>The Company</i>
Tangguhan	1,389,383	(1,100,188)	<i>Current</i>
	1,389,383	(1,100,188)	<i>Deferred</i>
Entitas anak			
Kini	-	-	<i>Subsidiaries</i>
Tangguhan	23,736,756	(73,279,422)	<i>Current</i>
	23,736,756	(73,279,422)	<i>Deferred</i>
Konsolidasi			
Kini	-	-	<i>Consolidated</i>
Tangguhan	25,126,139	(74,379,610)	<i>Current</i>
	25,126,139	(74,379,610)	<i>Deferred</i>

Perhitungan atas (manfaat)/beban pajak penghasilan badan kini adalah sebagai berikut:

The calculation of current corporate income tax (benefit)/expense is as follows:

	2016	2015	
Rugi konsolidasian sebelum pajak penghasilan	184,061,313	(327,404,397)	<i>Consolidated loss before income tax</i>
Rugi sebelum pajak penghasilan – entitas anak	(184,451,597)	300,785,160	<i>Loss before income tax subsidiaries</i>
Penyesuaian akibat eliminasi konsolidasian	31,380,990	(45,872,257)	<i>Adjusted for consolidation eliminations</i>
Rugi sebelum pajak penghasilan – Perusahaan	30,990,706	(72,491,494)	<i>Loss before income tax - the Company</i>

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/58 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

19. TAXATION (continued)

	2016	2015	
Perbedaan tetap:			<i>Permanent differences:</i>
Rugi dari investasi pada pengendalian bersama entitas	-	19,207,446	<i>Loss from investments in jointly controlled entities</i>
Penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan Final	(675)	(2,902)	<i>Income subject to final income tax</i>
Rugi/(laba) dari investasi pada anak perusahaan	(27,948,736)	86,805,893	<i>Loss/(income) from investment in subsidiaries</i>
Beban yang tidak dapat dikurangkan menurut pajak	2,444,872	86,846,688	<i>Non-deductible expenses</i>
Perbedaan temporer:			<i>Temporary differences:</i>
Perbedaan antara nilai buku aset tetap akuntasi dan pajak	(41,322)	42,097	<i>Difference between commercial and tax value of fixed assets</i>
Perbedaan antara nilai buku biaya keuangan yang ditangguhkan akuntansi dan Pajak	(5,687,953)	4,482,275	<i>Difference between commercial and tax net book value of deferred financing costs</i>
Rugi kadaluwarsa		(124,766,384)	<i>Expired loss</i>
Penyisihan imbalan karyawan	<u>171,738</u>	<u>(123,619)</u>	<i>Provision for employee benefits</i>
	<u>(31,062,076)</u>	<u>72,491,494</u>	
Rugi pajak - Perusahaan	(71,370)	-	<i>Fiscal loss - the Company</i>
Rugi pajak yang dikompensasi dari masa pajak sebelumnya	-	-	<i>Tax loss carried forward</i>
Pajak penghasilan kini			<i>Current income tax</i>
- Perusahaan	-	-	<i>Company -</i>
- Entitas anak	-	-	<i>Subsidiaries -</i>
Pajak penghasilan kini-konsolidasian	<u>-</u>	<u>-</u>	<i>Consolidated current income tax expense</i>
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Pembayaran pajak dimuka			<i>Prepaid taxes</i>
- Entitas anak	-	-	<i>Subsidiaries -</i>
Kurang bayar pajak penghasilan badan konsolidasi	<u>-</u>	<u>-</u>	<i>Consolidated income tax under payment</i>

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/59 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

Pajak atas rugi Grup konsolidasi sebelum pajak berbeda dari nilai teoritis yang mungkin muncul apabila menggunakan rata-rata tertimbang tarif pajak yang berlaku atas rugi/laba masing-masing entitas anak yang dikonsolidasi dalam jumlah sebagai berikut:

	2016	2015	
Rugi konsolidasian sebelum pajak penghasilan	184,061,313	(327,404,397)	<i>Consolidated loss before income tax</i>
Pajak dihitung dengan tarif pajak efektif	46,015,328	(93,319,164)	<i>Tax calculated at effective tax rate</i>
Dampak pajak penghasilan dari:			<i>Income tax effects from:</i>
- Penghasilan tidak kena pajak	(30,655,569)	(3,549)	<i>Income not subject to tax-</i>
- Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak	(1,903,290)	48,144,838	<i>Non-deductible expenses- Adjustment to deferred- tax assets</i>
- Penyesuaian aset pajak tangguhan	11,669,670	(29,201,735)	<i>Unrecognised deferred- tax assets</i>
- Aset pajak tangguhan yang tidak diakui	-	-	<i>Income tax (benefit)/ expenses</i>
(Manfaat)/beban pajak penghasilan	25,126,139	(74,379,610)	

Pajak penghasilan kini untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 dihitung berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak. Jumlah tersebut disesuaikan dengan jumlah yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak ("SPT") pada saat SPT selesai disusun dan dilaporkan kepada Direktorat Jendral Pajak ("DJP"), atau ketika keberatan/banding diputuskan.

The current income tax for the periods ended 31 December 2016 and 2015 was based on estimated taxable income. The amount may be subject to adjustments to conform with the related annual tax return when it is prepared and filed with the Directorate General of Taxation ("DGR"), or when an assessment by the DGT is received, or if an objection/appeal is decided.

d. Aset dan liabilitas pajak tangguhan

Seluruh aset pajak tangguhan diperkirakan hanya akan dapat dipulihkan setelah dua belas bulan.

Analisis liabilitas pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

	2016	2015	
Liabilitas pajak tangguhan:			<i>Deferred tax liabilities:</i>
- Liabilitas pajak tangguhan yang akan dipulihkan setelah 12 bulan	(1,390,993)	(1,609)	<i>Deferred tax liabilities- to be recovered after more than 12 month</i>
- Liabilitas pajak tangguhan yang akan dipulihkan dalam 12 bulan	-	-	<i>Deferred tax liabilities - to be recovered within 12 months</i>
	(1,390,993)	(1,609)	

Rincian dan mutasi aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan selama periode berjalan adalah sebagai berikut:

d. Deferred tax assets and liabilities

All of the deferred tax assets are only expected to be recovered after more than twelve months.

The analysis of deferred tax liabilities is as follows:

The detail and movement in deferred income tax assets and liabilities during the periods is as follows:

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/60 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

19. TAXATION (continued)

	2016	2015	
Rugi fiskal yang diakui	142,048,476	157,412,142	<i>Fiscal loss recognized</i>
Penyisihan imbalan karyawan	584,326	495,277	<i>Provision for employee benefits</i>
Penyisihan reklamasi tambang dan penutupan tambang	517,652	517,652	<i>Provision for mine reclamation and mine closure</i>
Perbedaan antara nilai buku aset tetap akuntansi dan pajak	(11,186,413)	(2,985,967)	<i>Difference between accounting and tax net book value of fixed assets</i>
Perbedaan aset tetap sewa pembiayaan dan ansuran sewa	29,583,695	27,890,020	<i>Difference in fixed assets under leases and lease instalments</i>
Perbedaan nilai buku biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan antara akuntansi dan pajak	(15,761,249)	(13,765,825)	<i>Difference between accounting and tax net book value of deferred exploration and development expenditure</i>
Aset pajak tangguhan yang tidak diakui	-	-	<i>Unrecognised deferred tax assets</i>
Lain-lain	(419,079)	(459,137)	<i>Other</i>
	145,367,408	169,104,162	
Aset pajak tangguhan pada awal periode	169,104,162	95,824,741	<i>Deferred tax assets at the beginning of the period</i>
Dikreditkan pada laporan laba rugi	(23,736,754)	73,279,421	<i>Credited to the profit or loss</i>
Aset pajak tangguhan pada akhir periode	145,367,408	169,104,162	<i>Deferred tax assets at the end of the period</i>

Liabilitas pajak tangguhan

Deferred tax liabilities

	2016	2015	
Rugi fiskal yang dibawa ke masa Depan	-	-	<i>Tax loss carried forward</i>
Penyisihan imbalan karyawan	(133,588)	(90,654)	<i>Provision for employee benefits</i>
Penyisihan reklamasi tambang dan penutupan tambang	-	-	<i>Provision for mine reclamation and mine closure</i>
Perbedaan nilai buku akuntansi dan pajak atas aset tetap	(30,116)	(40,446)	<i>Difference between accounting and tax net book value of fixed assets</i>
Perbedaan nilai buku akuntansi dan pajak atas biaya keuangan yang ditangguhkan	1,554,697	132,709	<i>Difference between accounting and tax net book value of deferred financing costs</i>
Lain-lain	-	-	<i>Others</i>
	1,390,993	1,609	
Liabilitas pajak tangguhan pada awal periode	1,609	1,101,797	<i>Deferred tax liabilities at the beginning of the period</i>
(Dikreditkan)/dibebankan pada laporan laba rugi	1,389,384	(1,100,188)	<i>(Credited)/charged to the profit or loss</i>
Liabilitas pajak tangguhan pada akhir periode	1,390,993	1,609	<i>Deferred tax liabilities at the end of the period</i>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

Rugi fiskal Grup yang dibawa ke masa depan, yang dapat dikompensasikan dengan penghasilan kena pajak di masa mendatang selama delapan tahun, untuk AKT, terjadi di tahun fiskal berikut:

Entitas/ <i>Entity</i>	Tahun Fiskal/ <i>Fiscal year</i>	Tahun terakhir berlaku/ <i>Expiration year</i>	Jumlah/ <i>Amount</i>
AKT	2013	2021	148,251,326
	2014	2022	194,701,384
	2015	2023	286,695,859
BMS	2016	2021	9,980,471
BLEM	2016	2021	50,279,663

e. Surat ketetapan pajak

Pada 2015, BLEM menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) terkait Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) untuk tahun fiskal 2012. Tuntutan BLEM ditolak dan banding diajukan ke Pengadilan Pajak. BLEM mengajukan banding dikarenakan lebih bayar sebesar Rp16.945.876.703 atau setara dengan AS\$1.278.194. DJP telah mengajukan peninjauan atas putusan Pengadilan Pajak dan menunggu hasil keputusan tersebut.

DJP mengeluarkan perintah pemeriksaan untuk tahun pajak 2011 dan pemeriksaan menghasilkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas beberapa pajak, sebagai berikut:

- hutang pajak penghasilan Badan untuk tahun fiskal 2011 sebesar AS\$43.078.625;
- hutang pajak penghasilan Pasal 4 (2) untuk tahun fiskal 2011 sebesar Rp6.286.048.448;
- hutang pajak penghasilan Pasal 15 untuk tahun fiskal 2011 sebesar Rp2.423.651.611;
- hutang pajak penghasilan Pasal 23 untuk tahun fiskal 2011 sebesar Rp121.542.484.096;
- 26 liabilitas pajak penghasilan untuk tahun fiskal 2011 sebesar Rp87.000.504.026;
- hutang pajak pertambahan nilai (pajak) untuk tahun pajak 2011 sebesar Rp104.803.546.996;
- hutang pajak pertambahan nilai (WABA) untuk tahun fiskal 2011 sebesar Rp400.836.598.137; dan
- hutang pajak pertambahan nilai (JLN) untuk tahun fiskal 2011 sebesar Rp40.312.868.561.

19. TAXATION (continued)

The Group's tax losses carried forward, which can be offset against future taxable income for up to eight years, in the case of AKT, were incurred in the following fiscal years:

Entitas/ <i>Entity</i>	Tahun Fiskal/ <i>Fiscal year</i>	Tahun terakhir berlaku/ <i>Expiration year</i>	Jumlah/ <i>Amount</i>
AKT	2013	2021	148,251,326
	2014	2022	194,701,384
	2015	2023	286,695,859
BMS	2016	2021	9,980,471
BLEM	2016	2021	50,279,663

e. Tax assessment letters

In 2015, BLEM received a Notice of Underpaid Tax Assessment (SKPKB) related to Corporate Income Tax (PPh Badan) for the 2012 fiscal year. The BLEM objection was rejected and an appeal was lodged to the Tax Court. The BLEM appeal was partially granted resulting in an overpayment of Rp16,945,876,703 or equivalent to US\$1,278,194. The DGT has filed for a review of the Tax Court ruling and a decision is awaited.

the DGT issued an inspection order for the 2011 tax year and the examination resulted in an Underpayment Tax Assessment Letter on several taxes, as follows:

- *Corporate income tax payable for fiscal year 2011 amounting to US\$43,078,625;*
- *income tax payable Article 4 (2) for fiscal year 2011 amounting to Rp6,286,048,448;*
- *income tax payable Article 15 for fiscal year 2011 amounting to Rp2,423,651,611;*
- *income tax payable Article 23 for fiscal year 2011 amounting to Rp121,542,484,096;*
- *26 income tax liabilities for fiscal year 2011 amounting to Rp87,000,504,026;*
- *value added tax (tax) payable for tax year 2011 amounting to Rp104,803,546,996;*
- *value added tax payable (WABA) for fiscal year 2011 amounting to Rp400,836,598,137; and*
- *Value Added Tax (JLN) for tax year 2011 amounting to Rp40,312,868,561.*

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

Pada bulan Mei 2016, AKT mengajukan keberatan terhadap penilaian pajak, yang sebagian besar ditolak. Pada tahun 2017 AKT mengajukan banding hukum ke Pengadilan Pajak, dimana keputusan tersebut masih ditunda.

Pada tahun 2015, DJP mengeluarkan perintah pemeriksaan lapangan untuk tahun fiskal 2012 dan pemeriksaan tersebut menghasilkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas beberapa pajak, sebagai berikut:

- hutang pajak penghasilan Badan untuk tahun fiskal 2012 sebesar AS\$6.043.278;
- hutang pajak penghasilan Pasal 4 (2) sebesar Rp2.379.776.595;
- hutang pajak penghasilan Pasal 15 untuk tahun fiskal 2012 senilai Rp1.453.691.844;
- hutang pajak penghasilan Pasal 23 untuk tahun fiskal 2012 sebesar Rp108.268.166.334;
- 26 liabilitas pajak penghasilan untuk tahun fiskal 2012 sebesar Rp97.374.385.757;
- hutang pajak pertambahan nilai (WAPU) penghasilan untuk tahun fiskal 2012 sebesar Rp404.656.907.700;
- hutang pajak pertambahan nilai (WABA) penghasilan untuk tahun fiskal 2012 sebesar Rp430.279.933.595; dan
- hutang pajak pertambahan nilai (JLN) penghasilan untuk tahun fiskal 2012 sebesar Rp46.379.191.219.

Pada bulan Mei 2016, AKT mengajukan banding terhadap penilaian pajak, yang kebanyakan ditolak, tetapi prosesnya masih berjalan.

Pada tahun 2017, DJP mengeluarkan Surat Keterangan Perintah Pemeriksaan Awal untuk TF 2014 AKT yang mengakibatkan total utang pajak pertambahan nilai (WAPU) untuk tahun pajak 2014 sebesar Rp82.106.061.910 dan jumlah tersebut telah dibayarkan seluruhnya pada tahun 2017. Proses pemeriksaan masih berlangsung terkait dengan kewajiban pajak lainnya untuk tahun fiskal 2014.

Pada tanggal 31 Maret 2017 BLEM dan BMS telah berpartisipasi dalam program pengampunan pajak dan melunasi hutang pajak untuk tahun fiskal 2015 dan tahun sebelumnya. Selain itu, akumulasi kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai dan kredit pajak penghasilan hingga tahun pajak 2015 yang dihitung dalam tahun fiskal 2016 telah dihapuskan/dihilangkan.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

19. TAXATION (continued)

In May 2016, AKT filed objections against the tax assessments, which were mostly rejected and in 2017 AKT filed legal appeals to the Tax Court, the decisions on which are pending.

In 2015, the DGT issued a field inspection order for the 2012 fiscal year And the examination resulted in an Underpayment Tax Assessment Letter on several taxes, as follows:

- Corporate income tax payable for fiscal year 2012 amounting to US\$6,043,278;
- income tax payable Article 4 (2) for fiscal year 2012 amounting to Rp2,379,776,595;
- income tax payable Article 15 for fiscal year 2012 to totalling at Rp1,453,691,844;
- income tax payable Article 23 for fiscal year 2012 amounting to Rp108,268,166,334;
- 26 income tax liabilities for fiscal year 2012 amounting to Rp97,374,385,757;
- Value added tax debt (WAPU) for fiscal year 2012 amounting to Rp404,656,907,700;
- Value added tax payable (WABA) for fiscal year 2012 amounting to Rp430,279,933,595; and
- Value Added Tax (JLN) for the 2012 tax year amounting to Rp46,379,191,219.

In May 2016, AKT filed appeals against the tax assessments, which were mostly rejected and the process is on going.

In 2017, the DGT issued an Initial Inspection Examination Order Letter for FY 2014 of AKT which resulted in total debt of value added tax (WAPU) for tax year 2014 amounting to Rp82,106,061,910 and this has been paid entirely in 2017. The inspection process is on going related to other tax obligations for fiscal year 2014.

As at 31 March 2017 BLEM and BMS participated in the tax amnesty program that eliminates taxes payable for fiscal year 2015 and earlier. In addition, the accumulated overpayment of value added tax and income tax credit up to the 2015 tax year calculated in fiscal year 2016 is written off/lost.

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/63 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Administrasi perpajakan

Undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa masing-masing entitas dalam Grup menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang secara individu. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, DJP dapat menetapkan atau mengubah jumlah pajak terutang dalam jangka waktu tertentu. Untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya, jangka waktu tersebut adalah sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak tetapi tidak lebih dari tahun 2013, sedangkan untuk tahun pajak 2008 dan seterusnya, jangka waktunya adalah lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

Pada Bulan April 2017 Perusahaan menerima surat keputusan Dirjen Pajak No. KEP-00464/KEB/WPJ.19/2017 sehubungan dengan pajak penghasilan tahun 2011. Berdasarkan surat tersebut, DJP meyetujui kredit pajak Perusahaan untuk tahun pajak 2011 sebesar AS\$51.574.966. Berikut rincian pembayaran kredit pajak untuk tahun pajak 2011.

Pembayaran tahun 2011	18,274,732	Paid in 2011
Pembayaran tahun 2012	31,300,234	Paid in 2012
Pembayaran tahun 2013	2,000,000	Paid in 2013
	51,574,966	

Berdasarkan S-KEP DJP di atas maka, Perusahaan seharusnya mengakui lebih bayar atas pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2011 sebesar AS\$45.570.095.

The taxation laws of Indonesia require that each company in the Group within Indonesia submits individual tax returns on the basis of self-assessment. Under prevailing regulations the DGT may assess or amend taxes within a certain period. For the fiscal years of 2007 and before, this period is within ten years of the time the tax become due, but not later than 2013, while for the fiscal years of 2008 and onwards, the period is within five years of the time the tax becomes due.

In April 2017, the Company received Decision Letter No. DGT. KEP-00464 / KEB / WPJ.19 / 2017 with respect to 2011 income tax. Based on the letter, the DGT approved the 2011 tax credit for US\$51,746,966. Here are the details of tax credit payments for fiscal year 2011.

20. PENYISIHKAN IMBALAN KARYAWAN

Penyisihan imbalan kerja dihitung setiap tahun oleh PT Padma Raya Aktuaria, aktuaris independen.

20. PROVISION FOR EMPLOYEE BENEFITS

The provision for employee benefits is calculated annually by PT Padma Raya Aktuaria, an independent actuary.

	2016	2015	
Nilai kini kewajiban yang tidak didanai	2,915,181	2,343,720	Present value of unfunded obligations
Kerugian/(keuntungan) aktuaria yang diakui	-	-	Unrecognised actuarial (losses)/gains
Liabilitas pada laporan posisi keuangan	<u>2,915,181</u>	<u>2,343,720</u>	Liability in the statement of financial position

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/64 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

20. PENYISIHAN IMBALAN KARYAWAN (lanjutan)

**20. PROVISION FOR EMPLOYEE BENEFITS
(continued)**

Mutasi nilai kini dari kewajiban Grup selama periode berjalan adalah sebagai berikut:

The movement in the Group's present value of obligations over the period is as follows:

	2016	2015	
Pada awal tahun	2,343,720	3,845,428	<i>At beginning of the year</i>
Biaya jasa kini	589,763	919,664	<i>Current service cost</i>
Biaya bunga	184,076	254,582	<i>Interest cost</i>
Pembayaran manfaat (Keuntungan)/kerugian aktuarial	(6,872)	-	<i>Benefit pait Actuarial (gains)/losses</i>
Kerugian actuarial neto yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	43,916	(366,357)	<i>Net actuarial losses recognised on other comprehensive income</i>
Efek curtailment/penyelesaian	(297,112)	(1,965,707)	<i>Effect of curtailment/settlement</i>
Perbedaan nilai tukar	57,690	(343,890)	<i>Exchange difference</i>
Pada akhir periode	2,915,181	2,343,720	<i>At the end of the period</i>

Jumlah yang diakui pada laporan laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

The amounts recognised in the consolidated profit or loss are as follows:

	2016	2015	
Biaya jasa kini	582,891	919,664	<i>Current service cost</i>
Biaya bunga	184,076	254,582	<i>Interest cost</i>
Biaya jasa lalu			<i>Past service cost</i>
Kerugian aktuarial neto yang diakui pada pendapatan komprehensif lain	43,916	(366,357)	<i>Net actuarial losses recognised on other comprehensive loss</i>
Efek kurtailmen/ penyelesaian	(297,112)	(1,965,707)	<i>Effect of curtailment/ settlement</i>
Perbedaan nilai tukar	57,690	(343,890)	<i>Exchange difference</i>
Jumlah	571,461	(1,501,708)	<i>Total</i>

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used were as follows:

	2016	2015	
Tingkat diskonto	8.50%	8.50%	<i>Discount rate</i>
Kenaikan gaji di masa depan	10%	10%	<i>Future salary increases</i>

Asumsi yang berhubungan dengan pengalaman mortalita masa depan berdasarkan saran aktuaris menurut statistik yang telah diterbitkan dan pengalaman setiap wilayah. Di Indonesia, asumsi mortalita yang digunakan adalah Tabel Mortalitas Indonesia 2011 (TMI'11).

Assumptions regarding future mortality experience are based on actuarial advice in accordance with published statistics and experience in each territory. In Indonesia, the mortality assumptions used are based on the Indonesian Mortality Table 2011 (TMI'11).

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/65 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

21. MODAL SAHAM

Struktur pemegang saham Perusahaan, 31 Desember 2016 dan 2015 berdasarkan pencatatan yang dibuat oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") adalah sebagai berikut:

Pemegang saham/Shareholders	2016
	Jumlah lembar saham/ <i>number of shares issued</i>
REM	10,527,564,448
PT Muara Kencana Abadi	12,500
Masyarakat/Public	7,001,258,052
	17,528,835,000
Saham simpanan/Treasury shares	164,165,000
	17,693,000,000

Pemegang saham/Shareholders	2016
	Jumlah lembar saham/ <i>number of shares issued</i>
REM	10,527,564,448
PT Muara Kencana Abadi	12,500
Masyarakat/Public	7,001,258,052
	17,528,835,000
Saham simpanan/Treasury shares	164,165,000
	17,693,000,000

Pemegang saham/Shareholders	2015
	Jumlah lembar saham/ <i>number of shares issued</i>
REM	11,098,941,448
PT Muara Kencana Abadi	12,500
Masyarakat/Public	6,429,881,052
	17,528,835,000
Saham simpanan/Treasury shares	164,165,000
	17,693,000,000

Pemegang saham/Shareholders	2015
	Jumlah lembar saham/ <i>number of shares issued</i>
REM	11,098,941,448
PT Muara Kencana Abadi	12,500
Masyarakat/Public	6,429,881,052
	17,528,835,000
Saham simpanan/Treasury shares	164,165,000
	17,693,000,000

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perusahaan mempunyai 164.165.000 lembar saham simpanan yang dibeli kembali selama tahun 2013 dan 2012 dengan total biaya sebesar Rp80,3 miliar (setara dengan AS\$8.380.461).

As at 31 December 2016, the Company had 164,165,000 treasury shares which were repurchased during 2013 and 2012 with total costs of Rp80,3 billion (equivalent to US\$8,380,461).

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Komisaris maupun Direksi Perusahaan yang secara individu memiliki saham Perusahaan adalah Nenie Afwani yang memiliki 100.000 lembar saham.

At 31 December 2016 and 2015, individual Commissioners and Directors of the Company who owned the Company's shares was Nenie Afwani, who owned 100,000 shares.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, tidak ada kepemilikan saham oleh masyarakat yang masing-masing sebesar 5% atau lebih.

At 31 December 2016 and 2015, no public shareholder held 5% or more of the Company's shares.

21. SHARE CAPITAL

The Company's shareholders at 31 December 2016 and 2015 based on the records maintained by Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), were as follows:

Pemegang saham/Shareholders	2016
	Jumlah lembar saham/ <i>number of shares issued</i>
REM	10,527,564,448
PT Muara Kencana Abadi	12,500
Masyarakat/Public	7,001,258,052
	17,528,835,000
Saham simpanan/Treasury shares	164,165,000
	17,693,000,000

Pemegang saham/Shareholders	2016
	Jumlah lembar saham/ <i>number of shares issued</i>
REM	10,527,564,448
PT Muara Kencana Abadi	12,500
Masyarakat/Public	7,001,258,052
	17,528,835,000
Saham simpanan/Treasury shares	164,165,000
	17,693,000,000

Pemegang saham/Shareholders	2015
	Jumlah lembar saham/ <i>number of shares issued</i>
REM	11,098,941,448
PT Muara Kencana Abadi	12,500
Masyarakat/Public	6,429,881,052
	17,528,835,000
Saham simpanan/Treasury shares	164,165,000
	17,693,000,000

Pemegang saham/Shareholders	2015
	Jumlah lembar saham/ <i>number of shares issued</i>
REM	11,098,941,448
PT Muara Kencana Abadi	12,500
Masyarakat/Public	6,429,881,052
	17,528,835,000
Saham simpanan/Treasury shares	164,165,000
	17,693,000,000

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perusahaan mempunyai 164.165.000 lembar saham simpanan yang dibeli kembali selama tahun 2013 dan 2012 dengan total biaya sebesar Rp80,3 miliar (setara dengan AS\$8.380.461).

As at 31 December 2016, the Company had 164,165,000 treasury shares which were repurchased during 2013 and 2012 with total costs of Rp80,3 billion (equivalent to US\$8,380,461).

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Komisaris maupun Direksi Perusahaan yang secara individu memiliki saham Perusahaan adalah Nenie Afwani yang memiliki 100.000 lembar saham.

At 31 December 2016 and 2015, individual Commissioners and Directors of the Company who owned the Company's shares was Nenie Afwani, who owned 100,000 shares.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, tidak ada kepemilikan saham oleh masyarakat yang masing-masing sebesar 5% atau lebih.

At 31 December 2016 and 2015, no public shareholder held 5% or more of the Company's shares.

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/66 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

22. PREMI SAHAM

	2016	2015	
Selisih antara pembayaran yang diterima dengan nilai nominal saham	538,149,979	538,149,979	<i>Excess of proceeds over par value</i>
Biaya emisi saham	<u>(20,470,246)</u>	<u>(20,470,246)</u>	<i>Share issuance costs</i>
Premi saham	<u>517,679,733</u>	<u>517,679,733</u>	<i>Share premium</i>

Biaya emisi saham merupakan biaya-biaya yang berkaitan langsung dengan penerbitan saham baru Perusahaan yang dilakukan melalui Penawaran Umum Saham Perdana Perusahaan (Catatan 1b).

Share issuance costs represent costs directly attributable to the issuance of new shares of the Company in respect of the Initial Public Offering of the Company's shares (Note 1b).

23. CADANGAN WAJIB

Undang-Undang Perseroan Terbatas Republik Indonesia No. 1/1995 yang diterbitkan pada Maret 1995, sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang No. 40/2007 pada bulan Agustus 2007, mewajibkan perseroan terbatas membentuk cadangan umum dari laba bersih sejumlah minimum 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Tidak ada batasan waktu yang diberlakukan untuk pembentukan cadangan yang dimaksud. Besarnya cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan.

23. GENERAL RESERVE

The Limited Liability Company Law of the Republic of Indonesia No. 1/1995 introduced in March 1995, and amended by Law No. 40/2007 in August 2007, requires the establishment of a general reserve from net income amounting to at least 20% of a company's issued and paid up capital. There is no time limit on the establishment of such reserve. The general reserve is determined by the General Meeting of Shareholders.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diaktakan dengan akta notaris No. 32, tanggal 10 Juni 2011 oleh Fathiah Helmi, S.H., pemegang saham menyetujui pembentukan cadangan saldo laba sebesar Rp70 miliar (setara dengan AS\$8.217.892).

Based on the Annual General Meeting of Shareholders which was notarised by Deed No. 32 dated 10 June 2011 by Fathiah Helmi, S.H., the shareholders approved the forming of a retained earnings reserve amounting to Rp70 billion (equivalent to US\$8,217,892).

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diaktakan dengan akta notaris No. 2, tanggal 1 Juni 2012 oleh Fathiah Helmi, S.H., pemegang saham menyetujui penambahan cadangan saldo laba sebesar Rp1.212 miliar (setara dengan AS\$129.861.780).

Based on the Annual General Meeting of Shareholders which was notarised by Deed No. 2 dated 1 June 2012 by Fathiah Helmi, S.H., the shareholders approved an addition to the retained earnings reserve amounting to Rp1,212 billion (equivalent to US\$129,861,780).

Tidak ada penambahan cadangan wajib selama periode 2016 dan 2015.

There has been no addition to general reserve during 2016 or 2015.

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/67 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

24. PENJUALAN BERSIH

24. NET SALES

	2016	2015	
Pihak ketiga:			<i>Third parties:</i>
Penjualan batubara ekspor	129,819,278	70,762,351	Export coal sales
Penjualan batubara lokal	3,797,389	1,759,908	Local coal sales
	133,616,667	72,522,259	

Seluruh penjualan batubara dilakukan kepada pihak ketiga.

All coal sales are made to third parties.

Lihat (Catatan 36) untuk penjelasan mengenai konsentrasi risiko pada Grup.

Refer to (Note 36) for explanation regarding concentration of risk in the Group.

Penjualan kepada pelanggan yang melebihi 10% dari nilai penjualan bersih adalah sebagai berikut:

Sales transactions with customers which exceed 10% of total net sales were as follows:

	2016	2015	
Noble Resources International Pte.Ltd.	<u>133,616,667</u>	<u>70,762,351</u>	Noble Resources International Pte.Ltd.

25. BEBAN POKOK PENJUALAN

25. COST OF GOODS SOLD

	2016	2015	
Overburden dan pemrosesan batubara	56,062,099	196,258,552	Overburden and coal processing
Penyusutan dan amortisasi	33,925,864	72,950,470	Depreciation and amortisation
Royalti kepada Pemerintah	8,223,611	5,825,949	Royalty to Goverment
Penurunan/(kenaikan) persediaan batubara	(54,571,078)	(633,221)	Decrease/(increase) in coal inventory
 Lainnya	 <u>168,317</u>	 <u>52,039</u>	 Other
	43,808,813	274,453,789	

Pemasok yang memiliki transaksi pembelian barang dan jasa melebihi 10% dari jumlah penjualan bersih adalah sebagai berikut:

Suppliers having transactions for purchases of goods and services of more than 10% of total net sales are the following:

	2016	2015	
Pihak Ketiga:			<i>Third party:</i>
PT AKR Corporindo Tbk.	-	14,319,286	PT AKR Corporindo Tbk.
	-	14,319,286	

26. BEBAN PENJUALAN DAN PEMASARAN

26. SELLING AND MARKETING EXPENSES

	2016	2015	
Pengangkutan dan logistik	6,495,698	17,810,610	Barging and logistics
	6,495,698	17,810,610	

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/68 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

27. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

27. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	2016	2015	
Jasa Manajemen	34,088	44,655,441	<i>Management fee</i>
Karyawan	1,257,345	1,055,467	<i>Employees</i>
Perlengkapan kantor dan sewa gedung	4,320,391	8,008,359	<i>Office supplies and rental</i>
Transportasi dan perjalanan dinas	209,677	201,345	<i>Transportation and travel</i>
Jasa profesional	3,302,193	518,903	<i>Professional fees</i>
Penyusutan (Catatan 11)	26,164	128,274	<i>Depreciation (Note 11)</i>
Lain-lain	566,185	38,494	<i>Others</i>
	<u>9,716,043</u>	<u>54,606,283</u>	

28. BEBAN KEUANGAN

28. FINANCE COSTS

	2016	2015	
Biaya bunga	6,000,000	26,395,877	<i>Interest expenses</i>
Biaya transaksi pinjaman	-	18,198,674	<i>Debt transaction costs</i>
	<u>6,000,000</u>	<u>44,594,551</u>	

29. PENDAPATAN/(BEBAN) LAIN-LAIN, BERSIH

29. OTHER INCOME/(EXPENSES), NET

	2016	2015	
Kerugian penurunan nilai investasi pengendalian bersama entitas	-	56,708,828	<i>Loss on impairment of investment in jointly controlled entities</i>
Penyisihan dan beban untuk denda	1,323,143	59,820	<i>Provision for penalties and penalty expenses</i>
(Keuntungan)/kerugian selisih kurs, bersih	63,909	(338,029)	<i>(Gain)/loss on foreign exchange, net</i>
Lain-lain, bersih	<u>(117,852,252)</u>	<u>(47,969,195)</u>	<i>Others, net</i>
	<u>(116,465,200)</u>	<u>8,461,424</u>	

Beban lain-lain pada periode 2015 mencakup berbagai biaya yang dihapuskan dari rencana tambang dan persiapan ekspansi infrastruktur, yang saat ini ditangguhkan sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Pendapatan lain-lain pada periode 2016 mencakup pemulihan pajak dari tahun-tahun sebelumnya dan keuntungan penjualan asset tetap.

Other expenses in 2015 include write offs from various costs of mine plan and infrastructure expansion preparation, which are now deferred indefinitely.

Other income in 2016 include tax recovery from prior years and gain from sale of fixed assets.

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/69 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

30. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usahanya, Grup tidak terhindar dari transaksi dengan pihak-pihak berelasi terutama dalam hal transaksi rekening koran.

30. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, the Group unavoidability engages in transactions with related parties particulary in respect of current-account transactions.

a. Saldo transaksi rekening koran pihak berelasi

	2016	2015	
Tn. Samin Tan	47,908,521	-	<i>Mr. Samin Tan</i>
Lain-lain	30,190,119	14,193,747	<i>Others</i>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	
	78,098,640	14,193,747	

b. Kompensasi manajemen inti

Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan merupakan personil manajemen inti. Kompensasi yang dibayar atau terutang pada Dewan Komisaris dan Direksi Grup atas jasa kepegawaian adalah sebagai berikut:

a. Related-party current account balance

	2016	2015	
Gaji dan imbalan jangka pendek	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<i>Mr. Samin Tan Others</i>

b. Key management compensations

The Boards of Commissioners and Directors of the Company are considered as the key management personnel. The compensation paid or payable to in relation there to follows:

c. Pihak berelasi

Kebijakan Grup terkait penetapan harga untuk transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

- uang muka operasi diberikan pada harga perolehan, tanpa bunga dan dalam jangka pendek.

Sifat transaksi dan hubungan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

c. Related parties

The Group's pricing policies related to the transactions with related parties are as follows:

- operational advances are provided at cost, non-interest bearing and short-term.

The nature of transactions and relationships with related parties are as follows:

Entitas/Entities	Hubungan/Relationships	Transaksi/Transactions
PT Samudra Pasific Marine	Entitas dibawah pengendalian yang sama/ <i>Entity under common control</i>	Jasa pengangkutan batubara/ <i>Coal transport services</i>
PT Artha Contractors	Entitas dibawah pengendalian yang sama/ <i>Entity under common control</i>	Jasa loading-unloading batubara/ <i>Coal loading-unloading services</i>
Samin Tan	Manfaat pemilik/ <i>Beneficial owner</i>	Manfaat pemilik/ <i>Beneficial owner</i>
PT Grahalintas Property	Entitas dibawah pengendalian yang sama/ <i>Entity under common control</i>	Uang muka untuk sewa gedung/ <i>Advance for buliding rent</i>

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/70 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

31. RUGI BERSIH PER SAHAM DASAR

Rugi per saham dihitung dengan membagi rugi atau laba bersih dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang telah dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan.

31. BASIC LOSS PER SHARE

Loss per share is calculated by dividing net profit or loss attributable to shareholders by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the relevant year.

	2016	2015	
Laba (Rugi) bersih yang diatribusikan bagi pemegang saham	158,891,258	(253,028,160)	<i>Net profit (loss) attributable to the shareholders</i>
Rata-rata pertimbangan jumlah saham biasa yang beredar	<u>17,693,000,000</u>	<u>17,693,000,000</u>	<i>Weighted average number of ordinary sharres outstanding</i>
Laba (rugi) bersih per saham dasar (nilai penuh)	<u>0.01</u>	<u>(0.01)</u>	<i>Basic profit (loss) per share (full amount)</i>

Grup tidak memiliki saham biasa yang bersifat dilutif selama tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan tahun 2015.

The Group did not have any dilutive ordinary shares during the years ended 31 December 2016 and 2015.

32. KOMITMEN DAN PERJANJIAN PENTING

a. Perjanjian penambangan, pengangkutan, pemindahan batubara dan lainnya

AKT, sebagai produsen batubara, mengadakan sejumlah perjanjian terkait dengan proses penambangan. Berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, AKT diharuskan membayar biaya sewa atas peralatan, mesin, perlengkapan dan barang-barang lain yang diperlukan untuk proses penambangan.

AKT juga mengadakan perjanjian pengangkutan, transportasi dan pemindahan batubara dengan kontraktor untuk menyediakan jasa transportasi dari area pertambangan AKT ke pelabuhan tujuan ataupun lokasi penumpukan batubara yang telah ditentukan. AKT diharuskan membayar biaya sewa kepada kontraktor, yang dihitung secara bulanan, berdasarkan suatu formula sesuai dengan jumlah batubara yang diangkut.

32. COMMITMENTS AND SIGNIFICANT AGREEMENTS

a. Coal mining, transportation, barging, transhipment and other related agreements

AKT, as a coal producer, has entered into a number of mining services agreements to support its owner-mining activities. Under the agreements, AKT is required to pay a rental fee relating to rental of equipment, machinery, appliances and other supplies necessary for performing the mining process.

AKT has also entered into coal barging, transport and transhipment agreements with contractors to provide coal transportation services from AKT's mining area to certain port destinations or stockpile areas. AKT is required to pay contractors a rental fee, calculated on a monthly basis, based on a formula which includes the amount of coal transported.

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/71 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

**32. KOMITMEN DAN PERJANJIAN PENTING
(lanjutan)**

**32. COMMITMENTS AND SIGNIFICANT
AGREEMENTS (continued)**

Kontraktor/ Contractor	Tipe perjanjian/ Agreement type	Tanggal perjanjian/ Agreement date	Akhir periode perjanjian/ Contract period end
PT Kharisma Rekaya Global	Jasa konstruksi/Construction services	21 Maret/March 2011	Kontruksi selesai/Construction completed
PT Capitol Nusantara Indonesia, PT Trimanunggal Nugraha, PT Habco Primatama, PT Pelangi Sindu Mulia, PT Manna Line Internasional	Pengangkutan batubara/ Coal barging	2009	Dapat diperpanjang untuk jangka waktu satu bulan-satu tahun/ Various renewable terms from one month-one year
PT Samudra Pacific Marine	Pengangkutan batubara/ Coal barging	2016	31 Desember/December 2018 (shipment by shipment)
PT AKR Corporindo Tbk.	Jual beli bahan bakar/Fuel Supply and delivery	21 Desember/December 2012	Sekarang/Ongoing
PT Prima Sarana Gemilang	Transportasi batubara/ Coal trucking	30 November/November 2012	30 Juni/June 2016 (contract completed)
PT Sinar Intijaya Putra Perkasa	Jasa pengupasan tanah dan penambangan batubara/ Overburden removal and coal extraction	27 Juli/July 2012	27 Juli/July 2015 (completed)

b. Perjanjian penggunaan alur pelayaran

Pada tanggal 28 Juli 2011, AKT mengadakan perjanjian penggunaan alur pelayaran pada muara selatan sungai Barito dengan PT Ambang Barito Nusapersada ("ABN").

Perjanjian ini diperbaharui kembali pada tanggal 30 Januari 2015 dengan Perjanjian No. 009/ABNP-KONTRAK/VII/2015 yang berlaku 12 bulan sejak tanggal 1 Februari 2015 sampai dengan 31 Januari 2016 dan untuk yang terakhir kali pada tanggal 28 Januari 2016 dengan perjanjian No. 008/ABNP-KONTRAK/I/2016 yang berlaku selama 6 bulan sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan 31 Juli 2016. Sampai dengan saat ini, AKT telah melakukan perjanjian perpanjangan perjanjian ini sebagaimana perjanjian dan melanjutkan untuk membayar biaya yang diminta.

Berdasarkan perjanjian ini, AKT membayarkan imbalan tertentu untuk setiap metrik ton batubara yang dikapalkan melalui muara selatan sungai Barito atas jasa pemeliharaan alur pelayaran tersebut oleh ABN.

b. Channel fee service agreement

On 28 July 2011, AKT entered into a service agreement for the use of shipping lanes at the southern end of the Barito river with PT Ambang Barito Nusapersada ("ABN").

This Agreement was renewed on 30 January 2015 with agreement No. 009/ABNP-KONTRAK/VII/2015 which is valid for another 12 months from 1 February 2015 to 31 January, 2016 and for the last time on 28 January 2016 under the agreement No. 008/ABNP-KONTRAK/I/2016 valid for 6 months 1 February 2016 to 31 July, 2016. Presently AKT is still in the process of negotiation for the extension of this agreement and continues to pay fees as required.

This agreement requires AKT to pay a fee per metric tonne of coal barged via the river area at the southern end of the Barito river for the services of ABN to maintain the shipping channel.

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/72 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

**32. KOMITMEN DAN PERJANJIAN PENTING
(lanjutan)**

c. Perjanjian Penggunaan Sarana Penumpukan Batubara dengan PT Artha Contractors

Pada tanggal 29 September 2014, telah ditandatangani amandemen 1 terhadap perjanjian ini yang memperpanjang masa berlaku perjanjian sampai dengan 4 Januari 2019. Pada tanggal 13 Januari 2015 ditandatangani amandemen 2 yang mengubah ketentuan mengenai nilai jasa minimum yang harus dibayarkan oleh AKT.

d. Perjanjian Penjualan dan Jasa Perbaikan Suku Cadang dengan PT United Tractors Tbk.

Pada tanggal 30 Agustus 2013, AKT menandatangani perjanjian dengan PT United Tractors Tbk. untuk penyediaan suku cadang dan jasa perbaikan secara kredit yang dapat dilakukan secara berulang dengan batas maksimum sebesar AS\$12.000.000. Perjanjian ini masih berlaku dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan bersama.

e. Perjanjian dengan Noble Resources Pte. Ltd.

Pada tanggal 16 Agustus 2012, AKT dan Noble melakukan perubahan terhadap perjanjian jual beli coking coal.

Harga jual berdasarkan mekanisme yang mengacu pada harga pasar, indeks dan dirat-ratakan dengan harga sementara dan akhir. Perjanjian ini berlaku selama tujuh tahun, mulai dari 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2018. Berdasarkan perjanjian ini, AKT diharuskan untuk menawarkan harga jual dengan potongan harga tertentu.

Pada tanggal 1 Juni 2016 perjanjian dengan Perjanjian No. NRIPL-15714IP mengenai penjualan sebanyak 56.645 ton coking coal yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2018 dan Perjanjian No. NRIPL-15716IP mengenai penjualan batubara sebanyak 760.000 ton coking coal perjanjian ini berlaku selama 3 bulan sejak ditandatangani (Catatan 39d).

32. COMMITMENTS AND AGREEMENTS (continued)

c. Intermediate Stockpile Agreement with PT Artha Contractors

On 29 September 2014, amendment 1 to this agreement has been signed which extends the term of agreement up to 4 January 2019. On 13 January 2015, amendment 2 was signed to amend the provisions concerning the minimum value of services to be paid by AKT.

d. Spare Parts Sales and Services with PT United Tractors Tbk.

On 30 August 2013, AKT signed an agreement with PT United Tractors Tbk. for providing spare parts and services on revolving credit terms with a maximum amount of US\$12,000,000. This agreement is ongoing and can be renewed as agreed by both parties.

e. Agreements with Noble Resources Pte. Ltd.

On 16 August 2012, AKT and Noble entered into a coking coal sale and purchase agreement

Sales prices are based on a mechanism referenced to international market prices, indices and averages with provisional and final pricing. This agreement is valid for seven years from 1 January 2012 until 31 December 2018. Under the agreement and its subsequent amendments, AKT is required to offer selling prices at a certain discount.

On 1 June 2016, the coal supply agreement was replaced by the Agreement No. NRIPL-15714IP concerning sales of 56.645 million tons of coking coal valid until December 31, 2018 and Agreement No. NRIPL-15716IP regarding the sale of 760.000 ton coking coal which is valid for 3 months (Note 39d).

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/73 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

**32. KOMITMEN DAN PERJANJIAN PENTING
(lanjutan)**

f. Iuran kehutanan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 tanggal 4 Februari 2008, seluruh perusahaan yang memiliki aktivitas di dalam area hutan produksi dan hutan lindung namun kegiatannya tidak berhubungan dengan kegiatan kehutanan memiliki kewajiban untuk membayar iuran kehutanan tahunan dengan basis per hektar. Iuran ini berlaku sejak tahun 2008. Grup telah mencatat iuran tersebut dalam laporan keuangan konsolidasian ini.

**g. Perjanjian fasilitas *letter of credit* ("L/C")
dan *trust receipt* ("T/R")**

Pada tanggal 23 April 2013, AKT mengadakan perjanjian fasilitas *letter of credit* (L/C) dan *trust receipt* (T/R) dengan FGB. Jumlah maksimum keseluruhan pokok untuk masing-masing fasilitas tersebut adalah AS\$15 juta dan untuk setiap waktunya jumlah ini tidak boleh melebihi AS\$15 juta. Perjanjian ini akan berakhir pada saat penutupan bisnis FGB di Singapura dan FGB akan memberitahukan sebelumnya kepada AKT mengenai pengakhiran perjanjian fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, fasilitas tersebut telah sepenuhnya dicairkan (Lihat catatan 39f).

**h. Perjanjian jasa pertambangan dengan PT
Leighton Contractors Indonesia**

Pada tanggal 13 Desember 2013, AKT mengadakan perjanjian jasa pertambangan dengan PT Leighton Contractors Indonesia untuk mengatur proses produksi batubara Perusahaan yang berlokasi di Tuhup, Kalimantan Tengah, termasuk jasa teknik, operasi pertambangan dan pemeliharaan peralatan. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 3 tahun sampai 2016. Di tahun 2015 PT Leighton Contractors Indonesia setuju untuk mengakhiri perjanjian ini.

**32. COMMITMENTS AND
AGREEMENTS (continued)**

f. Forestry fee

Based on Government Regulation No. 2 dated 4 February 2008, all companies that have activities within protected and productive forest areas that are not related to forestry will have an obligation to pay a forestry fee annually on a per hectare basis. This fee is effective from 2008. The Group has recognised this fee in these consolidated financial statements.

**g. Facility agreement letter of credit ("L/C") and
trust receipt ("T/R")**

On 23 April 2013, AKT entered into letter of credit (L/C) and trust receipt (T/R) facility agreement with FGB. The maximum aggregate principal amount of L/C facility and T/R facility were each US\$15 million and at any given time the aggregate of the loan and the amount under all outstanding L/Cs shall not exceed US\$15 million. This agreement will be ended on the close of FGB's business in Singapore on such date as FGB may at its sole and absolute discretion notify the Company. As at 31 December 2016 and 2015 the facility was fully drawn (See note 39f).

**h. Mining services agreements with PT Leighton
Contractors Indonesia**

On 13 December 2013, AKT entered into a mining services agreement with PT Leighton Contractors Indonesia to manage the Company's coal production process located at Tuhup, Central Kalimantan, comprising technical services, mining operation and maintenance of equipment. This agreement had a tenor of three years up to 2016. In 2015 the parties agreed to terminate this agreement.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

33. KONTINJENSI

a. Tuntutan Hukum

Arbitrase

Perusahaan, bersama dengan PT Renaissance Capital Asia dan PT Muara Kencana Abadi adalah Tergugat berkaitan dengan klaim/gugatan yang diajukan oleh Transasia Minerals Limited dan Bondline Limited sebagai Penggugat di Majelis Arbitrase dalam hal SIAC arbitrase No. 001 OF 2012 (ARB001/12/FL) dan dalam suatu arbitrase di bawah *the UNCITRAL Rules 1976* di Singapura.

Gugatan terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam permohonan tanggal 22 Desember 2012 sebagaimana diubah dengan Penambahan Permohonan Penggugat tanggal 29 Januari 2013 adalah sebagai berikut:

1. menyatakan Tergugat gagal memenuhi kewajiban mereka untuk membayar jumlah penuh dari harga pembelian atas akuisisi saham AKT, PT Mahakam Pertambangan dan PT Indofront Abadi;
2. membatalkan Perjanjian Jual dan Beli Saham, Surat Penyelesaian Perjanjian Jual Beli Saham Tuhup dan Jaminan Perusahaan berdasarkan Pasal 1267 dan Pasal 1517 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan segala konsekuensinya;
3. memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kembali seluruh kepemilikan saham dalam AKT, PT Mahakam Pertambangan dan PT Indofront Abadi yang telah dialihkan selambat-lambatnya tiga hari kerja sejak tanggal pelaksanaan perintah ini, yang diberikan di bawah perintah *exequatur* dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

33. CONTINGENCIES

a. Legal Claims

Arbitration

The Company, together with PT Renaissance Capital Asia and PT Muara Kencana Abadi are named as the Respondents with regard to certain Claims filed by Transasia Minerals Limited and Bondline Limited as the Claimants before an ad hoc Arbitration Tribunal in the matter of SIAC arbitration No. 001 OF 2012 (ARB001/12/FL) and in the matter of an Arbitration under the UNCITRAL Rules 1976 in Singapore.

The claims against the Respondents, as stipulated in the Claimants petition dated 22 December 2012, as amended by the Claimants' Additional Submission dated 29 January 2013 were as follows:

1. *to declare the Defendants in default of their obligations to pay the full amount of the purchase price for the acquisition of the shares of AKT, PT Mahakam Pertambangan and PT Indofront Abadi;*
2. *to annul the Sales and Purchase of Shares Agreement, the Letters of Tuhup Shares Purchase Agreement Completion and the Corporate Guarantee pursuant to Article 1267 and Article 1517 of the Indonesian Civil Code, with all of its consequences;*
3. *to order the Respondents to transfer back the ownership of all transferred shares in AKT, PT Mahakam Pertambangan and PT Indofront Abadi no later than three working days from the date of the execution of an award, given under the order of exequatur from the Chairman of the District Court of Central Jakarta;*

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

33. KONTINJENSI (lanjutan)

4. memberikan Penggugat kompensasi biaya kerusakan dan bunga yang timbul akibat kegagalan Tergugat yang diperkirakan akan sebesar AS\$20 juta; dan
5. memerintahkan Tergugat untuk membayar semua biaya dalam proses arbitrase ini.

Perusahaan menolak klaim ini dan berkeras mempertahankan posisinya.

Pada tahun 2016 majelis arbitrase diturunkan, karena:

Pembatalan kontrak penjualan asli AKT kepada BLEM dan MKA. Ini berarti semua saham milik BLEM dan MKA harus dikembalikan ke Bondline dan Transasia, yang kemudian akan mengambil alih kepemilikan dan pengendalian AKT karena saat ini berdiri (yang secara signifikan disempurnakan oleh investasi dan usaha AKT namun saat ini dibebani dengan hutang dan kewajiban yang signifikan). Ini juga berarti Penjual harus mengembalikan harga pembelian asli ditambah bunga kepada Pembeli.

Namun, jika Pembeli membayar sejumlah AS\$14,3 juta (yang mencakup AS\$10 juta asli yang diklaim tidak dibayar oleh Pembeli, ditambah bunga yang dinilai pengadilan, ditambah biaya pengadilan) dalam 30 hari setelah keputusan tersebut, keputusan tersebut tidak akan dilakukan.

Perusahaan tidak memiliki cukup dana yang tersedia dan dengan demikian tidak dapat memanfaatkan pilihan pembayaran. Para pemegang saham telah berdiskusi dengan Penjual untuk mencari resolusi yang saling memuaskan tanpa mengurangi kontrak.

33. CONTINGENCIES (continued)

4. to award the Claimants compensation of damages costs and interest arising from the Respondents' default, which was estimated shall be in the amount of US\$20 million; and
5. to order the Respondents to pay all the expenses of the Arbitration proceedings.

The Company rejected the claims and vigorously defended its position.

In 2016 the arbitration tribunal handed down its awarded, being:

Recision of the original contract of sale of AKT to BLEM and MKA. This means all of the shares owned by BLEM and MKA are to be returned to Bondline and Transasia, who would then assume ownership and control of AKT as it currently stands (ie significantly enhanced by AKT's investments and efforts but currently saddled with significant debts and liabilities). It also means the Sellers must return the original purchase price plus interest to the Buyer.

However, if the Buyer was to pay the amount of US\$14.3 million (which includes the original US\$10 million claimed as unpaid by the Buyer, plus tribunal-assessed interest, plus court costs) within 30 days of the decision, the recision would not apply.

The Company did not have adequate immediately available funds and thus was not able to avail of the payment option. The shareholders have been in discussions with the Sellers to seek a mutually satisfactory resolution without recision of the contract.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

33. KONTINJENSI (lanjutan)

Gugatan/Perlawanan

AKT dan PT Fortuna Cipta Sejahtera ("FCS") telah secara resmi terdaftar atas gugatan dan gugatan balik sehubungan dengan penggunaan jalan umum di Kalimantan Tengah. AKT berusaha keras membela posisinya dan melaksanakan beberapa keputusan-keputusan untuk kepentingannya yang tidak berharap adanya biaya materil yang mengalir dari tindakan penggunaan tersebut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi yang diajukan oleh PT Fortuna Cipta Sejahtera, telah ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia. AKT tidak terbukti melakukan wanprestasi yang didalilkan PT Fortuna Cipta Sejahtera, justru sebaliknya PT Fortuna Cipta Sejahtera yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang merugikan AKT. Jalan Angkutan (*haul road*) yang diklaim dimiliki oleh PT Fortuna Cipta Sejahtera merupakan pernyataan tidak benar karena Jalan Angkutan (*haul road*) adalah milik Negara Republik Indonesia, AKT diberikan hak untuk menggunakan Jalan Angkutan (*haul road*) tersebut sesuai dengan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang diberikan oleh Pemerintah (Kementerian Kehutanan Republik Indonesia).

Grup juga terlibat dalam berbagai tuntutan hukum yang normal dalam kegiatan bisnis Grup. Tidak ada klaim yang signifikan dan manajemen bekerja sama dengan pemasok untuk mencapai penyelesaian.

b. Undang-Undang Pertambangan No. 4/2009

Pada tanggal 16 Desember 2008, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia meloloskan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara yang baru ("Undang-Undang"), yang telah disetujui oleh Presiden pada 12 Januari 2009, menjadi UU No. 4/2009. Sistem PKP2B dimana menjadi dasar bagi AKT, salah satu entitas anak Grup, beroperasi, sudah tidak tersedia bagi para investor.

Undang-Undang mengindikasikan bahwa PKP2B yang ada, seperti yang dimiliki AKT, akan tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak. Terdapat sejumlah permasalahan yang sedang dianalisis pemegang PKP2B, termasuk AKT. Beberapa diantaranya termasuk:

33. CONTINGENCIES (continued)

Claim/Counter

AKT and PT Fortuna Cipta Sejahtera ("FCS") have formally registered claims and counterclaims over the use of a public road in Central Kalimantan. AKT is vigorously pursuing its position and following several decisions in its favour does not expect there to be any material costs flowing from such action.

Based on information obtained from the official website of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, the Challenge filed by PT Fortuna Cipta Sejahtera, has been rejected by the Supreme Court of Justice of the Republic of Indonesia. AKT is not proven to have been at fault, as claimed by PT Fortuna Cipta Sejahtera, on the contrary PT Fortuna Cipta Sejahtera has committed a Breach of Law (PMH) that has damaged AKT. The haul road claimed to be owned by PT Fortuna Cipta Sejahtera actually belongs to the Republic of Indonesia, and AKT is granted the right to use the haul road in accordance with the Forest Borrow and Use License (IPPKH) granted by the Government (Ministry Forestry of the Republic of Indonesia).

The Group is also involved in various legal proceedings as a normal consequence of its business. None of the claims are significant and management is working with the suppliers to achieve resolutions.

b. Mining Law No. 4/2009

On 16 December 2008, the Indonesian Parliament passed a new Law on Mineral and Coal Mining (the "Law"), which received the assent of the President on 12 January 2009, becoming Law No. 4/2009. The CCoW system under which AKT, one of the Group's subsidiaries, operates, will no longer be available to investors.

However, the Law indicates that existing CCoWs, such as that held by AKT, will be honoured. There are a number of issues which existing CCoW holders, including AKT, are currently analysing. Among others these include:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

33. KONTINJENSI (lanjutan)

- Undang-Undang baru menjelaskan bahwa PKP2B akan tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak. Namun, Undang-Undang juga menetapkan bahwa PKP2B yang ada harus disesuaikan dalam jangka waktu satu tahun terhadap ketentuan Undang-Undang yang baru (kecuali untuk penerimaan negara—yang tidak didefinisikan, tetapi diasumsikan termasuk royalti dan pajak); dan
- keharusan bagi pemegang PKP2B yang telah memulai aktivitasnya untuk, dalam waktu satu tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang yang baru, menyerahkan rencana kegiatan pertambangan untuk keseluruhan area kontrak. Jika rencana ini tidak dilaksanakan, area kontrak dapat dikurangi menjadi hanya seluas area yang diperbolehkan untuk Izin Usaha Pertambangan ("IUP") berdasarkan Undang-Undang yang baru. AKT telah mengajukan rencana kegiatan dalam jangka waktu yang ditetapkan, dan telah disetujui untuk memanfaatkan sisa area kontrak seluas 21.630 hektar.

Pada bulan Februari 2010, Pemerintah Indonesia mengeluarkan dua Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah No. 22/2010 dan 23/2010 ("PP No. 22" dan "PP No. 23"), sehubungan dengan penerapan Undang-Undang Pertambangan No. 4/2009. PP No. 22 mengatur tentang pembentukan area pertambangan dengan menggunakan IUP. PP No. 23 memperjelas prosedur untuk memperoleh IUP yang baru. PP No. 23 menyatakan bahwa PKP2B yang ada akan tetap diakui oleh Pemerintah, namun demikian perpanjangan atas PKP2B tersebut akan dilakukan melalui penerbitan IUP.

Pada tanggal 21 Februari 2012, Pemerintah Indonesia mengubah PP No. 23 dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24/2012 ("PP No. 24"), yang mengatur mengenai pengalihan IUP, divestasi dan wilayah pertambangan.

Pada tanggal 13 September 2013, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan Peraturan Menteri No. 27/2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham, serta Perubahan Penanaman Modal di Bidang Usaha.

Peraturan ini mengatur mengenai kewajiban divestasi saham asing secara bertahap sehingga pada tahun kesepuluh paling sedikit 51% kepemilikan saham dimiliki oleh Peserta Indonesia.

33. CONTINGENCIES (continued)

- the Law notes that existing CCoW will be honoured until their expiration. However, it also states that existing CCoWs must be amended within one year to conform to the provisions of the Law (other than terms relating to State revenue—which is not defined, but presumably includes royalties and taxes); and
- the requirement for CCoW holders which have already commenced some form of activity to, within one year of enactment of the Law, submit a mining activity plan for the entire contract area. If this plan is not fulfilled, the contract area may be reduced to that allowed for mining business licences ("Izin Usaha Pertambangan" or "IUP") under the Law. AKT submitted its plan within the required time frame, and has been approved to utilise the remaining contract area covering 21,630 ha.

In February 2010, the Government of Indonesia released two implementing regulations for Mining Law No. 4/2009, i.e. Government Regulation No. 22/2010 and 23/2010 ("GR No. 22" and "GR No. 23"). GR No. 22 deals with the establishment of the mining areas under IUP. GR No. 23 provides clarifications surrounding the procedures to obtain the new IUP. GR No. 23 indicates that existing CCoWs will be honoured by the Government although any extension of existing CCoWs will be through the issue of an IUP.

On 21 February 2012, the Government of Indonesia amended GR No. 23 by issuing Government Regulation No. 24/2012 ("GR No. 24"), which regulates the transfer of IUPs, divestment and mining areas.

On 13 September 2013, the Minister of Energy and Mineral Resources issued Ministerial Regulation No. 27/2013 on the Procedures and Determination of Divestment Price as well as Changes in Capital Investment in Mineral and Coal Mining Businesses.

This regulation governs foreign shares divestment partially whereby on the tenth year, 51% of shares at the minimum, will be owned by the Indonesian Participant.

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/78 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

33. KONTINJENSI (lanjutan)

Peraturan ini juga mengatur mengenai perubahan penanaman modal yang terdiri atas (a) perubahan investasi dan sumber pembiayaan, (b) perubahan status perusahaan PMA menjadi PMDN atau PMDN menjadi PMA, (c) perubahan anggaran dasar, (d) perubahan Direksi dan Dewan Komisaris. Manajemen berpendapat bahwa ketentuan dalam peraturan tersebut tidak berdampak signifikan terhadap Grup.

Pada tanggal 20 Desember 2010, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan implementasi atas Undang-Undang Mineral No. 4/2009, yaitu Peraturan Pemerintah No. 78/2010 ("PP No. 78") yang mengatur aktivitas reklamasi dan pasca tambang untuk pemegang IUP-Eksplorasi dan IUP-Operasi Produksi. Peraturan ini memperbarui Peraturan Menteri No. 18/2008 yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM pada tanggal 29 Mei 2008. Meskipun diatur oleh kerangka PKP2B, AKT mungkin diwajibkan mematuhi peraturan ini.

Pemegang IUP-Eksplorasi, ketentuannya antara lain, harus memuat rencana eksplorasi didalam rencana kerja dan anggaran biaya ekplorasinya dan menyediakan jaminan reklamasi berupa deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah.

c. Peraturan Pemerintah No. 78/2010

Pemegang IUP-Operasi Produksi, ketentuannya antara lain, harus menyiapkan (1) rencana reklamasi lima tahunan; (2) rencana pasca tambang; (3) menyediakan jaminan reklamasi yang dapat berupa rekening bersama atau deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah, bank garansi, atau cadangan akuntansi (bila diizinkan); dan (4) menyediakan jaminan pasca tambang berupa deposito berjangka yang ditempatkan di bank pemerintah.

Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP dari ketentuan untuk melaksanakan aktivitas reklamasi dan pasca tambang.

33. CONTINGENCIES (continued)

This regulation also governs the changes in capital investment which consists of (a) changes in investment and financing sources, (b) changes in company status from foreign investment to domestic investment or vice versa, (c) changes in Articles of Association, (d) changes in the Board of Directors and Commissioners, and (e) changes in shareholders composition. Management believes that the regulation has no significant impact to the Group.

On 20 December 2010, the Government of Indonesia released an implementing regulation for Mining Law No. 4/2009, i.e. Government Regulation No. 78/2010 ("GR No. 78") that deals with reclamation and post-mining activities for both IUP-Exploration and IUP-Production Operation holders. This regulation updates Ministerial Regulation No. 18/2008 issued by the MoEMR on 29 May 2008. Although AKT is governed by the CCoW framework, it may be obliged to comply with this regulation.

An IUP-Exploration holder, among other requirements, must include a reclamation plan in its exploration work plan and budget and provide a reclamation guarantee in the form of a time deposit placed at a State-owned bank.

c. Government Regulation No. 78/2010

An IUP-Production Operation holder, among other requirements, must prepare (1) a five-year reclamation plan; (2) a post-mining plan; (3) provide a reclamation guarantee which may be in the form of a joint account or time deposit placed at a State-owned bank, a bank guarantee, or an accounting provision (if eligible); and (4) provide a post-mine guarantee in the form of a time deposit at a State-owned bank.

The requirement to provide reclamation and post-mine guarantees does not release the IUP holder from the requirement to perform reclamation and post-mine activities.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

33. KONTINJENSI (lanjutan)

Sedangkan untuk jaminan penutupan tambang, sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, Menteri ESDM belum menetapkan panduan mengenai jaminan penutupan tambang. Oleh sebab itu, Grup belum menyediakan jaminan penutupan tambang. Namun, Grup telah membentuk cadangan akuntansi sebesar AS\$1,7 juta pada 31 Desember 2016 dicatat sebagai bagian dari Penyisihan Reklamasi dan Penutupan Tambang.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan Peraturan Menteri No.7/2014 pemegang IUP Operasi-Produksi diharuskan untuk menyediakan jaminan reklamasi dalam bentuk akun bersama, bank garansi atau cadangan akuntansi (jika memenuhi). Perusahaan pertambangan dapat menyediakan jaminan reklamasi dalam belum cadangan akuntansi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tercatat dalam Bursa Efek Indonesia dan sudah melepas lebih dari 40% saham yang dimiliki; dan
- b. Total saham yang diterbitkan tidak kurang dari AS\$50.000.000 seperti tercantum dalam akta notaris yang telah disahkan oleh notaris.

d. Peraturan Menteri No. 28/2009

Pada bulan September 2009, Menteri ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri No. 28/2009, yang salah satu isinya memperketat penggunaan perusahaan afiliasi atau entitas anak sebagai penyedia jasa kontraktor pertambangan dan mengharuskan persetujuan pemerintah untuk penggunaan perusahaan afiliasi sebagai jasa kontraktor pertambangan.

Peraturan tersebut memberikan pengecualian hanya bila tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang mampu beroperasi di daerah tersebut. Peraturan tersebut memberikan waktu masa transisi selama tiga tahun untuk perubahan terhadap perjanjian yang berlaku saat ini. Manajemen berpendapat bahwa Grup telah mematuhi peraturan ini karena Grup tidak menggunakan afiliasi atau entitas anak sebagai kontraktor pertambangan.

33. CONTINGENCIES (continued)

Meanwhile, as at the date of these consolidated financial statements, the MoEMR has not provided guidance with regard to any mine closure guarantee. Hence, the Group has not provided any mine closure guarantee. However, the Group has provided an accounting provision amounting to US\$1.7 million as at 31 December 2016 recorded as part of Provision for Reclamation and Mine Closure.

MoEMR issued Ministerial Regulation No. 7/2014 stipulates that an IUP-Production Operation holder is required to provide a reclamation guarantee which may be in the form of a joint account or time deposit placed at a State-owned bank, a bank guarantee, or an accounting reserve (if eligible). Reclamation guarantee in the form of an accounting reserve can be provided by a mining company if the following criteria are met:

- a. Registered on Indonesian Stock Exchange and has placed more than 40% from total owned stock; and*
- b. Has an issued share capital of not less than US\$50,000,000 as stated in the notarial deed and/or authorised by the notary.*

d. Ministerial Regulation No. 28/2009

In September 2009, the MoEMR issued Ministerial Regulation No. 28/2009 which, among others, sets strict criteria for mining companies use of 'Affiliates' or 'Subsidiaries' as their mining contractors and requires government approval to use an affiliate as a mining contractor.

The regulation provides exceptions only when no other capable mining service companies operate in the area. The regulation provides a three year transition period for changes to existing arrangements. Management believes that the Group has complied with this regulation as the Group does not use affiliates or subsidiaries as mining contractors.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

33. KONTINJENSI (lanjutan)**e. Peraturan Menteri No. 17/2010**

Pada tanggal 23 September 2010, Menteri ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri No. 17/2010 yang diantaranya menjelaskan mekanisme untuk menentukan *Indonesian Minerals and Coal Benchmark Price* ("IMCBP"), sebagai salah satu peraturan pelaksana UU No. 4/2009. Peraturan ini berlaku efektif pada tanggal 23 September 2010.

Royalti kepada Pemerintah akan dihitung berdasarkan mana yang lebih tinggi antara harga jual aktualnya dan IMCBP, seperti yang dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri No. 17/2010.

Peraturan Menteri No. 17/2010 memberikan masa transisi untuk mengubah kontrak spot penjualan sampai dengan 22 Maret 2011 dan kontrak penjualan jangka panjang sampai dengan 22 September 2011 jika diperlukan.

Menyusul diterbitkannya peraturan tersebut, pada tanggal 24 Maret 2011, DJMBP menerbitkan peraturan No. 515.K/32/DJB/2011 yang berisi tentang mekanisme perhitungan *Coal Benchmark Price* untuk kontrak spot dan penjualan berjangka.

DJMBP akan menentukan dan memperbarui *Coal Benchmark Price* bulanan untuk kontrak spot penjualan sesuai dengan harga pasar (berdasarkan pengakuan global dan indeks batubara Indonesia dalam kasus batubara).

Untuk kontrak jangka panjang, harga penjualan batubara ditentukan berdasarkan rata-rata tertimbang dari *Coal Benchmark Price* untuk tiga bulan sebelumnya.

Perusahaan pertambangan batubara diminta untuk memberitahu DJMBP tentang usulan harga jual sebelum penandatanganan perjanjian penjualan jangka panjang. Harga Batubara Acuan berlaku untuk IUP-Operasi Produksi, IUP-Khusus Operasi Produksi dan pemegang PKP2B.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, Harga Batubara Acuan hanya memberikan panduan untuk berbagai kelas batubara termal. Belum ada konfirmasi mekanisme untuk penetapan harga patokan untuk *coking coal* (satu-satunya lini produk Grup).

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

33. CONTINGENCIES (continued)**e. Ministerial Regulation No. 17/2010**

On 23 September 2010, the MoEMR issued Ministerial Regulation No. 17/2010 which amongst other matters outlines the mechanism for determining the Indonesian Minerals and Coal Benchmark Price ("IMCBP"), as one of the implementing regulations to the Mining Law No. 4/2009. It was effective on 23 September 2010.

Royalties to the Government will be calculated based on the higher of the actual sales price and the IMCBP as further explained in Ministerial Regulation No. 17/2010.

Ministerial Regulation No. 17/2010 provides a transition period until 22 March 2011 for spot sales contracts and 22 September 2011 for term sales contracts to be amended where necessary.

Following the issuance of the regulation, on 24 March 2011, the DGMCG issued regulation No. 515.K/32/DJB/2011 outlining the formula mechanism of Coal Benchmark Price for spot and term sales contracts.

The DGMCG will determine and update the monthly Coal Benchmark Price for spot sales contracts in accordance with market prices (based on a basket of recognised global and Indonesian coal indices in the case of coal).

For long-term contracts, the coal sales price is determined based on the weighted average of the Coal Benchmark Price for the preceding three months.

A coal mining company is required to notify the DGMCG of the proposed sales price before signing long-term sales agreements. The Coal Benchmark Price is valid for IUP-Production Operation, IUP Special Mining Business Licence Production Operation and CCoW holders.

Up to the date of these consolidated financial statements, the Coal Benchmark Price only provides guidance for various grades of thermal coal. There has been no confirmation of the mechanism for setting a benchmark price for coking coal (the Group's sole product line).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

33. KONTINJENSI (lanjutan)

Pada tanggal 26 Agustus 2011, DJMBP menerbitkan peraturan No. 999.K/30/DJB/2011, diubah dengan peraturan No. 644.K/30/DJB/2013 tertanggal 21 Maret 2013, terkait tata cara penetapan besaran biaya penyesuaian Coal Benchmark Price terkait royalti.

Grup berkeyakinan bahwa peraturan ini tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

f. Peraturan Menteri No. 34/2009

Pada bulan Desember 2009, Menteri ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri No. 34/2009 yang mewajibkan perusahaan pertambangan untuk menjual sebagian hasil produksinya kepada pelanggan domestik ("Domestic Market Obligation" atau "DMO").

Peraturan Menteri ini menyediakan sistem "cap and trade" dimana perusahaan pertambangan yang melebihi kewajiban DMO dapat menjual/mentransfer kredit DMO untuk perusahaan pertambangan lain yang tidak dapat memenuhi komitmen DMO. Mekanisme penetapan harga untuk kredit DMO akan ditentukan berdasarkan ketentuan komersial.

Mekanisme perdagangan kredit DMO telah diklarifikasi melalui Surat Edaran No. DJMBP 5055/30/DJB/2010 tanggal 29 November 2010, yang mengatur bahwa kredit DMO dapat ditransfer antar perusahaan pertambangan dengan persetujuan Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, termasuk kredit yang dimiliki oleh pedagang atas nama perusahaan pertambangan.

DMO biasanya disesuaikan dengan produksi aktual dan penggunaan rumah tangga yang sebenarnya dan pada 2014, 2015, 2016 dan 2017 pasokan dalam negeri dianggap memadai dan tidak ada DMO yang diberlakukan di seluruh dewan. Untuk tahun 2018 target DMO untuk AKT (sebelum penyesuaian produksi aktual) adalah sekitar 300.000 ton.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

33. CONTINGENCIES (continued)

On 26 August 2011, the DGMCG issued regulation No. 999.K/30/DJB/2011, amended by regulation No. 644.K/30/DJB/2013 dated 21 March 2013, outlining the mechanism of Coal Benchmark Price cost adjustments related to royalty calculations.

The Group believes that this regulation does not have significant impact to the Group's consolidated financial statements.

f. Ministerial Regulation No. 34/2009

In December 2009, the MoEMR issued Ministerial Regulation No. 34/2009, which provides a legal framework to require mining companies to sell a portion of their output to domestic customers ("Domestic Market Obligation" or "DMO").

This regulation provides for a "cap and trade" system whereby mining companies that exceed their DMO obligations may sell/transfer DMO credits to a mining company that is unlikely to meet its DMO commitment. The pricing mechanism for DMO credits is to be determined on commercial terms.

The mechanism for trading DMO credits has been clarified in Circular Letter of DGMCG No. 5055/30/DJB/2010 dated 29 November 2010, which provides that DMO credits can be transferred between mining companies with the approval of the Directorate General of Minerals, Coal and Geothermal, including credits held by traders on behalf of a mining company.

The DMO is usually adjusted for actual production and actual domestic use and in 2014, 2015, 2016 and 2017 domestic supply was deemed adequate and no DMO was enforced across the board. For 2018 the DMO target for AKT (before actual production adjustment) is some 300,000 tonnes.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

33. KONTINJENSI (lanjutan)**g. Peraturan Pemerintah No. 9/2012**

Pada tanggal 6 Januari 2012, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai penerimaan negara bukan pajak No. 9/2012 yang menggantikan peraturan No. 45/2003. Peraturan ini memberikan penjelasan mengenai iuran eksplorasi dari bisnis logam mineral dan komoditas batubara yang sebelumnya tidak diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 45/2003. Sebagai tambahan, peraturan ini juga memberikan arahan untuk imbalan tetap lainnya terkait dengan aktivitas logam mineral dan komoditas batubara dan imbalan lainnya yang tidak terkait dengan komoditas seperti kompensasi untuk informasi terkait dengan IUP dan IUPK area eksplorasi, biaya penggantian untuk penambangan batubara tertutup dan porsi bagian Pemerintah (4%) dari pemegang IUPK-Operasi Produksi berdasarkan pendapatan bersihnya.

Pemegang PKP2B diperkirakan akan melanjutkan penggunaan tarif sesuai kontrak karya.

h. Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. 714.K/30/DJB/2014

Berdasarkan PKP2B, AKT diperbolehkan untuk mengekspor hasil produksi batubaranya. Pada tanggal 12 Agustus 2014, DJMB menerbitkan peraturan No. 714.K/30/DJB/2014, yang mengatur mengenai kewajiban pemegang kontrak karya harus terdaftar sebagai eksportir terdaftar sebelum Perusahaan mengekspor batubara ke luar negeri. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian, Grup telah menyelesaikan hutang Royalti, dan memenuhi semua hal dalam peraturan ini, dan mendapatkan ijin eksportir terdaftar.

33. CONTINGENCIES (continued)**g. Government Regulation No. 9/2012**

On 6 January 2012, the Government of Indonesia released a regulation for non-tax state revenue No. 9/2012 which replaced the previous regulation No. 45/2003. This regulation provides clarification for obligation fees on metal mineral and coal commodities business which previously had not been set in GR No. 45/2003. In addition, it also provides guidelines on other fixed fees related to metal mineral and coal mines activities and other fees which are not related to commodities such as compensation for information related to IUP and IUPK exploration areas, replacement costs for closed coal mines and a portion of the Government's share (4%) from IUPK-Production Operation holders based on their net income.

The CCoW is expected to continue using the rates specified in the CCoW.

h. Directorate General of Minerals and Coals Regulation No. 714.K/30/DJB/2014

Pursuant to its CCoW, AKT is permitted to export its coal production. On 12 August 2014, the DGMCG released regulation No. 714.K/30/DJB/2014, which deals with the requirement of CCoW holders to be registered as an registered exporter before the Company can export its coals to foreign customers. As of the date of these consolidated financial statements, the Group has settled all outstanding Royalties, and met all requirements under this law, and has obtained registered exporter status.

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/83 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

**34. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM
MATA UANG ASING**

**34. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES IN
FOREIGN CURRENCIES**

						2016		
						Mata uang asing/ Foreign Currencies	Monetary assets in foreign currencies	
Aset moneter dalam mata uang asing								
Kas dan setara kas	Rupiah	9,974,310,459	742,357	Rupiah	Euro		Cash and cash equivalents	
	Euro	810	854					
	Dolar Australia	36	26		Australian Dollars			
	Dolar Singapura	73	51		Singapore Dollars			
Piutang dari pihak berelasi	Rupiah	-	-	Rupiah	Euro		Amounts due from related parties	
	Euro							
Jumlah asset moneter dalam mata uang asing		9,974,311,378	743,288				Total monetary assets in foreign currencies	
Liabilitas moneter dalam mata uang asing							Monetary liabilities in foreign currencies	
Utang usaha	Rupiah	-	-	Rupiah	Euro		Trade payable	
	Euro	-	-					
	Dolar Australia	-	-		Australian Dollars			
	Dolar Singapura	-	-		Singapore Dollars			
	Pound Sterling							
	Inggirs	-	-		Great Britain Pound			
Beban yang masih dibayar	Rupiah	-	-	Rupiah			Accrued expenses	
Jumlah liabilitas moneter dalam mata uang asing		-	-				Total monetary liabilities in foreign currencies	
Aset (liabilitas) moneter dalam mata uang asing, bersih							Net monetary assets (liabilities) in foreign currencies, net	
	Rupiah	9,974,310,459	742,357	Rupiah	Euro			
	Euro	810	854					
	Dolar Australia	36	26		Australian Dollars			
	Dolar Singapura	73	51		Singapore Dollars			
	Pound Sterling							
	Inggirs	-	-		Great Britain Pound			
Jumlah liabilitas moneter dalam mata uang asing, bersih		9,974,311,378	743,288				Total net monetary liabilities in foreign currencies, net	
						2015		
						Mata uang asing/ Foreign Currencies	Setara AS\$/ US\$ equivalent	Monetary assets in foreign currencies
Aset moneter dalam mata uang asing								
Kas dan setara kas	Rupiah	29,676,052,310	2,151,218	Rupiah	Euro		Cash and cash equivalents	
	Euro	6,673	7,290					
	Dolar Australia	11,432	8,341		Australian Dollars			
	Dolar Singapura	30,703	21,710		Singapore Dollars			
Piutang dari pihak berelasi	Rupiah	-	-	Rupiah	Euro		Amounts due from related parties	
	Euro	-	-					
Jumlah asset moneter dalam mata uang asing		29,676,101,118	2,188,559				Total monetary assets in foreign currencies	

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/84 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2016 AND 2015

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

34. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING (lanjutan)

34. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES IN FOREIGN CURRENCIES (continued)

Liabilitas moneter dalam mata uang asing					Monetary liabilities in foreign currencies
Utang usaha	Rupiah	1,415,871,856,666	61,528,767	Rupiah	Trade payable
	Euro	534,115	520,314	Euro	
	Dolar				
	Australia	261,557	232,309	Australian Dollars	
	Dolar				
	Singapura	-	-	Singapore Dollars	
	Pound				
	Sterling			Great Britain	
	Inggiris	2,201	2,096	Pound	
Beban yang masih dibayar	Rupiah	-	1,799,252	Rupiah	Accrued expenses
Jumlah liabilitas moneter dalam mata uang asing		1,415,872,654,539	64,082,738		Total monetary liabilities in foreign currencies
Aset (liabilitas) moneter dalam mata uang asing, bersih					Net monetary assets (liabilities) in foreign currencies, net
	Rupiah	(1,386,195,804,356)	(63,050,517)	Rupiah	
	Dolar				
	Australia	(250,125)	(222,846)	Australian Dollars	
	Euro	(527,441)	(511,724)	Euro	
	Pound				
	Sterling			Great Britain	
	Inggiris	(2,201)	(2,096)	Pound	
	Dolar				
	Singapura	30,703	38,505	Singapore Dollars	
Jumlah liabilitas moneter dalam mata uang asing, bersih		(1,386,196,553,420)	(63,748,678)		Total net monetary liabilities in foreign currencies, net

Pada tanggal 31 Desember 2016, jika mata uang asing melemah/menguat sebesar 10% terhadap Dolar AS dengan variabel lain konstan, laba (rugi) sebelum pajak untuk periode berjalan akan lebih tinggi atau rendah sebesar AS\$443.655 atau AS\$ 542.224 (31 Desember 2015: AS\$11,727.122 atau AS\$14,349.597) terutama diakibatkan keuntungan/(kerugian) dari penjabaran kas dan setara kas, utang usaha, dan beban yang masih harus dibayar dalam mata uang Rupiah.

Grup tidak menyelenggarakan program lindung nilai secara formal karena seluruh penjualan dan sebagian besar pengeluaran Grup adalah dalam mata uang Dolar AS.

35. PELAPORAN SEGMENT

Manajemen, dalam konsultasi dengan Direksi, telah menentukan bahwa Grup hanya memiliki satu laporan segmen untuk tambang batubara. Informasi pada kinerja keuangan dan aset bersih telah diungkapkan dalam laporan laba rugi dan posisi keuangan konsolidasian.

As at 31 December 2016, if the foreign currency had weakened/strengthened by 10% against the US Dollar with all other variables held constant, pre-tax loss for the period would have been US\$443,655 or US\$542,224 higher or lower (31 December 2015: US\$11,727,122 or US\$14,349,597), mainly as a result of foreign exchange gains/(losses) on translation of cash and cash equivalents, trade payables and accrued expenses denominated in Rupiah.

The Group does not enter into any formal hedging arrangements to protect the risk of Rupiah fluctuation since all sales and a large portion of the Group's expenditures are in US Dollars.

35. SEGMENT REPORTING

Management, in consultation with the Board of Directors, has determined that the Group has only a single reportable segment, being coal mining. Information on financial performance and net assets is presented in the consolidated statements of comprehensive income and financial position.

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/85 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

35. PELAPORAN SEGMEN (lanjutan)

Penjualan berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut:

	2016	2015	
Pasar geografis			<i>Geographical market</i>
Internasional			<i>International</i>
Asia	118,818,740	70,762,351	<i>Asia</i>
Eropa	11,000,538	-	<i>Europe</i>
	<u>129,819,278</u>	<u>70,762,351</u>	
Domestik	3,797,389	1,759,908	<i>Domestic</i>
	<u>-</u>	<u>-</u>	
	<u>133,616,667</u>	<u>72,522,259</u>	

36. KONSENTRASI RISIKO

Selama periode 2016 dan 2015 pendapatan Grup berasal dari penjualan batubara kepada Noble sebagai agen pemasaran dengan persentase masing-masing sebesar 99% dan 99%. Pembeli akhir dari penjualan batubara Grup sebagian besar berlokasi di Cina.

Manajemen Grup terus berusaha untuk meningkatkan basis pelanggannya.

35. SEGMENT REPORTING (continued)

Sales by destination are as follows:

36. CONCENTRATION OF RISK

During 2016 and 2015, the Group's revenue was earned from coal sales to Noble as the marketing agent with a percentage of 99% and 99% respectively. The end buyers of the Group's coal sales are mostly located in China.

The Group's management are continuing the efforts to expand the customer base.

37. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perusahaan dan entitas anak mengklasifikasikan kas dan setara kas, kas di bank yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, uang jaminan, piutang dari pihak berelasi dan pinjaman kepada pihak berelasi sebesar AS\$53 juta (2015: AS\$204,8 juta) sebagai pinjaman dan piutang.

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perusahaan dan entitas anak mengklasifikasikan pinjaman jangka pendek, utang usaha, beban yang masih harus dibayar, utang sewa pembiayaan dan pinjaman sebesar AS\$1.591 juta (2015: AS\$1.719 juta) sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

37. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

As at 31 December 2016, the Company and its subsidiaries classified its cash and cash equivalents, restricted cash in banks, trade receivables, refundable deposits, amounts due from related party and loans to related parties amounting to US\$53 million (2015: US\$204.8 million) as loans and receivables.

As at 31 December 2016, the Company and its subsidiaries classified its short-term loan, trade payables, accrued expenses, finance lease payables, and borrowings amounting to US\$1,591 million (2015: US\$1,719 million) as financial liabilities carried at amortised cost.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

38. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Kegiatan usaha Grup secara inheren dipengaruhi oleh berbagai jenis risiko keuangan: risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar, risiko harga dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas.

Pengelolaan risiko dipimpin oleh Dewan Direksi yang mengidentifikasi, mengevaluasi dan menentukan kebijakan untuk pengelolaan risiko keuangan jika dipandang perlu, dan menetapkan prinsip-prinsip untuk pengelolaan risiko secara keseluruhan, termasuk risiko pasar, kredit dan likuiditas.

Risiko pasar

i) Risiko nilai tukar mata uang asing

Penjualan, pendanaan dan sebagian besar pengeluaran Grup ditransaksikan dalam mata uang Dolar AS, yang secara tidak langsung merupakan lindung nilai alami (*natural hedging*) terhadap eksposur fluktuasi nilai tukar mata uang asing.

Manajemen berpendapat bahwa pergerakan nilai tukar Rupiah/Dolar AS tidak berdampak signifikan terhadap Grup karena hanya kurang sekitar 20% dari pengeluaran Grup yang terjadi dalam mata uang Rupiah, sedangkan keseluruhan penjualan Grup dilakukan dengan mata uang Dolar AS.

Lihat (Catatan 34) untuk sensitivitas dari eksposur Grup terhadap kurs mata uang asing.

ii) Risiko harga

Grup terekspos oleh fluktuasi harga *coking coal* yang mana dapat berdampak ke kinerja operasi dan keuangan. Pada dasarnya harga *coking coal* ditentukan oleh permintaan dan penawaran komoditas dunia dan faktor lain seperti permintaan baja. Grup secara proaktif mengelola risiko-risiko ini dan melakukan penyesuaian seperlunya, seperti strategi penumpukan persediaan batubara, rencana pertambangan dan jadwal pengiriman, jadwal dan operasi pertambangan untuk mengurangi dampak fluktuasi tersebut.

38. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Group's activities are inherently subject to a variety of financial risks: market risk (including foreign exchange risk, commodity price risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk.

Risk management is led by the Board of Directors, which identifies, evaluates and sets the policies for the management of financial risks, where appropriate; and provides the guiding principles for managing the overall risks, including market, credit and liquidity risks.

Market risk

i) Foreign exchange risk

The majority of the Group's sales, financing and the majority of its costs and operating expenditure are transacted in US Dollars, which indirectly represents a natural hedge on exposure to fluctuations in foreign exchange rates.

Management is of the opinion that the volatility in the Rupiah/US Dollars exchange rate is not likely to have a significant impact on the Group, as only an estimated 20% of the Group's costs and operating expenditures are transacted in Rupiah, while most of its sales are transacted in US Dollars.

Refer to (Note 34) for the sensitivity of the Group's exposure to foreign currencies.

ii) Price risk

The Group is exposed to fluctuations in coking coal prices, and price fluctuations may affect its operation and financial performance. Fundamentally, coking coal prices are determined by the worldwide supply and demand of the commodity and other factors such as world steel demand. The Group pro-actively manages these risks via, among other things, adjusting its stockpiling, mine plan and shipping schedules, production schedule and mining operations as necessary to reduce the impact of any volatility.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

38. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

iii) Risiko tingkat suku bunga

Grup memiliki sebagian pinjaman dengan tingkat suku bunga variabel sehingga Grup terekspos risiko suku bunga arus kas. Untuk mengurangi risiko perubahan tingkat suku bunga yang menyebabkan adanya ketidakpastian arus kas terhadap pembayaran beban bunga di masa depan, Grup:

- (a) Memonitor tingkat suku bunga di pasar; dan
- (b) Mengimplementasikan manajemen kas untuk meminimalkan beban bunga.

Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas keuangan Grup yang terpengaruh oleh risiko suku bunga:

38. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

iii) *Interest rate risk*

The Group has certain borrowings that are subject to variable interest rates, as such the Group is exposed to cash flow interest rate risk. In order to minimise interest rate risks which increase the uncertainty of the cash flows for interest payments in the future, the Group:

- (a) *Monitors interest rates in the market; and*
- (b) *Implements cash management measures to minimise interest expenses.*

The following table presents a breakdown of the Group's financial assets and financial liabilities on which interest rate risks may have an impact:

Aset	2016						Assets Cash and cash equivalents	
	Suku bunga mengambang/ Floating rate		Suku bunga tetap/ Fixed rate		Tanpa bunga/ Non- Interest Bearing	Jumlah/ Total		
	Kurang dari satu tahun/ Less than one year	Lebih dari satu tahun/ Greater than one year	Kurang dari satu tahun/ Less than one year	Lebih dari satu tahun/ Greater than one year				
Kas dan setara kas	4,313,652	-	-	-	340,516	4,654,168		
Kas di bank yang dibatasi penggunaanya	-	-	-	-	23,152	23,152	Restricted cash in banks	
Piutang usaha	-	-	-	-	48,695,007	48,695,007	Trade receivables	
Uang jaminan	-	-	-	-	-	-	Refundable deposits	
Piutang dari pihak berelasi	-	-	-	-	-	-	Amount due from related parties	
Pinjaman kepada pihak berelasi	-	-	-	-	-	-	Loan to related parties	
Jumlah aset keuangan	<u>4,313,652</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>49,058,675</u>	<u>53,372,327</u>	Total financial assets	
Liabilitas								
Utang PKPU	-	-	-	813,817,532	-	813,817,532	Restructured payable	
Utang usaha	-	-	-	-	4,643,779	4,643,779	Trade payables	
Beban yang masih harus dibayar	-	-	-	-	-	-		
Utang sewa pembiayaan	-	-	1,493,553	2,881,232	13,386,703	13,386,703	Accrued expenses	
Pinjaman dari pihak berelasi	-	-	-	-	-	4,374,785	Leases payable	
Pinjaman	-	-	<u>760,820,315</u>	-	<u>78,098,640</u>	<u>78,098,640</u>	Loans from related parties	
Jumlah liabilitas keuangan	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>762,313,868</u>	<u>816,698,764</u>	<u>96,129,122</u>	<u>1,675,141,754</u>	Total financial liabilities	

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/88 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

38. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

ii) Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

38. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

iii) Interest rate risk (continued)

	2015						Assets Liabilities	
	Suku bunga mengambang/ <i>Floating rate</i>		Suku bunga tetap/ <i>Fixed rate</i>		Tanpa bunga/ Non- Interest Bearing	Jumlah/ Total		
	Kurang dari satu tahun/ <i>Less than one year</i>	Lebih dari satu tahun/ <i>Greater than one year</i>	Kurang dari satu tahun/ <i>Less than one year</i>	Lebih dari satu tahun/ <i>Greater than one year</i>				
Aset								
Kas dan setara kas	4,007,660	-	-	-	150,389	4,158,049	Cash and cash equivalents	
Kas di bank yang dibatasi penggunaanya	-	-	-	-	88,113	88,113	Restricted cash in banks	
Piutang usaha	-	-	-	-	16,323,958	16,323,958	Trade receivables	
Uang jaminan	-	-	-	-	3,616,451	3,616,451		
Piutang dari pihak berelasi	-	-	-	-	2,904,233	2,904,233	Refundable deposits Amount due from related parties	
Pinjaman kepada pihak berelasi	-	-	-	-	-	-	Loan to related parties	
Jumlah aset keuangan	4,007,660	-	-	-	23,083,144	27,090,804	Total financial assets	
Liabilitas								
Pinjaman jangka pendek	376,412,498	-	-	-	-	376,412,498	Short-term loan	
Utang usaha	-	-	-	-	410,419,443	410,419,443	Trade payables	
Beban yang masih harus dibayar	-	-	-	-	55,719,903	55,719,903		
Utang sewa pembiayaan	-	-	1,512,155	74,709,279	-	76,221,434	Accrued expenses	
Pinjaman dari pihak berelasi	-	-	8,992,261	-	-	8,992,261	Leases payable	
Pinjaman	-	-	-	-	-	-	Loans from related parties	
Jumlah liabilitas keuangan	376,412,498	-	10,504,416	74,709,279	466,139,346	927,765,539	Total financial liabilities	

Risiko kredit

Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah eksposur maksimum dari risiko kredit adalah AS\$48.354.491 (2015: AS\$24.863.731). Risiko kredit terutama berasal dari penempatan dana pada bank, deposito berjangka, kas di bank yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang dari pihak berelasi, pinjaman kepada pihak berelasi dan uang jaminan.

Grup mengelola risiko kredit secara berkesinambungan, mengevaluasi profil kredit dari calon pembeli dan memonitor kinerja kredit mereka secara berkelanjutan.

Credit risk

As at 31 December 2016, total maximum exposure from credit risk was US\$48,354,491 (2015: US\$24,863,731). Credit risk arises from cash in banks, time deposits, restricted cash in banks, trade receivables, amounts due from related party, loans to related parties and refundable deposits.

The Group manages its credit risk by continuously reviewing the credit profile of its buyers and monitoring the credit performance thereof.

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/89 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

38. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

38. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

2016

	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Telah jatuh tempo dan Mengalami penurunan nilai/ <i>Past due and Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Piutang usaha	48,695,007	-	-	48,695,007	Trade receivables
	48,695,007	-	-	48,695,007	

2015

	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Telah jatuh tempo dan Mengalami penurunan nilai/ <i>Past due and Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Piutang usaha	18,400,642	-	-	18,400,642	Trade receivables
Piutang dari pihak berelasi	2,904,233	-	-	2,904,233	Amounts due from related party
	21,304,875	-	-	21,304,875	

Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo piutang usaha yang telah jatuh tempo lebih dari 30 hari adalah sebesar AS\$ nihil (2015: nihil). Grup tidak memegang jaminan sebagai perlindungan atas piutang usaha.

Manajemen yakin akan kemampuannya untuk terus mengendalikan dan mempertahankan eksposur yang minimal terhadap risiko kredit mengingat Grup memiliki kebijakan yang jelas dalam pemilihan pelanggan dan secara historis mempunyai tingkat piutang bermasalah yang rendah. Perusahaan juga melakukan pertimbangan yang menyeluruh sebelum masuk kedalam perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pembeli.

Kebijakan umum Grup untuk penjualan batubara kepada pelanggan yang sudah ada dan pelanggan baru adalah sebagai berikut:

- Memilih pelanggan (sebagian besar adalah perusahaan produsen baja unggulan) dengan kondisi keuangan yang kuat dan reputasi yang baik.

As at 31 December 2016, the balance of trade receivables that had been overdue for more than 30 days amounted to US\$ nil (2015: nil). The Group does not hold collateral as security for any trade receivables.

Management is confident in its ability to continue to control and maintain minimal exposure to credit risk, since the Group has clear policies on the selection of customers, and has proven low levels of bad debt records. The Company also does a thorough review before entering into legally binding agreements in relation to coal sales transactions.

The Group's general policies for coal sales to new and existing customers are as follows:

- Selecting customers (mostly blue chip steel producer companies) with a strong financial condition and a good reputation.

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/90 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

38. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

- Penerimaan pelanggan baru dan penjualan batubara melalui suatu prosedur yang disetujui oleh pihak yang berwenang sesuai dengan kebijakan delegasi kekuasaan Grup.

Kualitas kredit dari aset keuangan baik yang belum jatuh tempo atau telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai dapat dinilai dengan mengacu pada peringkat kredit eksternal (jika tersedia) atau mengacu pada informasi historis mengenai tingkat gagal bayar pelanggan:

38. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

- Acceptance of new customers and sales of coal are done by agreed procedures and are approved by authorised personnel according to the Group's delegation of authority policy.

The credit quality of financial assets that are neither past due or has already past due but not impaired can be assessed by reference to external credit ratings (if available) or to historical information about customer default rates:

	2016	2015	
Piutang usaha			Trade receivables
Dengan pihak yang tidak memiliki peringkat kredit			Counterparties without external credit rating
Grup 1			Group 1
Grup 2	48,695,007	16,323,958	Group 2
Jumlah piutang usaha yang tidak mengalami penurunan nilai	<u>48,695,007</u>	<u>16,323,958</u>	Total unimpaired trade receivables
Kas di bank dan deposito berjangka			Cash in banks and time deposit
Moody's:			Moody's:
A2	998,498	2,094	A2
Baa2	1,316,587	1,198,537	Baa2
Baa3			Baa3
Fitch:			Fitch:
AAA(idn)		88,216	AAA(idn)
AA-(idn)		-	AA-(idn)
Pefindo:			Pefindo:
idAA+	103,310	736,538	idAA+
idAA	-	-	idAA
idBBB	-	-	idBBB
Tidak memiliki peringkat	-	-	Not rated
	<u>2,418,395</u>	<u>2,025,385</u>	
Kas di bank yang dibatasi penggunaanya			Restricted cash in banks
Moody's			Moody's
A2	23,152	88,113	A2
	<u>23,152</u>	<u>88,113</u>	
Piutang dari pihak berelasi			Amounts due from related parties
Grup 1	-	-	Group 1
Grup 2	-	2,904,233	Group 2
	<u>2,904,233</u>	<u>2,904,233</u>	
Pinjaman kepada pihak Berelasi			Loans to related parties
Grup 1	-	-	Group 1
Grup 2	-	-	Group 2
	<u>2,904,233</u>	<u>2,904,233</u>	

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

38. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

- Grup 1: pelanggan/pihak berelasi baru (kurang dari enam bulan).
- Grup 2: pelanggan/pihak ketiga/pihak berelasi yang sudah ada (lebih dari enam bulan) tanpa sejarah wanprestasi.

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas muncul jika Grup mengalami kesulitan dalam memperoleh pendanaan khususnya modal kerja. Pengelolaan risiko likuiditas dengan prinsip kehati-hatian meliputi pemeliharaan kecukupan kas dan setara kas dan aset lainnya yang mudah dikonversikan menjadi kas. Grup mengelola risiko likuiditas dengan melakukan perencanaan dan pengevaluasian posisi dan arus kas secara berkesinambungan, dan menyesuaikan umur aset dan liabilitas keuangan secara tepat.

Tabel di bawah ini menganalisis liabilitas keuangan Grup secara neto yang dikelompokkan berdasarkan periode yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo kontraktual. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel merupakan arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 years	Antara 1 dan 2 tahun/ Between 1 and 2 years	Antara 2 dan 5 tahun/ Between 2 and 5 years	Lebih dari 5 tahun/ Over 5 year	
31 Desember 2016					31 December 2016
Utang PKPU	-	-		813,817,532	Restructured payable
Utang usaha - pihak Ketiga	4,643,779	-		-	Trade payables third parties
Beban yang masih harus dibayar	13,386,703	-		-	Accrued expenses
Utang sewa pembiayaan Pinjaman	760,820,315	4,694,199	-	-	Finance lease payables
					Borrowings
31 Desember 2015					31 December 2015
Pinjaman jangka pendek	-	-	376,412,498	-	Short-term loan
Utang usaha - pihak ketiga	-	-	410,419,443	-	Trade payables - third parties
Beban yang masih harus dibayar	-	-	55,719,903	-	Accrued expenses
Utang sewa pembiayaan	2,548,874	2,145,325	71,828,048	-	Finance lease payables
Pinjaman	800,763,000	-	-	-	Borrowings

Mengingat sebagian besar kewajiban Grup akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan ke depan, namun manajemen Grup melakukan rencana keuangan yang dapat mengatasi masalah likuiditas. Lihat (Catatan 2a) untuk pengungkapan tentang kemampuan Grup mempertahankan kelangsungan usaha.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

38. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

- Group 1: new customers/third parties/related party (less than six months).
- Group 2: existing customers/third parties/related party (more than six months) without default history.

Liquidity risk

Liquidity risk arises in situations where the Group has difficulties in obtaining funding especially working capital. Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash, cash equivalents and other assets that can be converted to cash quickly. The Group manages liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

The table below analyses the Group's financial liabilities into relevant maturity groupings based on the remaining period to the contractual maturity date. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows.

Given a significant portion of the Group's obligations may fall due within the next 12 months, however the Group's management is working on financial plans to address liquidity concerns. Please refer to (Note 2a) for disclosure about the Group's ability to continue as a going concern.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

38. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Estimasi nilai wajar

Nilai wajar adalah suatu jumlah dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan pada pasar aktif ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa teknik penilaian. Grup menggunakan berbagai metode penilaian yang ada dan membuat asumsi berdasarkan kondisi pasar yang ada pada tanggal pelaporan.

Salah satu teknik penilaian yang digunakan adalah dengan membandingkan harga pasar aktif atas instrumen lain dengan karakteristik yang serupa. Nilai wajar liabilitas tidak lancar akan dibandingkan dengan nilai pembanding ini. Teknik penilaian instrument keuangan lain yang digunakan adalah arus kas diskonto. Hasil dari kedua teknik penilaian ini kemudian dipertimbangkan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan.

Untuk tujuan pengungkapan, nilai wajar liabilitas keuangan diestimasi dengan mendiskontokan arus kas kontrak masa depan pada tingkat suku bunga pasar saat ini yang tersedia bagi Grup untuk instrumen keuangan yang serupa.

Tabel dibawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari liabilitas keuangan yang tidak disajikan Grup pada nilai wajarnya:

	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar / Fair value	
31 Desember 2016			31 December 2016
Utang sewa pembiayaan	4,374,785	4,374,785	Finance lease payables
31 Desember 2015			31 December 2015
Utang sewa pembiayaan	76,221,434	76,221,434	Finance lease payables

Nilai wajar dari utang sewa pembiayaan dinilai menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga yang dikenakan pada masing-masing utang sewa pembiayaan terakhir.

Nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan lainnya mendekati nilai wajarnya karena sifat jangka pendek dari instrumen keuangan.

38. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Fair value estimation

Fair value is the amount for which an asset could be exchanged or liability settled between knowledgeable and willing parties in an arm's length transaction.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined by using several applicable valuation techniques. The Group uses a variety of methods and makes assumptions based on market conditions at each reporting date.

One approach for valuation technique is based on quoted market prices for similar instruments. The fair value of long-term liabilities will be compared with these similar instruments. Other valuation techniques, such as estimated discounted cash flows, are also used to determine the fair value for the financial instruments. The results of these two approaches will be considered in determining the fair value of financial instruments.

The fair value of financial liabilities for disclosure purposes is estimated by discounting the future contractual cash flows at the current market interest rate that is available to the Group for similar financial instruments.

The table below describes the carrying amounts and fair value of financial liabilities that are not presented by the Group at fair value:

	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar / Fair value	
31 Desember 2016			31 December 2016
Utang sewa pembiayaan	4,374,785	4,374,785	Finance lease payables
31 Desember 2015			31 December 2015
Utang sewa pembiayaan	76,221,434	76,221,434	Finance lease payables

The fair value of finance lease payables is measured using discounted cash flows based on the interest rate on the latest finance lease payable.

The carrying amount of other financial assets and liabilities approximates their fair values because of the short-term nature of the financial instruments.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

38. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Manajemen risiko permodalan

Dalam mengelola permodalannya, Grup senantiasa mempertahankan kelangsungan usaha serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Lihat (Catatan 2a) untuk rencana manajemen menghadapi ketidakpastian terhadap kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

Grup secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola permodalannya untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal, serta mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang.

Tidak terdapat perubahan pendekatan manajemen dalam mengelola permodalannya pada tahun berjalan.

Konsisten dengan entitas lain dalam industri sejenis, Grup memonitor modal dengan menggunakan dasar rasio *gearing*. Rasio ini dihitung dengan membagi jumlah utang bersih dengan jumlah modal. Utang bersih dihitung dari total pinjaman (termasuk pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang, dan utang sewa pembiayaan seperti yang disajikan pada laporan posisi keuangan konsolidasian) dikurangi kas dan setara kas. Jumlah modal dihitung dari ekuitas seperti yang ada pada laporan posisi keuangan konsolidasian ditambah utang bersih.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, rasio utang terhadap modal adalah sebagai berikut:

38. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Capital risk management

In managing its capital, the Group safeguards its ability to continue as a going concern and to maximise benefits to the shareholders and other stakeholders.

Please refer to (Note 2a) for management's plan to mitigate the uncertainty of the Group's ability to continue as a going concern.

The Group actively and regularly reviews and manages its capital to ensure the optimal capital structure and returns to the shareholders, taking into consideration the efficiency of capital use based on operating cash flows and capital expenditures and also future capital needs.

There were no changes to the management approach to capital management during the year.

Consistent with other entities in the industry, the Group monitors the capital on the basis of the gearing ratio. This ratio is calculated as net debt divided by total capital. Net debt is calculated as total borrowings (including current, non-current borrowings, and finance lease payables as shown in the consolidated statement of financial position) less cash and cash equivalents. Total capital is calculated as 'equity' as shown in the consolidated statement of financial position plus net debt.

As at 31 December 2016 and 2015, the debt to equity ratios are as follows:

	2016	2015	
Jumlah pinjaman	1,579,012,632	1,253,396,933	<i>Total debt</i>
Dikurangi: Kas dan setara kas	<u>4,654,168</u>	<u>4,158,049</u>	<i>Less: Cash and cash equivalents</i>
Total pinjaman bersih	1,583,666,800	1,257,554,982	<i>Total net debt</i>
Total ekuitas	<u>(750,316,988)</u>	<u>(909,209,029)</u>	<i>Total equity</i>
Total modal	833,349,812	348,345,953	<i>Total capital</i>
Rasio <i>gearing</i>	<u>190.04%</u>	<u>361%</u>	<i>Gearing ratio</i>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

39. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)

a. Pinjaman Jangka Panjang

Menyusul penjualan saham ARM plc pada tahun 2015 (sebagai jaminan ke SCB), atas dana hasil penjualan tersebut (setara dengan AS\$45.942.685) SCB melakukan pembayaran pinjaman wajib bagi Perusahaan terhadap pinjaman SCB pada bulan Januari 2016.

Perusahaan dan SCB telah menyetujui persyaratan untuk penyelesaian Perjanjian Fasilitas terkait dengan pinjaman Perusahaan untuk investasi dalam ARM plc. Kewajiban yang tersisa (sekitar AS\$785 juta pada 31 Maret 2018) ditampilkan sebagai kewajiban lancar dalam neraca, menunggu realisasi resolusi yang disepakati.

Perusahaan dan SCB telah menyetujui persyaratan atas penyelesaian Perjanjian Fasilitas. Sejumlah pembayaran awal telah dibayarkan pada bulan April 2018 dan Perusahaan menargetkan penyelesaian dengan SCB pada 31 Oktober 2018.

Pada bulan Maret 2018 Grup telah membayar secara sukarela sebesar AS\$ 20.000.000 atas pinjaman terutang sesuai ketentuan yang diatur dalam akta pelunasan No. 15 tanggal 07 Maret 2018.

b. Perpajakan

Pada tahun 2017, Perusahaan dan BMS berpartisipasi dalam program Amnesti Pajak yang digulirkan oleh Pemerintah Indonesia untuk tahun pajak 2015. Partisipasi tersebut mensyaratkan pembayaran kewajiban perpajakan, penarikan atau pembatalan keberatan dan banding yang terhutang terhadap keputusan pajak yang beredar, pembayaran pajak final atas aset bersih yang tidak didepositkan pada berbagai tingkat dari 2%-10% dan penyisihan penghapusan pajak yang dibawa.

39. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
(continued)

a. Long Term Borrowings.

Following the sale of the ARMs plc shares in 2015 SCB applied the proceeds (then equivalent to US\$45,942,685) as a mandatory loan prepayment for the Company's against its SCB loan in January 2016.

The Company and SCB have arrived at a mutually acceptable resolution of the outstanding debt related to the Company's borrowings for the investment in ARM plc. The remaining liability to SCB (some US\$785 million as at 31 March 2018), is shown as a current liability in the balance sheet, pending realisation of the agreed resolution.

The Company and SCB have agreed on terms for the settlement of the Facility Agreement. An initial amount was prepaid in April 2018 and the Company expects to settle with SCB by 31 October 2018.

In March 2018 the group has paid voluntarily US\$20,000,000 for the outstanding loan under the terms stipulated in the deed of repayment no. 15 on March 7, 2018.

b. Taxation.

In 2017, but as at 31 December 2015, the Company and BMS participated in the Tax Amnesty program offered by the Government of Indonesia. Such participation required payment of outstanding tax liabilities, withdrawal or cancellation of objections and appeals against outstanding tax decisions, a final tax payment for net undeclared assets at various rates from 2%-10% and forfeiture of tax losses carried forward.

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/95 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

39. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)

b. Perpajakan (lanjutan)

Amnesti pajak menghasilkan:

	BMS	BLE	
Harta yang dideklarasikan	226,398	994,502	Assets declared
Pembayaran pajak	11,320	49,725	Tax payments

AKT tidak mengikuti program tax amnesty karena; (i) AKT tidak memiliki akses dana langsung untuk menyelesaikan semua hutang pajak yang terutang, (ii) penarikan keberatan pajak yang tertunda dan permohonan banding di pengadilan akan menghasilkan hutang pajak tambahan yang material apabila AKT menang, (iii) potensi pembatalan kerugian pajak carried forward melebihi manfaat jika AKT mengikuti program tax amnesty.

c. Keputusan PKP2B

Pada 19 Oktober 2017, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan keputusan untuk mencabut izin PKP2B AKT. AKT menggugat keputusan ini secara hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (State Administrative Court). Putusan yang dikeluarkan pada 13 Desember 2017 yang memungkinkan AKT untuk melanjutkan izin operasinya dan mengharuskan ESDM untuk menunda tindakan penegakan hukum terkait surat yang menunggu keputusan akhir Pengadilan. Keputusan resmi dikeluarkan pada 5 April 2018 yang menyatakan kembali keputusan sementara PTUN tersebut untuk dipatuhi.

Pada bulan Mei 2018, ESDM mengajukan banding atas keputusan PTUN. AKT akan segera merespon dan melanjutkan untuk membela hak – hak hukumnya.

39. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
(continued)

b. Taxation (continued)

The tax Amnesty resulted in:

AKT did not participate in the Tax Amnesty program as (i) AKT did not have access to immediate funds to settle all outstanding taxes payable, (ii) the withdrawal of pending tax objections and tax court appeals would result in material additional taxes payable for cases AKT expects to win, and (iii) the potential cancellation of tax losses carried forward far outweighed perceived benefits of participation when AKT did not have any undeclared assets.

c. CCoW Termination

On 19 October 2017 the Minister of Mines and Energy (ESDM) issued a letter which purported to terminate AKT's CCOW. AKT has contested this decision via a law suit through the State Administrative Court Jakarta (Pengadilan Tata Usaha Negara). An injunction was obtained on 13 December 2017 allowing AKT to continue operations and requiring ESDM to delay any enforcement action related to the letter pending a final decision of the Court. A formal decision was handed down on 5 April 2018 which restates the interim PTUN decision and finds in favour of AKT in all respects.

In May 2018 ESDM filed an appeal against the PTUN decision. AKT will in due course respond and continue to vigorously defend its legal rights.

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/96 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

**39. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

d. Arbitrase dengan Noble Resources Pte. Ltd.

Sebagai bagian dari proses PKPU pada tahun 2016, produsen batubara AKT, Noble, mengajukan klaim kreditur untuk pembayaran di muka batubara, namun Administrator untuk PKPU menganggap bahwa kontrak yang relevan di tempat terlalu berat terhadap AKT dan, sesuai dengan ketentuan undang-undang PKPU, Administrator menyatakan bahwa kontrak tersebut batal demi hukum. Pada bulan Juni 2016, AKT menandatangani Perjanjian Kerangka, Perjanjian Stockpile, Perjanjian Offtake ditambah Perjanjian Pengelolaan Saham (Dampanan dan Muara Tuhup) dengan Noble. Pada bulan April 2017 AKT menghentikan perjanjian yang relevan dan telah memilih untuk menjual/memasarkan batubara itu sendiri atau melalui pedagang.

Noble berpendapat bahwa penghentian kontrak tidak sah dan telah memulai proses Arbitrase di SIAC yang mencari antara lain, pengendalian atas 101.000 ton dan kerusakan batubara sebesar AS\$127 juta. Tribunal Arbitrase dan AKT telah mempertahankan hukum Inggris dan penasihat Singapura dan akan dengan penuh semangat menentang klaim/tuduhan tersebut.

e. Pergantian Dewan Direksi dan Komite Audit

Pada tahun 2015 Tuan Alexander Ramlie telah mengundurkan diri sebagai Presiden Direktur Perusahaan.

Pada tahun 2017 Presiden Direktur PT Asmin Koalindo Tuhup, Tuan Maxwell Armand meninggal dunia.

Pada tahun 2016 Tuan Paulus Soedibyo telah mengundurkan diri sebagai Komite Audit .

Karena belum ada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sejak bulan Oktober 2014, hal tersebut akan dibahas pada Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya dari masing-masing perusahaan.

**39. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
(continued)**

d. Arbitration with Noble Resources Pte. Ltd.

As part of the PKPU process in 2016, AKT's then coal offtaker, Noble, submitted creditor claims for coal prepayments, however the Administrator for the PKPU deemed the relevant contracts in place to be too onerous for AKT and, pursuant to the provisions of the PKPU laws, the Administrator declared those contracts null and void in law. In June 2016 AKT entered into a Framework Agreement, Stockpile Agreement, Offtake Agreement plus Stockpile Management Agreements (Dampanan and Muara Tuhup) with Noble. In April 2017 AKT terminated the relevant agreements and has chosen to sell/market coal it self or via traders.

Noble contends that the termination of the contracts was not valid and has commenced Arbitration proceedings at the SIAC seeking among other things, control over 101,000 tonnes of coal and some US\$127 million of damages. The Arbitration Tribunal has not yet convened and AKT has retained English law and Singapore counsel and will vigorously contest the claims/allegations.

e. Change of Directors, Audit C'tee

In 2015 Mr Alexander Ramlie resigned as President Director of the Company.

In 2017 the President Director of AKT, Mr Maxwell Armand, passed away suddenly.

In 2016 Mr Paulus Soedibyo resigned from the Audit Committee.

As there has not been a General Meeting of the Shareholders of the Company since October 2014, these matters will be addressed at the next General Meeting of Shareholders of the respective companies.

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/97 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

39. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)

f. Pinjaman jangka pendek

Perjanjian pinjaman jangka pendek AS\$350 juta dari FGB (yang telah berubah nama menjadi Bank Abu Dhabi Pertama sejak Agustus 2017) telah disajikan kembali dan direvisi beberapa kali yang terakhir ditandatangani pada tanggal 19 Juli 2017 dimana jangka waktu dan syarat perjanjian fasilitas (termasuk bunga belum bayar) diubah sesuai dengan PKPU Settlement Agreement. FAB telah mempertahankan dan menyajikan kembali keamanannya termasuk fidusia atas persediaan batubara dan piutang usaha.

Demikian pula fasilitas AS\$15 juta Fasilitas Perdagangan Tanpa Kontrak juga diubah pada tanggal 19 Juli 2019 untuk mematuhi Perjanjian Penyelesaian PKPU.

g. Konsultan Tambang

PT Darma Henwa Tbk. sejak Oktober 2016 ditunjuk sebagai konsultan untuk AKT untuk membantu pengelolaan tambang Tuhup yang menyediakan keahlian dan keahlian manajemen di tempat. Perjanjian ini berlaku selama lima tahun dan akan berakhir pada 2021. Pada akhir 2017 para pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian ini.

h. Kontrak Pasokan Batubara

Pada tahun 2017 AKT menandatangani kontrak pasokan batubara kokas jangka panjang dengan dua pabrik baja di India. Penetapan harga berdasarkan indeks dan volume menunjukkan porsi yang signifikan dari produksi yang direncanakan AKT pada 2018 dan seterusnya.

i. Perpajakan

Pada bulan Mei 2018 AKT mengajukan banding terhadap 12 penilaian kurang bayar PPh 23 di tahun 2012 sebesar Rp.108 miliar (setara AS\$48 juta).

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

39. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
(continued)

f. Short term loans

The US\$350 million short term loan agreement from FGB (which has changed its name to First Abu Dhabi Bank since August 2017) has been restated and revised several times the most recent being signed on 19 July 2017 wherein the tenor and terms of the facility agreement (including unpaid interest) were amended to accord with the PKPU Settlement Agreement. FAB has retained and restated its security including fiducia over coal stockpiles and accounts receivable.

Similarly the US\$15 million Uncommitted Trade Finance facility was also amended on 19 July 2017 to comply with the PKPU Settlement Agreement.

g. Mining Consultant

PT Darma Henwa Tbk. has since October 2016 been appointed as a consultant to AKT to assist with management of the Tuhup mine providing on-site personnel and management expertise. The agreement is for five years and expires in 2021. In late 2017 the parties agreed to terminate this agreement.

h. Coal supply contracts

In 2017 AKT entered into long term coking coal supply contracts with two steel mills in India. Pricing is index based and the volume represents a significant portion of AKT's planned production for 2018 and beyond.

i. Taxation

In May 2018 AKT submitted appeals against 12 assessments for WHT 23 underpayment in 2012 totally Rp.108 billion (equivalent to US\$48 million).

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/98 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016 AND 2015**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

40. OTORISASI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Laporan keuangan ini diotorisasikan untuk diterbitkan sesuai dengan resolusi Direksi Grup tanggal 17 Mei 2018.

40. AUTHORISATION OF FINANCIAL STATEMENTS

These financial statements were authorised for issue in accordance with a resolution of the Board Directors of the Group on 17 May 2018.